

**KEGIATAN PATROLI UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN
DI POLSEKTA JATIUWUNG**

TESIS

**YADE SETIAWAN UJUNG
NPM : 0806447495**



**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JUNI 2010**

**KEGIATAN PATROLI UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN
DI POLSEKTA JATIWUNG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
Kajian Ilmu Kepolisian**

**YADE SETIAWAN UJUNG
NPM : 0806447495**



**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.**

Nama : Yade Setiawan Ujung

NPM : 0806447495

Tanda tangan :



Tanggal : 22 Juni 2010


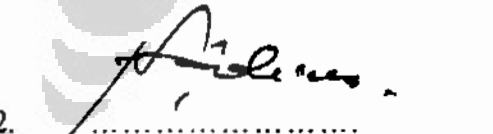
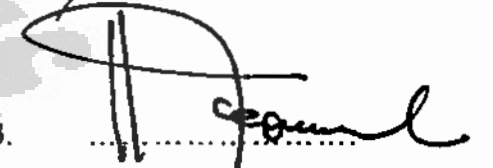
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yade Setiawan Ujung
NPM : 0806447495
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Kegiatan Patroli Untuk Mencegah Kejahatan di
Polsekta Jatiuwung

Tesis ini berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Science pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, SH, MA.
(Ketua Sidang / Pembimbing)
2. Dr. dr. H. Hadiman, SH, M.Sc
(Penguji I)
3. Prof. Dr. Koesparmono Irsan, SH, MH, MBA
(Penguji 2)

1. 
2. 
3. 

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan tesis ini berhasil diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Magister Sains pada program studi Kajian Ilmu Kepolisian, pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penelitian yang dilaksanakan di Polsek Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, tentunya telah didukung oleh banyak pihak, yang tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan mereka. Selain itu, penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada :

1. Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, SH. MA., selaku Ketua Sidang sekaligus Pembimbing dalam penyusunan tesis ini, atas kesabaran dan kesungguhan ditengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama penelitian dan penyusunan tesis ini.
2. Dr. dr. H. Hadiman, SH, M.Sc, selaku Penguji 1, atas kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan, serta ditengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri memberikan bimbingan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. Koesparmono Irsan, SH, MH. MBA, selaku Penguji 2, atas kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan serta bimbingan yang diberikan selama ini.
4. Seluruh pengajar program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada penulis.
5. Seluruh rekan-rekan perkuliahan khususnya angkatan XIII KIK UI yang telah memberikan sumbangsih referensi dan ilmu pengetahuan melalui diskusi maupun pada saat belajar kelompok.
6. Seluruh staff KIK UI yang telah ikut andil besar dalam hal terlaksananya proses belajar mengajar di program Pascasarjana KIK UI.

7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis.
8. Kepada istri tercinta dan anak saya yang telah memberikan andil yang cukup besar dan memberikan semangat dala, menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada pihak-pihak lain baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang turut andil dalam memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tesis.

Dengan demikian, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua, serta senantiasa diberikan rahmat, hidayat, dan kesuksesan kepada kita semua, amin.

Jakarta, 22 Juni 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yade Setiawan Ujung
NPM : 0806447495
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non_Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

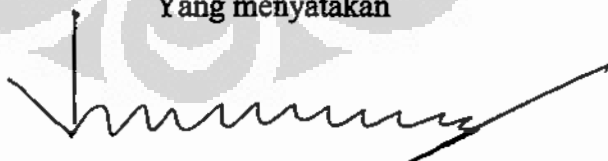
Kegiatan Patroli Untuk Mencegah Kejahatan Di Polsekta Jatiuwung

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2010

Yang menyatakan



(Yade Setiawan Ujung)

ABSTRAK

Nama : Yade Setiawan Ujung
Nomor Mahasiswa : 0806447495
Judul : Kegiatan Patroli Untuk Mencegah Kejahatan Di Polsekta Jatiuwung

Tesis ini bermaksud menganalisis kegiatan patrol dan pemolisian masyarakat melalui patroli untuk mencegah kejahatan di Polsekta Jatiuwung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan, pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Hasil peniltian menunjukkan manajemen kegiatan patroli kurang berjalan dengan baik, hal itu dikuatkan oleh kurang optimalnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan patroli. Kemudian kegiatan patroli menunjukkan tidak dapat mencegah kejahatan, karena tidak ada korelasi antara penurunan angka kejahatan dan diferensiasi kegiatan patroli, sedangkan yang menjadi kendala adalah faktor manusia serta sarana dan prasarana patroli. Selain itu pemolisian masyarakat melalui patroli kurang optimal, dalam hal ini kurangnya komunikasi antara masyarakat dan petugas patroli. Atas hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agar Polsekta Jatiuwung melaksanakan patroli jalan kaki dan patroli bersepeda, pelatihan bagi para petugas patroli, perubahan cara pendekatan tugas patroli serta perbaikan mekanisme pengendalian pelaksanaan patroli.

Kata Kunci : Patroli, Pencegahan Kejahatan, Pemolisian Komunitas

ABSTRACT

Name : Yade Setiawan Ujung
Student Numbers : 0806447495
Thesis Title : The Patrol Activities to Prevent Crime Conducted by Jatiuwung Sector Police.

This thesis is aimed at analyzing patrol activities as part of community policing strategy in preventing crime conducted by Jatiuwung Sector Police Command. This thesis used qualitative approach and study case as research design, while data are collected through in depth interview, observation, participative observation and study of document. This research found that patrol activities was not managed well. Such finding was indicated by unoptimized execution of all management functions: planning, organizing, actuating and controlling. Another finding is that patrol activities were unable to prevent crime, as there is no strong correlation between the decreasing number of crimes and differenziation of patrol activities. This research also reveals that community policing through patrol activities is not optimal particularly generated by the low level of communication between patrol officers and the community. Based on those findings, the author would like to suggest Jatiuwung Sector Police Command: to conduct foot patrol as well as bike patrol, to increase patrol officers' capacity by conducting such training, to change the approach and perception on patrol activities, and to improve the control mechanism of patrol activities.

Key words: Patrol, Crime Prevention, Community Policing

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orsinilitas.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Konsep dan Teori.....	5
1.4.1 Patroli.....	6
1.4.2 Manajemen.....	8
1.4.3 Pemolisian Masyarakat.....	10
1.4.4 Pencegahan Kejahatan.....	12
1.4.5 Teori Crime Prevention Through Enviromental Design.....	14
1.4.6 Teori fixing Broken Windows.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.5.1 Sumber Data / Informasi.....	19
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.5.3 Teknik Analisis Data.....	21
1.6 Sistematika Penulisan.....	22
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	
2.1 Situasi Wilayah Polsekta Jati uwung.....	23
2.2 Kondisi Sosial Ekonomi dan Kerawanannya.....	25
2.3 Organisasi Polsekta Jatiuwung.....	33
2.4 Karakteristik Kerawanan Daerah.....	39
BAB 3 PELAKSANAAN PATROLI DAN PEMOLISIAN POLSEKTA JATI UWUNG DALAM MENCEGAH KEJAHATAN.....	52
3.1 Unit Patroli Polri Polsekta Jatiuwung.....	52
3.2 Manjemen Pelaksanaan Patroli Polsekta Jatiuwung.....	57
3.2.1 Perencanaan Patroli.....	58
3.2.2 Surat Perintah Patroli.....	60
3.2.3 Laporan Pelaksanaan Patroli.....	61
3.3 Sistem Pelaksanaan Patroli Jatiuwung.....	63
3.4 Upaya Pencegahan Kejahatan Polsek Jatiuwung melalui kegiatan Patroli.....	74
3.5 Kegiatan Pemolisian Masyarakat Melalui Patroli.....	77
3.5.1 Patroli Dialogis.....	77

3.5.2	Pemolisian di Pemukiman Warga	80
3.5.3	Pemolisian di kawasan Pabrik	81
3.5.4	Pemolisian di kawasan Perbelanjaan dan Tempat Umum.....	82
BAB 4	ANALISIS PELAKSANAAN PATROLI DAN PEMOLISIAN DI POLKSEKTA JATI UWUNG DALAM MENCEGAH KEJAHATAN.....	84
4.1	Analisis Manajemen Patroli Polsekta Jatiuwung	84
4.1.1	Manajemen Sumber Daya Manusia	84
4.1.2	Manajemen Pelaksanaan Patroli.....	86
4.1.2.1	Perencanaan Patroli Polsekta Jatiuwung	86
4.1.2.2	Pengorganisasian Patroli Polsekta Jatiuwung	88
4.1.2.3	Pelaksanaan Patroli Polsekta Jatiuwung	90
4.1.2.4	Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Patroli Polsekta Jatiuwung	91
4.2	Analisis Patroli dalam mencegah Kejahatan dan Kendala yang dihadapi	93
4.3	Analisis Pemolisian Masyarakat melalui Kegiatan Patroli	96
4.3.1	Implementasi Pemolisian Masyarakat Melalui Patroli	99
4.3.2	Pemolisian Masyarakat dan Patroli untuk mencegah Kejahatan.....	100
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	103
5.1	Kesimpulan	103
5.2	Rekomendasi.....	104
	DAFTAR REFERENSI	106
	LAMPIRAN LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Data Perumahan di Wilayah Polsekta Jatiuwung.....	26
2.2 Data Bank dan ATM di Wilayah Polsekta Jatiuwung	28
2.3 Data Jumlah Personil Polsekta Jatiuwung.....	38
3.1 Data Personil Unit Patroli Polsekta Jatiuwung.....	55
3.2 Data Jumlah dan Kondisi Kendaraan bermotor.....	56
3.3 Beat Patroli	64
3.4 Data Sebelas Kasus Periode Tahun 2010	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta Wilayah Polsekta Jatiuwung	24
2.2 Grafik Total Jumlah industri Berdasarkan Kecamatan Kota Tangerang.....	25
2.3 Struktur Organisasi Polsekta Jatiuwung	33
3.1 Peta Beat 1 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung	66
3.2 Peta Beat 2 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung	67
3.3 Peta Beat 3 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung.....	69
3.4 Peta Beat 4 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung.....	70
3.5 Peta Beat 5 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung.....	72
3.6 Peta Beat 6 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung.....	73
3.7 Blangko Teguran Simpatik.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

Tesis ini bermaksud menunjukkan sistem manajemen patroli dan pemolisian masyarakat melalui kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan oleh Unit Patroli di Polsek Kota Jatiuwung. Yang dimaksud patroli adalah suatu bentuk kegiatan (pergerakan) dari tempat satu ke tempat lain dengan cara mengawasi sumber ancaman kejahatan yang dilakukan oleh fungsi samapta (unit patroli) Polsek Kota Jatiuwung guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal atau kejahatan. Sedangkan tujuannya memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman guna menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah hukum Polsek Kota Jatiuwung.

Penelitian tentang patroli ini pernah dilakukan Edy Murbowo (2003). Penelitiannya memfokuskan pada manajemen patroli Polsek Metropolitan Mampang. Yang ditunjukkan oleh tindakan-tindakan patroli yang merupakan bentuk produk dari kebijaksanaan para pejabat tingkat polsek dalam menginterpretasikan undang-undang, petunjuk-petunjuk serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dan keputusan untuk mengatur kegiatan operasional kepolisian patroli pada tingkat polsek. Hasil penelitiannya menunjukkan tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas patroli merupakan pencerminan dari manajemen operasional patroli kepolisian yang menyimpang dari hakekat patroli kepolisian, dan kendala yang dihadapinya adalah terbatasnya sumber anggaran yang mendukung pelaksanaan patroli, serta kebijakan dalam manajemen operasional dibuat secara lisan. Sedangkan tesis ini, berbeda dengan penelitian Murbowo (2003), tesis ini memfokuskan kepada manajemen patroli dan pemolisian melalui patroli untuk mencegah kejahatan, selain itu tempat atau lokasi dan waktu penelitian tidak sama, yaitu Unit Patroli Polsekta Jatiuwung 2010.

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia dituntut berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri dan dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi usaha itu akan terlaksana

apabila didukung situasi yang aman dan tertib, untuk mewujudkannya masyarakat menaruh ekspektasi kepada Kepolisian, sebagai satu-satunya institusi yang diberi wewenang oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 untuk menegakan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat agar memperoleh rasa aman dari setiap ancaman kejahatan sehingga mereka dapat menjalankan kegiatannya tanpa ada gangguan yang merugikan demi kesejahteraan yang keberlanjutan. Sebagaimana Suparlan (2004) mengemukakan polisi adalah alat negara yang didirikan dan dibangun untuk mencegah terjadinya kejahatan dan juga memerangi kejahatan. Sedangkan fungsi utama polisi adalah mencegah terjadinya kejahatan, yaitu memelihara keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menciptakan kondisi itu diperlukan polisi yang profesional dalam bidang tugasnya. Polisi harus mengerti dan memahami harapan dan keinginan dari masyarakat, dengan bersikap responsif dan proaktif pada setiap keluhan, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi. Penekanan utama terletak pada tindakan pencegahan kejahatan, menurut Balley (1994, hlm. 3) ada mitos selama ini “polisi tidak mencegah kejahatan.” Lebih lanjut dijelaskan, buktinya:

Pertama, analisa yang dilakukan berungkali selalu tidak menemukan hubungan antara jumlah polisi dengan angka kejahatan, Kedua. strategi utama yang digunakan kepolisian modern menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kejahatan hanya sedikit, atau sama sekali tidak ada.

Sementara itu, Greenwood, Peterselia, dan Chaiken dalam Bayley (1994) dari berbagai hasil sudi unsur penting untuk memecahkan kejahatan adalah apakah masyarakat—korban dan saksi—memberi informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tersangka. Intinya jika masyarakat tidak memberikan informasi kepada polisi kemungkinan kejahatan tidak dapat dipecahkan. \

Kedua hasil penelitian di atas, menunjukkan strategi pencegahan kejahatan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tidak cukup hanya polisi, tetapi perlu melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini diabsahkan Bayley (1994) perkembangan startegi pencegahan kejahatan polisi tidak dapat mencegah kejahatan tanpa bantuan dari masyarakat dan polisi harus berbuat lebih banyak

daripada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan. Maka dari itu, perlu kerjasama secara sinergi dan integratif antara polisi dengan masyarakat, untuk memecahkan permasalahan atau mencegah kejahatan di lingkungan masyarakat.

Kendati demikian kerjasama itu tidak akan terwujud tanpa upaya proaktif dari kepolisian sendiri, dalam hal ini oleh Polsek Kota Jatiuwung. Melalui berbagai tindakan atau aktivitas pada tataran fungsi kepolisian baik pada tingkat penyusun kebijakan maupun pada tingkat petugas lapangan. Tindakan tersebut terdiri atas.

1. Pre-emptif, yaitu merupakan aktifitas proaktif yang melibatkan secara aktif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan dan mencari pemecahan terhadap masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu keteraturan sosial
2. Preventif, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya permasalahan Kamtibmas. Polisi dan masyarakat bersama-sama mengawasi lingkungan dan mengaktifkan ronda lingkungan (pos kamling) atau dikenal dengan istilah sistem pengamanan swakarsa (Sispam Swakarsa), sistim ini secara resmi dilembagakan Desember 1980 oleh Awaloedin Djamin.
3. Represif, yaitu berbagai bentuk tindakan petugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk menegakkan hukum.

Karena, menurut Eggon Bittner dalam Bayley (1994, hlm. 29) “ fungsi utama kepolisian adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik daripada sekarang.” Salah satu upaya proaktif itu dapat dilaksanakan oleh Polsek Kota Jatiuwung melalui kegiatan patroli, yang bukan hanya semata pergerakan polisi berseragam untuk mengelilingi suatu objek, menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 atau roda 4 dengan pelan-pelan dan dilengkapi radio (Bayley 1994). Patroli yang dimaksud, tindakan kepolisian untuk mencari sumber ancaman (kriminalitas) dan meningkatkan kerjasama masyarakat untuk memelihara keteraturan sosial, untuk melindungi warga dan masyarakatnya sebagai acuan kegiatan pemolisiannya (Dwilaksana 2005, hlm 99).

Sedangkan yang dimaksud pemolisian adalah gaya, model atau corak pemolisian dalam melaksanakan tugas itu sendiri. Yang dilaksanakan berdasarkan hukum, peraturan, dan perundang-undangan, serta menjalankan kebijaksanaan pimpinan melalui manajemen operasional kepolisian untuk memelihara ketertiban masyarakat, keamanan, dan keteraturan sosial (Dwilaksana 2005, hlm. 99-100), yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan. Sementara itu menurut Finlay dan Zvekic (1988, hlm. 7) "pemolisian bukan sekedar bentuk, bentuk fungsi dan harapan, walaupun semuanya sudah termasuk didalamnya." Namun pemolisian sebagai perwujudan citra dan nilai yang diharapkan, sehingga akan menjadi alternatif gaya pemolisian yang mengedepankan perilaku, proses, dan prosedur yang berlandaskan peraturan dan perundang-undangan, dan tidak terlepas dari kebijakan pimpinan dalam melakukan tindakan kepolisian.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan patroli dalam mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsekta Jatiuwung. Karena kejahatan akan berdampak pada terganggunya aktivitas, rasa aman, dan nyaman masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Oleh karena itu Polsek Kota Jatiuwung memerlukan berbagai pola dan strategi (manajemen) patroli dan pemolisian masyarakat untuk menciptakan keteraturan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, dijabarkan dalam rumusan pertanyaan penelitian, berikut ini.

- a. Bagaimana manajemen patroli yang diterapkan oleh Polsekta Jatiuwung?
- b. Apakah pelaksanaan patroli Polsekta Jatiuwung dapat mencegah kejahatan dan apa kendala yang dihadapinya?
- c. Bagaimana pemolisian yang dilakukan oleh Unit Patroli Polsekta Jatiuwung terhadap masyarakat untuk mencegah kejahatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelenggaraan kegiatan patroli, hambatan atau kendala, dan pemolisian untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi masyarakat oleh Polsek Kota Jati Uwung sebagai upaya pencegahan kejahatan. Hal ini dilakukan untuk pengembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia dan untuk menunjukkan pola-pola yang harus dikembangkan dan diinterpretasikan oleh unsur pimpinan, serta dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan patroli sebagai salah satu gaya pemolisian, yang berdasar pada peraturan, peundang-udangan, corak masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial.

Sedangkan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti, baik secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, diharapkan dalam memberi masukan dan kontribusi dalam pengembangan konsep kegiatan patroli, sebagai upaya pencegahan kejahatan. Selain itu, diharapkan dalam memberikan kontribusi pada kepolisian sebagai pengembangan dari model pemolisian untuk mencegah kejahatan, meningkatkan partisipasi dan kerjasama masyarakat sebagai kekuatan untuk menciptakan keamanan dan ketertauran sosial.

Sedangkan manfaat praktis, dalam tesis ini ada tiga yang direkomendasikan. Pertama, memberikan rekomendasi yang tepat dan dapat digunakan Polri khususnya unit patroli polisi dalam rangka mencegah kejahatan dan memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat yang lebih baik di masa depan. Kedua, memberi kontribusi pada tataran pelaksanaan kepada Kapolsek Jaituwung dalam meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.

1.4 Konsep dan Teori

Dalam sebuah karya ilmiah, konsep dan teori merupakan syarat mutlak (Suparlan, 1997). Oleh karena itu, penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian, yaitu: Patroli, manajemen, pencegahan kejahatan, dan pemolisian masyarakat. adapun konsep dan teori itu sebagai berikut.

1.4.1 Patroli

Larry J Segel dalam Sitompul (2005, hlm. 10) megemukakan patroli adalah “bentuk ideal tugas polisi yang bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan polisi.” Sedangkan berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/49/IV/2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli, patroli adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota Samapta Polri guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dengan demikian, patroli dapat disimpulkan suatu kegiatan Polsek Kota Jatiuwung untuk mencegah bertemunya kesempatan dan niat kejahatan dengan cara mendatangi, mengawasi atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan tindak kejahatan atau gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran hukum, yang menuntut atau memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Patroli berperan sebagai garis depan operasional Polri, infomasi, dan sebagai “mata” dan “telinga” bagi kesatuannya. Patroli menjadi wujud kehadiran polisi dalam masyarakat, menjadi cermin kesiapan Polri setiap saat. Patroli juga menjadi sarana komunikasi polisi dengan masyarakat yang mendorong kemitraan antar polisi dengan masyarakat. Patroli dapat berperan sebagai pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat, Peranan patroli polisi yang baik dapat meningkatkan citra Polri sebagai pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, menurut Parker dalam Bailey (1995) ada beberapa teknik patroli yaitu patroli berjalan kaki, patroli bersepeda, patroli bermotor (*motorized patrol*), patroli dengan anjing dan kuda (*canine and horse*), helikopter, patroli perairan (*marine*). Sama halnya dengan Skep Kapolri No.Pol: Skep/49/IV/2004, teknik patroli itu, sebagai berikut.

- a. Patroli jalan kaki adalah patroli yang dilaksanakan dengan berjalan kaki.
- b. Patroli bersepeda adalah patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan sepeda.

- c. Patroli bermotor adalah patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat.
 - d. Patroli berkuda adalah patroli yang dilaksanakan dengan satwa kuda.
 - e. Patroli satwa anjing adalah patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan satwa anjing.
 - f. Patroli perairan adalah patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan transportasi air.
 - g. Patroli multi fungsi adalah patroli yang dilaksanakan oleh samant Polri yang mengembangkan fungsi intelijen, bina mitra, reserse, dan lalulintas.
- Akan tetapi yang dimaksud teknik patroli dalam tesis ini adalah patroli jalan kaki dan patroli bermotor (roda 2 dan 4).

Pada akhirnya patroli bertujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat sekitarnya. Menurut Hadiman (2009, hlm 7) tujuan pelaksanaan patroli akan menciptakan keadaan sebagai berikut.

1. Masyarakat merasa tentram
2. Niat melakukan kejahatan urung
3. Kesempatan kejahatan sirna
4. Pesan Kamtibmas tersampaikan
5. Penanganan pertama bila ada kejadian kejahatan
6. Informasi disampaikan kepada masyarakat
7. Masyarakat menjadi tertib dan disiplin

Namun untuk mewujudkan keadaan itu, Polsek Kota Jatiuwung perlu mengetahui objek gangguan kamtibmas yang dihadapi. Menurut Kunatro (1997, hlm. 233-235) objek itu diantaranya berupa: "kriminalitas, pelanggaran, kecelakaan, dan penyimpangan sosial." Lebih lanjut dijelaskan apabila gangguan kamtibmas tersebut dikaitkan dengan fenomena gunung es menunjukkan ada 3 jenis dasar gangguan.

1. Faktor korelatif kriminogen (FKK) yang bermakna peristiwa-peristiwa yang potensial menjadi benih kejahatan.
2. Polize hazard (PH) yang merupakan pengembangan dari FKK yang tidak tertangani dengan baik, yang pada dasarnya berwujud perilaku-perilaku menyimpang namun belum bisa disebut dengan kejahatan.

3. Ancaman faktual (AF) adalah bagaikan dari gunung es yang muncul dipermukaan, sebagai pengembangan PH yang tidak tertangani dengan baik, yang wujud nyatanya adalah bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran yang sebagian terbesar dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP.

1.4.2 Manajemen

Untuk menghadapi hakekat ancaman yang dihadapi oleh Polsek Kota Jatiuwung memerlukan manajemen patroli. Menurut Siagian (1996, hlm. 2) manajemen adalah “seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.” Definisi ini memberikan empat sudut pandang, diantaranya. Pertama, betapapun berhasilnya para ilmuwan mengembangkan teori tentang manajemen, yang antara lain berakibat pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, namun penerapan berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan pendekatan situasional artinya penerapan berbagai teori tersebut masih harus dibarengi oleh seni menggerakkan orang lain agar mau dan mampu berkarya demi kepentingan organisasi.

Kedua, manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional dimana terdapat sekelompok orang lain yang menduduki berbagai jenjang tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang bertanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan operasional. Pandangan ini sangat mendasar karena keberhasilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial tidak lagi diukur dari keterampilannya menyelenggarakan kegiatan operasional, melainkan dari kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain.

Ketiga, keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampilan teknis para pelaksana kegiatan operasional.

Keempat, kelompok manajerial dan kelompok pelaksana, mempunyai bidang tanggung jawab masing –masing yang secara konseptual menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapat lain dari Henry Fayol dalam Panglaykin dan Hazil (1960) fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian, sama halnya dengan pendapat Terry (1986). Lebih lanjut Fayol menjelaskan proses manajemen itu meliputi: perencanaan, penetapan tujuan, penegasan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinir kegiatan; pengorganisasian menetapkan tugas-tugas yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siap melapor kepada siapa, dan dimana keputusan itu harus diambil; pemimpin, memotivasi bawahan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran-saluran komunikasi dan memecahkan konflik; dan pengendalian, memantau kegiatan itu sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi penyimpangan.

Sedangkan menurut Dwiight Waldo dalam Williams (2001) prinsip dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Prinsip dasar ini, merupakan yang paling sederhana dalam mengelola suatu organisasi sekaligus akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan manajemen Patroli Polsekta Jatiuwung. Sementara itu menurut Kunarto (1997, hlm. 243) "di dalam lingkungan Polri dikenal dengan sebutan manajemen operasional (rutin) tujuh langkah atau MOTL." Tujuh langkah itu adalah perencanaan, briefing, penugasan dan konsignes, pelaksanaan, pelaporan, dan anev (analisa dan evaluasi). Sedangkan konsep dari Kunarto akan digunakan sebagai teori pendukung untuk menganalisis permasalahan itu.

Sedangkan terkait manajemen sumber daya manusianya, penulis akan menggunakan konsep dari Reksodiputro (2005). Yaitu pekerjaan polisi harus profesional, profesional sendiri terkait dengan pengetahuan (*knowledge*) dan skemampuan (*skill*) dibidangnya. Hal itu di analisis karena sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen, karena tanpa sumberdaya manusia yang baik, maka tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal karenanya. Sebagaimana dikemukakan Hasibuan (2001, hlm. 10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan

kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya Kapolsek Jatiuwung mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara serta menempatkan anggota dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas) yang tepat.

1.4.3 Pemolisian Masyarakat

Kamtibmas merupakan tujuan dari pemolisian. Secara luas pemolisian diartikan sebagai segala usaha atau upaya kepolisian untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas pada tingkat manajemen atau operasional baik dengan atau tanpa upaya paksa yang bersifat rutin, khusus, atau kontijensi. Upaya kepolisian dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas tersebut memerlukan pemahaman tentang masyarakatnya dengan berbagai masalah dan sistem sosial yang ada didalamnya, serta aspek internal kepolisian yang mencakup sistem manajemen, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempengaruhi dan dijadikan pedoman oleh petugas kepolisian dalam melaksanakan tindakannya.

Model pemolisian ada bermacam-macam yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam, yang pertama adalah pemolisian konvensional atau tradisional yang menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban. Jenis-jenis pemolisian reaktif, pemolisian ala pemadam kebakaran, reaksi cepat dan berorientasi penegakan hukum masuk dalam kategori pemolisian ini. Kelompok kedua adalah pemolisian kontemporer yang mempraktekkan model pemolisian yang sadar sepenuhnya pada keterbatasannya dalam berbagai hal. Untuk itu yang dilakukan adalah penyelesaian masalah dengan mencari akar serta solusi masalah itu sendiri, mengandalkan sumberdaya setempat, mengutamakan pencegahan, dan pemolisian yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Dewasa ini di seluruh dunia model pemolisian berkembang dan mengalami perubahan dengan mengedepankan kepentingan komunitas. Gaya pemolisian yang berubah ini menekankan agar kepolisian mempercayai masukan dari masyarakat dalam memutuskan kegiatan-kegiatan jenis apa yang diperlukan

komunitas lokal yang bersangkutan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, yang dikenal dengan pemolisian komunitas atau pemolisian masyarakat.

Pemolisian komunitas sendiri adalah sebuah strategi atau kebijakan untuk mengendalikan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Menurut Dwilakasana (2009) Apabila dilihat dari sudut pandang polisi, warga komunitas itu sendiri yang diterapkan dalam lingkup yang kecil (RW/Kelurahan) dan mengedepankan komunikasi dari hati kehati antara polisi dan warga untuk mendapatkan dukungan yang tulus dalam menerapkan pemolisiannya. Dan dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada untuk mengurangi rasa ketakutan warga akan kriminalitas, yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Polisi sebagai sebuah pranata, membentuk sebuah sistem antar hubungan norma-norma dan peranan-peranan yang berfungsi dalam masyarakat yang membutuhkannya (Suparlan 2004a), atau disebut gaya pemolisian. Artinya pemolisian mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya dan meningkatkan resiprositas antara polisi dan masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat tidak dianggap sebagai obyek pemolisian, tetapi merupakan subyek atau *co-producer* dari pelayanan. Pemolisian tidak dilihat dari kacamata polisi tetapi dari masyarakat sebagai *co-producer* itu. Polisi tidak menentukan pelayanan apa yang harus dilakukan, tetapi masyarakatlah yang menentukan sebagai *stakeholders* (Rahardjo 2001).

Hubungan antara polisi dengan masyarakat tentunya dilaksanakan melalui pemolisian yang terwujud dalam program dan strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial, menegakkan hukum untuk pengayoman kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang dilayaninya. Pemolisian yang menjadi acuan adalah *community policing* (pemolisian komunitas). Pemolisian komunitas adalah sebuah kebijakan mengenai kedekatan hubungan polisi dengan warga masyarakat dalam menciptakan rasa aman maupun memelihara keamanan di lingkungannya. Yang dilaksanakan proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan (Bayley 1994; Bailey1995; Friedman, 1992; Suparlan 2004b).

1.4.4 Pencegahan Kejahatan

Sejak lahirnya Kepolisian Modern pertama (Police London didirikan di Inggris oleh Sir Robert Peel melalui Police Act 1829) tugas utama polisi adalah pencegahan kejahatan (Bayley 1994). Menurutnya setiap upaya polisi dengan harapan ketiadaan kejahatan adalah merupakan hal yang paling utama. Pencegahan kejahatan adalah setiap bentuk upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. Rasa takut masyarakat terhadap kejahatan tersebut timbul karena berbagai peristiwa kejahatan yang diketahuinya, jumlah korban kejahatan, kerugian yang dialami serta ketidaktertiban sosial yang ada disekitarnya. Harapan masyarakat tentunya ingin bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghentikan kejahatan, sehingga mereka merasa aman. Rasa aman masyarakat itu meliputi kedamaian (*peace*), keamanan lingkungan (*secure*), keselamatan (*safety*) dan kepastian (*surety*) (Kelana 1994).

Dermawan (1994) menjelaskan pencegahan kejahatan merupakan “usaha yang terkoordinir dengan tujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal.” Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha yang terkoordinir untuk menekan tingkat kejahatan sampai tingkat yang minimal, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga diperlukan keterlibatan antar lembaga yang berwenang serta masyarakat untuk pencegahan kejahatan tersebut.

Sementara itu Bayley (1994) menyatakan polisi seharusnya mencegah kejahatan tetapi tidak dapat melakukan fungsi itu dengan jelas. Maka dari itu mencegah kejahatan menurutnya ada empat kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu Konsultasi (*Consultation*), Adaptasi (*Adaptation*), Mobilisasi (*Mobilization*), dan Pemecahan masalah (*Problem solving*).

Konsultasi adalah pertemuan yang dilakukan secara teratur antara polisi dengan warga masyarakat yang dimaksudkan untuk melakukan pertukaran

informasi mengenai masalah kamtibmas. Dalam mengefektifkan kegiatan konsultasi ini perlu dibentuk suatu forum komunikasi yang resmi dan bersifat tetap, pada tingkat Polsek atau desa/kelurahan sehingga permasalahan kamtibmas dapat dibahas bersama untuk dicarikan pemecahannya.

Adaptasi diperlukan mengingat permasalahan Kamtibmas yang dimiliki setiap daerah bervariasi. Kepolisian hendaknya tidak mengandalkan strategi-strategi umum yang sudah ditetapkan markas besar dan diberlakukan secara hierarki sampai ke level bawah. Kepolisian harus berusaha kembali membentuk struktur perintah sehingga pimpinan setempat dapat menggunakan sumber daya dengan lebih fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan desentralisasi komando dan pendelegasian pengambilan keputusan diberikan kepada satuan terdepan kepolisian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Mobilisasi adalah upaya polisi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif membantu polisi menangani masalah Kamtibmas. Caranya melalui pemberian kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program masyarakat-polisi yang kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.

Pemecahan masalah menekankan pada pentingnya analisa terhadap berbagai kejahatan dan masalah Kamtibmas yang terjadi. Berdasarkan analisa tersebut disusun rencana kegiatan yang akan dilakukan polisi dan masyarakat untuk penanggulangannya, dan melakukan evaluasi serta implementasi rencana penanggulangannya.

Sedangkan tujuannya menurut Hadiman (2009) terdapat enam hasil yang diharapkan melalui pencegahan kejahatan, yaitu.

1. Masyarakat melapor bila menjadi korban kejahatan.
2. Masyarakat melapor bila ada masalah yang menyangkut kamtibmas di wilayahnya.
3. Masyarakat aktif dalam organisasi yang menyangkut keamanan wilayahnya.
4. Dalam hal tertangkap tangan tidak main hakim sendiri.

5. Masyarakat menjadi sumber informasi.
6. Masyarakat akan tertib dan berdisiplin.

1.4.5 Teori Crime Prevention Through Enviromental Design

Menurut Hadiman (2008) pencegahan kejahatan pada umumnya dilakukan dengan dua ancaman. Pertama, ancaman sosial: kejahatan adalah produk sosial budaya dan ekonomi, pelakunya seolah-olah adalah kaum miskin, golongan lemah, tuna wisma, pengangguran, kelompok-kelompok terpinggirkan. Kedua, ancaman situasional: kejahatan bersifat oportunistik, tidak kompleks karena itu dapat dicegah melalui modifikasi atas lingkungan. Pendekatan sosial dilakukan dengan cara mengajak publik untuk mementingkan pendidikan dan sosialisasi dalam menyadarkan publik untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan melalui pendekatan situasional dilakukan dengan lebih mementingkan aspek manajemen, disain dan manipulasi lingkungan fisik dalam mencegah kejahatan.

Dalam tesis ini yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian menggunakan pencegahan kejahatan ancaman situasional dengan disain lingkungan atau dikenal dengan teori Crime Prevention Through Enviromental Design (CPTED) untuk memperoleh rasa aman bagi masyarakat. Menurut Oscar Newman dalam Hadiman (2008) CPTED memiliki empat prinsip dasar perencanaan keamanan, yang meliputi:

1. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan terhadap wilayah hukum Polsek Kota Jatiuwung sehingga kejadian apapun dapat dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan untuk melakukan kejahatan di lingkungan penduduk.
2. Pengawasan lingkungan, terhadap suatu pemukiman, pabrik dan tempat lain yang menimbulkan *polize hazard* diamati dari dalam dengan jelas sehingga dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. Hal itu dapat menggunakan peralatan, seperti alarm dan *Closed Circuit Television* (CCTV).
3. Citra atau *image*, Polsekta Jatiuwung harus memperlihatkan kesan lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta diawasi dan

diamankan. Sehingga akan menghilangkan niat seseorang melakukan kejahatan.

4. Lingkungan, meliputi seluruh wilayah hukum Polsek Kota Jatiuwung, mengawasi dan memfungsikan ruang kosong atau bangunan yang tidak digunakan, sehingga tidak menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan kejahatan atau penyakit masyarakat.

Sedangkan esensi teori CPTED ini, menurut Hadiman (2008) ada lima aspek. Yaitu: 1) mengurangi rasa takut terhadap tindak kejahatan; 2) memperbaiki hubungan ketetanggaan yang baik; 3) mengupayakan tempat bekerja yang aman dan terlindungi melalui disain lingkungan yang baik; 4) membantu mempermudah investigasi proses peradilan pidana, proses penyelamatan kawasan proyek secara individual maupun publik melalui upaya-upaya taktis; dan 5) dilakukan pengamanan proaktif. Lebih lanjut dijelaskan teknik dan strategi CPTED adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya pencegahan kejahatan yang kasat mata.
2. Meningkatkan pengawasan resiko yang kasat mata.
3. Mengurangi perolehan yang diharapkan pelaku.
4. Menghilangkan kesempatan niat dilakukannya kejahatan.

Selain itu menurut Hadiman (2008) CPTED lazimnya dibuat piranti- piranti lunak untuk mencegah terjadinya kejahatan, yaitu: 1) check list; 2) diskripsi; 3) prosedur; 4) jadwal, 5) statistik dan grafik; dan 6) format-format.

1.4.6 Teori Fixing Broken Windows

Teori *Fixing Broken Windows* yang dikemukakan oleh George L. Kelling dan Catherine M. Coles (1998) menggunakan perumpamaan jendela rusak untuk menggambarkan hubungan antara ketidaktertiban dengan kejahatan. Lebih lanjut Kelling dan Coles menggambarkan proses tersebut ke dalam istilah-istilah yang konkrit:

Suatu perkampungan yang stabil yang terdiri dari keluarga-keluarga yang peduli tentang rumah mereka, saling memperhatikan anak tetangga, dan dengan yakin mengerutkan dahi kepada pendatang-pendatang yang tidak diinginkan dapat berubah dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa

bulan saja menjadi hutan yang tidak layak untuk ditempati dan menakutkan. Satu rumah ditinggalkan, rumput-rumput menjadi panjang, satu jendela dilempar dan pecah. Orang dewasa tidak lagi memarahi anak-anak yang nakal. Anak-anak lalu menjadi bandel menjadi lebih kasar, keluarga-keluarga pindah ke tempat lain, orang dewasa yang tidak ada hubungannya masuk. Remaja berkumpul di depan sudut pertokoan. Pemilik toko meminta mereka untuk pindah; mereka menolak. Perkelahian terjadi. Sampah menumpuk, orang-orang mulai minum minuman di depan toko kelontong; pada satu waktu seorang gelandangan berjalan di trotoar dan dibiarkan tidur disana. Pejalan kaki didekati pengemis yang agresif.

Selanjutnya Kelling dan Coles menyatakan bahwa: Kejahatan jalanan yang serius tumbuh subur di daerah-daerah dimana perilaku tidak tertib berjalan tanpa kendali. Pengemis yang tidak dikekang itu, di dalam prakteknya adalah jendela pertama yang pecah, pencopet dan perampok bank yang oportunistik atau yang profesional percaya bahwa mereka dapat mengurangi kesempatan untuk tertangkap atau bahkan untuk diidentifikasi, kalau mereka beroperasi di jalanan, dimana calon-calon korban sudah merasa takut terlebih dahulu oleh keadaan yang ada. Apabila perkampungan itu tidak dapat mengendalikan para pengemis yang memaksa dan mengganggu orang berjalan, maka pencuri akan berlogika, sangat kecil kemungkinan memanggil polisi untuk mengidentifikasi pencuri masih bersifat potensial atau untuk campur tangan kalau pencurian benar-benar terjadi.

Selain itu menekankan bahwa polisi bertanggung jawab melindungi masyarakat baik secara keseluruhan, maupun setiap individu yang hidup dalam masyarakat itu. Maka dari itu, polisi harus memperhatikan masalah pemeliharaan ketertiban seperti tindakan pelanggaran, gelandangan, mabuk-mabukan, pengemis, dan sebagainya. Polisi bertanggung-jawab untuk menurunkan tingkat kriminalitas, sehingga warga tidak perlu lagi mengalami ketakutan akan tindakan kriminal. Dengan turunnya tingkat kriminalitas, Kontrol sosial dalam masyarakat pun akan menjadi lebih kuat.

Kelling dan Coles (1998) menyebutkan terdapat empat unsur dari "Strategi Jendela Rusak" yang menjelaskan dampaknya terhadap penurunan kejahatan. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Menangani ketidaktertiban dan para pelanggar hukum kecil-kecilan, menginformasikan kepada polisi dan memurgkinkan polisi untuk mengungkap eksistensi pelaku kejahatan.
2. Sangat jelasnya tindakan dan konsentrasi polisi di daerah-daerah yang ditandai dengan tingkat ketidakteriban yang tinggi yang memperlihatkan kepada masyarakat bahwa polisi aktif melindungi orang-orang yang baik sekaligus mengirimkan pesan "tindakan mereka tidak ditoleransi" kepada orang yang sembrono, tidak punya kepedulian dan orang-orang yang melanggar hukum dengan melakukan kejahatan-kejahatan ringan.
3. Penduduk sendiri mulai melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan menegakkan berbagai standar perilaku perkampungan dan pada akhirnya bergerak ketahap 'inti" dalam berbagai proses yang berjalan dari pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan.
4. Permasalahan ketidaktertiban dan kejahatan menjadi tanggung jawab bukan saja oleh polisi melainkan juga seluruh masyarakat, termasuk badan-badan dan lembaga-lembaga yang berada di luar perkampungan, tetapi berkaitan dengan itu semua memobilisasi untuk menanganinya secara terpadu.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis, dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengetahuan teoritik hasil penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena didukung oleh justifikasi teoritik yang logis dan data empiris yang sah. Oleh karena itu penelitian dapat juga dikatakan sebagai cara mencari atau menemukan kebenaran melalui metode ilmiah, yaitu melalui rangkaian kegiatan teoritik dan empirik

(Muhammad dan Djaali 2005) penelitian ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memperoleh kebenaran mengenai kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan di Polsekta Jatiuwung.

Pendekatan yang telah digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan harapan dapat menggambarkan secara mendalam tentang manajemen pemolisian melalui patroli oleh Polsekta Jatiuwung dalam rangka pencegahan kejahatan. Hal ini senada dengan pendapat Muhammad dan Djaali (2005) yang mengemukakan penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses untuk memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas.

Selanjutnya, Muhammad dan Djaali (2005) mengemukakan "penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menggunakan data kualitatif yaitu pengungkapan fakta secara deskriptif naratif dan tidak melakukan generalisasi kesimpulannya ke dalam populasi sehingga lebih banyak bersifat studi kasus." Pendekatan kualitatif memberikan data-data deskriptif berupa kata-kata baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh sumber informasi (informan) dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Dengan demikian dapat dilakukan penggalian permasalahan secara lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis memutuskan menggunakan penelitian kualitatif. Karena manajemen pemolisian melalui kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan menuntut penggalian yang lebih dalam terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk memperoleh data yang valid. Selain itu penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Yang memusatkan diri secara intensif terhadap satu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Kasus yang dimaksud disini adalah trend tindak kriminalitas di wilayah Polsekta Jatiuwung. Selain itu penulis mempertimbangkan tujuan penelitian yang ingin mengungkap fakta dan memperoleh gambaran tentang manajemen kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan di Polsekta Jatiuwung.

Penelitian ini juga bersifat *deskriptif*. Artinya penelitian ini mencoba memperoleh gambaran tentang kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan di

Polsekta Jatiuwung berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Data-data kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga gambaran pelaksanaan patroli dalam rangka mencegah kejahatan di Polsekta Jatiuwung dapat diketahui, diuraikan dan dijelaskan. Dan Penelitian ini mendeskripsikan keadaan objek penelitian secara jelas berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan dengan mengemukakan gejala-gejala yang ada secara lengkap.

1.5.1 Sumber Data/Informasi

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Informasi atau data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber.

Sumber Pertama, bersumber dari peneliti sendiri sebagai instrumen utama penelitian ini, dan orang-orang yang berkompeten serta dapat memberikan keterangan yang seluas-luasnya berkaitan dengan persoalan penelitian yang terdiri dari: 1) informan kunci yakni orang-orang yang dapat berbicara cukup akurat dan mampu mewakili kelompoknya atau lembaganya, yaitu: Kapolsekta Jatiuwung (yang mempunyai peranan sangat besar terkait dengan pengambilan keputusan); 2) informan penting: Kanit Patroli Polsekta Jatiuwung dan Anggota patroli sebagai pelaksana; 3) informan tambahan: masyarakat Jatiuwung dan iforman lain yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian yakni Ketua FKPM Jatiuwung dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar wilayah Jatiuwung.

Informan tersebut di wawancarai dan diamati. Hasilnya baik kata-kata dan tindakan diatas dicatat melalui catatan tertulis, direkam dengan *audio tapes*, ataupun difoto.

Sumber kedua, yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yakni, data/ informasi yang berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan patroli. Seperti Undang-undang, Juklak, Juknis, Perkap, arsip serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan patroli kepolisian di Polsekta Jatiuwung. Selain itu data atau informasi didapatkan melalui foto mengenai latar penelitian seperti foto kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan patroli.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk kepentingan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik pengamatan (observasi), wawancara dan penelitian dokumen. Teknik *pengamatan*, adalah kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data secara sistematis, wajar dan tanpa rekayasa, dengan menggunakan panca indra dan alat bantu lainnya untuk melihat, mendengar dan merasakan, kemudian mencatat semua fenomena dan gejala-gejala lainnya tentang subyek dan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini saya menggunakan pengamatan/ observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah suatu bentuk pengamatan (*observasi*) di mana pengamat (*observer*) juga terlibat dalam kehidupan atau pekerjaan atau aktivitas subyek yang diobservasi (*responden*).

Peneliti berupaya untuk akrab dengan anggota petugas patroli dan terlibat dalam pelaksanaan patroli. Selain itu melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berbaur, sehingga terjalin kedekatan dan hubungan emosional serta terjalin komunikasi guna mendapatkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian hasilnya didokumentasikan dan dinarasikan kedalam catatan lapangan.

Teknik wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara yang direncanakan terlebih dahulu dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara). Dalam membuat pedoman wawancara, peneliti memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Menghindari kata-kata yang memiliki arti ganda dan sulit dimengerti; b) Menghindari kalimat tanya yang panjang; c) Menggunakan pertanyaan yang konkrit; d) Pertanyaan berkaitan nyata dengan pengalaman informan; e) Memunculkan beberapa alternatif; f) Tidak menyinggung perasaan yang diwawancarai; g) Tidak terkesan melakukan interogasi; dan h) Tidak mengarah pada satu jawaban saja.

Teknik Penelitian dokumen dilakukan dengan mengumpulkan arsip, surat surat, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan patroli di Polsek Jatiuwung. Teknik ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain. Hal ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian saya menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Muhammad dan Djaali (2005) ada 3 unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif terdiri dari reduksi data, sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data dalam kategori tertentu, mengambil data yang dianggap penting dan diperlukan, serta meninggalkan data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, penulis melakukan seleksi, menyederhanakan, membuat fokus dan abstraksi data kasar yang telah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini dilakukan terus selama penelitian oleh penulis dengan membuat catatan-catatan kecil. Setelah melakukan reduksi data, maka data yang ada sekarang adalah data yang sudah diseleksi dan terpilih sesuai pokok-pokok permasalahan penelitian. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis agar lebih mudah dan terarah dalam proses pengumpulan data.

Menyajikan data, data hasil reduksi tersebut, kemudian ditampilkan dalam suatu sajian data untuk memungkinkan diambil suatu kesimpulan dalam penelitian. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau diagram, hubungan-hubungan dan lain-lain yang dianggap perlu. Sajian data ini dirancang sedemikian rupa oleh penulis untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan di Polsekta Jatiuwung. Sajian data tersebut juga dimaksudkan dalam melakukan kontrol dan evaluasi tentang data yang dikumpulkan, sehingga dapat diketahui kekurangan data yang mungkin masih harus dicari lagi. Pada akhirnya data yang telah

terkumpul tersebut secara lengkap dapat disusun sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti.

Verifikasi data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Sejak langkah awal pengumpulan data sudah harus dipahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal, dan proposisi. Kesimpulan akhir ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang akan dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis tentang manajemen pemolisian melalui kegiatan patroli dalam mencegah kejahatan di Polsekta Jatiuwung disusun berdasarkan atas beberapa bab sesuai dengan permasalahan yang diuraikan. Bab itu meliputi.

BAB 1 PENDAHULUAN, merupakan pengantar dan berisikan maksud dan tujuan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, konsep dan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN, meliputi situasi wilayah Polsekta jatiuwung, kondisi sosial ekonomi dan kerawanannya, organisasi Polsekta Jatiuwung, dan karakteristik kerawanan daerah.

BAB 3 PELAKSANAAN PATROLI POLSEKTA JATI UWUNG DAN PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEJAHATAN, meliputi unit patroli Polsekta Jatiuwung, administrasi, sistem pelaksanaan patroli, upaya pencegahan kejahatan melalui patroli, dan pemolisian masyarakat melalui patroli.

BAB 4 ANALISIS PELAKSANAAN PATROLI DAN PEMOLISIAN MELALUI PATROLI POLSEKTA JATI UWUNG DALAM MENCEGAH KEJAHATAN, meliputi analisis manajemen, analisis patroli dalam mencegah kejahatan dan kendala yang dihadapi, dan analisis pemolisian masyarakat melalui patroli.

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

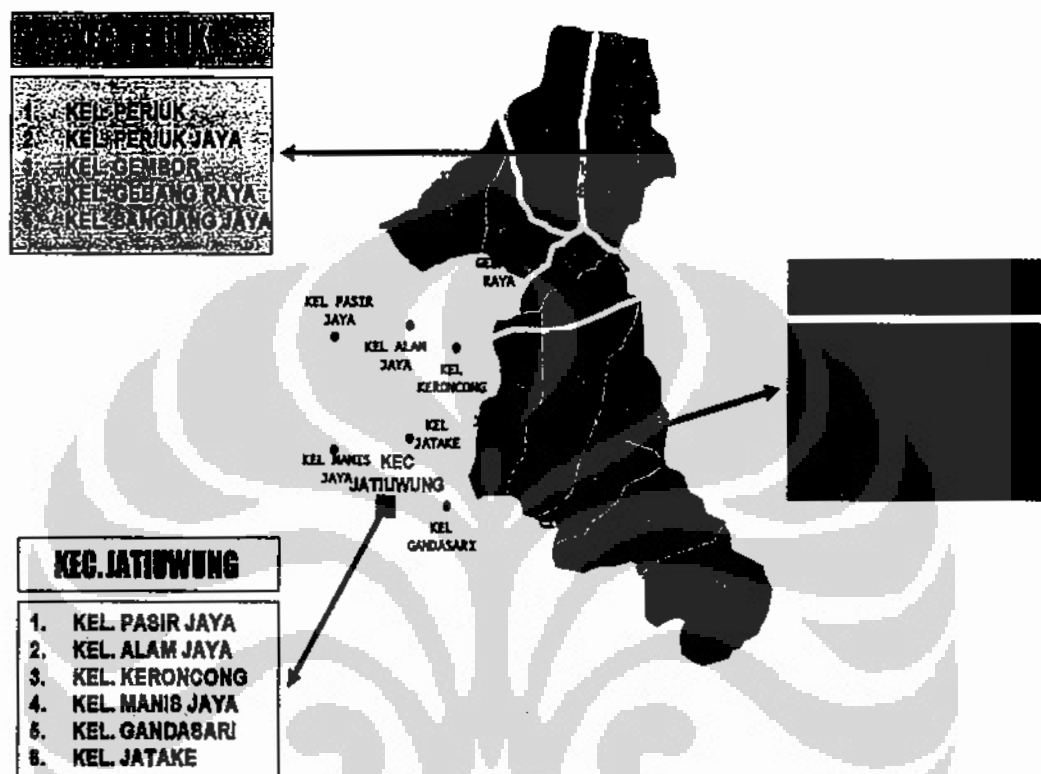
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Situasi Wilayah Polsekta Jatiuwung

Polsekta Jatiuwung merupakan salah satu dari 8 Polsek yang berada dibawah Polres Kota Tangerang., yang terletak di Jalan Gatot Subroto KM 5. Wilayah hukum Polsekta Jatiuwung membawahi 3 wilayah kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Cibodas yang terbagi dalam 6 kelurahan yaitu : Kelurahan Cibodas, Kelurahan Cibodas Baru, Kelurahan Cibodasari, Kelurahan Jatiuwung, Kelurahan Pan Barat, dan Kelurahan Uwung Jaya; 2) Kecamatan Jatiuwung yang terbagi dalam 6 kelurahan yaitu : Kelurahan Alam Jaya, Kelurahan Gandasari, Kelurahan Jatake, Kelurahan Keroncong, Kelurahan Manis Jaya, Kelurahan Pasir Jaya; dan 3) Kecamatan Priuk yang terbagi dalam 5 kelurahan yaitu : Kelurahan Gebang Raya, Kelurahan Gembor, Kelurahan Priuk, Kelurahan Priuk Jaya, Kelurahan Sangiang Jaya. Sedangkan batas Wilayah hukum Polsekta Jatiuwung: 1) sebelah utara: wilayah Polsek Pasar Kemis; 2) sebelah selatan: wilayah Polsek Curug dan Polsek Kelapa Dua; 3) sebelah timur: wilayah Polsek Kota Karawaci; dan sebelah barat: wilayah Polsek Cikupa.

Berdasarkan letak geografis wilayah Polsekta Jatiuwung merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata lebih kurang 4 meter diatas permukaan laut (dari titik 0 pantai utara Banten, pada posisi 86,14 derajat Lintang Selatan dan 106,37 derajat Bujur Timur. Luas wilayah Polsekta Jatiuwung meliputi areal tanah: 3.429,315 Ha, dengan komposisi tanah darat seluas 3.345,735 Ha, tanah pesawahan: 54,530 Ha, dan tanah wakaf/ titisara: 29, 050 Ha. Selain itu terdapat rawa dan sungai serta anak sungai yang mengalir diatasnya yaitu Kali Sabi, Kali Cirarap, Kali Ciledug, Kali Cisadane, Kali Cisayur, Kali Cikoneng, Anak Sungai Cisadane, Citu Bulakan Priuk dan Citu Gunung Sari. Sebagaimana nampak dalam gambar peta dibawah ini.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Polsekta Jatiuwung



Sumber : Polsekta Jatiuwung 2010

Sedangkan berdasarkan komposisi penduduk, terdiri dari warga pribumi dan pendatang dari berbagai suku dan bangsa dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang bervariasi. Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan pendataan penduduk selalu berubah ubah setiap saat. Saat ini data jumlah penduduk yang bermukim di 184 rukun warga (RW) yang terdiri dari 1.010 rukun tetangga (RT) dan jumlah penduduk di wilayah Polsekta Jatiuwung adalah 308.554 orang, terdiri dari laki-laki: 153.025 orang, dan perempuan: 155.159 orang.

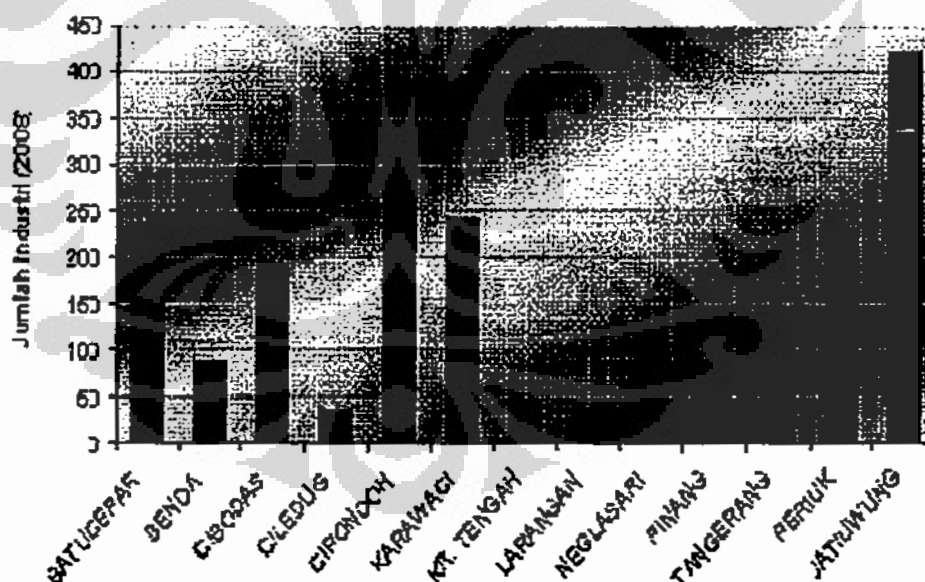
Sedangkan berdasarkan matas pencaharian. Penduduk sebagai pegawai negeri 7. 234 orang, TNI : 1. 436 orang, Polri : 385 orang, pegawai Swasta: 98. 239 orang, wiraswasta: 9. 553 orang, dagang: 13. 255 orang, purnawirawan : 3. 502 orang, buruh: 24. 433 orang, tani : 330 orang, lain-lain: 137.038 orang. sementara itu berdasarkan pemeluk agama, Islam: 257. 433 orang, Kristen: 24.

652 orang, Katholik: 15. 052 orang, Budha: 7. 973 orang, Hindu: 2. 362 orang, dan Konghucu: 774 orang. Dari uraian tersebut, nampak mayoritas penduduk berjenis kelamin laki-laki, mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta, dan mayoritas memeluk agama islam.

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi dan Kerawanannya

Berdasarkan hasil pengamatan, studi dokumen baik laporan kesatuan Polsekta Jatiuwung 2009 maupun laporan akhir tahun kecamatan Jatiuwung, Cibodas dan Periuk 2009, kondisi sosial dan ekonomi dapat dibagi atas: daerah industri, pemukiman, perdagangan, perbankan dan objek vital. Untuk daerah industri, saat ini yang tersebar di tiga kecamatan mengalami perkembangan yang signifikan, dapat terlihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.2
Grafik Total Jumlah Industri berdasarkan kecamatan di Kota Tangerang



Sumber: Dinas Deperindagkopar Kota Tangerang 2010

Dari grafik tersebut, nampak Kecamatan Jatiuwung merupakan pusat industri tertinggi untuk di wilayah tanggerang, kemudian disusul Kecamatan Cipondok, Kecamatan Periuk, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas dan seterusnya. Artinya wilayah Polsek Jatiuwung merupakan dari peindustrian yang menopang perekonomian bagi ketiga wilayah kecamatan itu khususnya, dan Kota tanggerang khususnya. Perusahaan besar dan kecil yang terdapat di wilayah Kecamatan

Jatiuwung 337 perusahaan, di wilayah Kecamatan Cibodas 70 perusahaan dan 79 perusahaan berada di wilayah Kecamatan Priuk. Sehingga total jumlah perusahaan yang ada di wilayah hukum Polsekta Jatiuwung sebanyak 486 perusahaan.

Namun, selain menopang perekonomian bagi ketiga wilayah itu, di sisi lain menimbulkan faktor kriminatif kriminogen (FKK) atau kerawanan sosial. Seperti demonstrasi dan pemogokan buruh yang menuntut jaminan sosial yang lebih tinggi, terutama apabila industri-industri tersebut belum mampu menaikkan standar upah buruh sesuai upah minimum regional (UMR). Selain itu, berkembangnya wilayah itu mengundang arus urbanisasi sehingga berakibat pada lonjakan jumlah penduduk dan kebutuhan akan kawasan pemukiman atau perumahan penduduk, yang akan menjadi menjadi potensi kerawanan sosial bagi masyarakat sekitar. Adapun jumlah perumahan penduduk adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Data Perumahan di Wilayah Polsekta Jatiuwung

1	Perumnas I Kel Cibodasari	Kecamatan Cibodas
2	Perumnas II Kel. Cibodas Baru.	Kecamatan Cibodas
3	Perumnas III Kel. Cibodas Baru	Kecamatan Cibodas
4	Perumnas IV, Kel. Uwung Jaya	Kecamatan Cibodas
5	Perum Ilhami , Kel.Pan. Barat	Kecamatan Cibodas
6	Perum Pasifik Indah, kel. Jatake	Kecamatan Jatiuwung
7	BTN Pasir Jaya, kel. Pasir Jaya	Kecamatan Jatiuwung
8	Perum Purati Kel. Alam Jaya	Kecamatan Jatiuwung
9	Perum Wisma Harapan Kel.Gembor	Kecamatan Priuk
10	Perum Griya Merpati Mas Kel. Gembor	Kecamatan Priuk
11	Perum Pondok Makmur, Gebang Raya	Kecamatan Priuk
12	Perum Villa Tangerang Indah	Kecamatan Priuk
13	Perum Kroncong Kel.Kroncong	Kecamatan Jatiuwung
14	Perum Regency I Kel. Gebang Raya	Kecamatan Priuk
15	Perum Taman Gebang Kel.Gebang Raya	Kecamatan Priuk
16	Perum Bumi Berhias, Gebang raya	Kecamatan Priuk

17	Perum Villa Mutiara Pluit	Kecamatan Priuk
18	Perum Taman Elang	Kecamatan Priuk
19	Perum Taman Jati	Kecamatan Priuk
20	Perum Taman Kota	Kecamatan Priuk
21	Perum Taman Cibodas	Kecamatan Priuk
22	Perum Priuk Jaya	Kecamatan Priuk
23	Perum Priuk Damai	Kecamatan Priuk
24	Perum Villa Taman Cibodas	Kecamatan Priuk
25	Perum Kodim 0506	Kecamatan Priuk
26	Perum Total Persada	Kecamatan Priuk
27	Perum Alam Permai	Kecamatan Cibodas
28	Perum Aster	Kecamatan Cibodas
29	Perum Cimone Permai	Kecamatan Cibodas
30	Perum Taman Kota Permai	Kecamatan Jatiuwung
31	Perum Taman Imam Bonjol	Kecamatan Cibodas
32	Perum Taman Ayu Lippo	Kecamatan Cibodas
33	Perum Taman Batu Jimbaran	Kecamatan Cibodas
34	Perum Taman Okado	Kecamatan Cibodas
35	Perum Taman Paris	Kecamatan Cibodas
36	Perum Taman Britania	Kecamatan Cibodas
37	Perum Taman New Britania	Kecamatan Cibodas
38	Perum Taman Holandia	Kecamatan Cibodas
39	Perum Taman Spain	Kecamatan Cibodas
40	Perum Panorama	Kecamatan Cibodas
41	Perum Villa Grand Tomang	Kecamatan Priuk

Sumber : Intel Dasar Polsekta Jatiuwung, 2010

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri, mendorong juga perkembangan di dunia perbankan sebagai penopang perekonomian di ketiga wilayah kecamatan tersebut. Saat ini banyak bank berdiri dan melakukan aktivitas di wilayah itu sekaligus dilengkapi dengan ATM untuk memudahkan transaksi, sebagai berikut.

Tabel 2.2
Data Bank dan ATM di Wilayah Polsekta Jatiuwung

1.	Bank Maspion	Jl. Gatot Subroto Rt 01/6 Kroncong. Tlp. 5900250	Karlini	Bank & ATM
2.	Bank NISP	Jl. Gatot Subroto Km 6 Ruko Sastra Plaza Kroncong	Bambang	Bank & ATM
3.	Bank Ganesha	Jl. Gatot Subroto Km 6 Ruko Sastra Plaza Kroncong	Syamsul Salim	Bank & ATM.
4.	BNI 46	Pt. Mitsuba Jl. Siliwangi Rt 01/04 Kroncong	=	ATM
5.	Bank Hana	Jl. Siliwangi Km 1 Pt. Panca Prima Alam Jaya	Joko	Bank
6.	BRI	Jl. Siliwangi Km 5 Kp. Doyong Alam Jaya	Agus	Bank
7.	Bank Lippo	Duta Mas Plaza A 36 Rt 07/10 Sangiang Jaya. Tlp. 5528486	Lina	Bank & ATM
8.	Bank BCA	Duta Mas Plaza A 23 Sangiang Jaya Tlp. 5527380.	Agus	Bank & ATM
9.	Bank Danamon	Duta Mas Plaza A 16 Sangiang Jaya Tlp. 5528477/08158090015	Hermawan	Bank & ATM
10.	BPR Pt. Magga Utama Jaya	Ruko Duta Mas Plaza A/36 Kel. Sangiang Jaya Tlp. 5528088	Heng dwi wijaya	BPR
11.	Bank BRI	Jl. Gatot Subroto Rt 01/01 Sangiang Jaya Tlp. 593055	Epen Supena	Bank & ATM
12.	Bank Lippo	Ruko Gajah Mada no. 2056	Maimun	Bank & ATM

		Kel.Panunggan Barat Tlp.5577786/87		
13.	Bank Mandiri	Ruko Pinangsia A/39 Pan- Barat Tlp.5516058 / 5515745	Evy istiani	Bank & ATM
14.	Bank BNI 46	Ruko pinangsia L/1 Pan-Barat Tlp.5512501	Yusniati Mundu	Bank & ATM
15.	Bank NISP	Ruko Pinangsia Blok I/36 Pan-Barat Tlp. 553376- 69	Hendra.Bs.	Bank
16.	Bank China Trust Indonesia	Ruko Pinangsia Blok M/19 Pan-Barat.Tlp. 55764558	Helen Widiawati	Bank
17.	Bank Lippo	Ruko Pinangsia Blok B/1 Pan- Barat.Tlp. 5533330-1	Elly	Bank & ATM
18.	Bank woori Indonesia	Ruko pinangsia blok H No 1 pan bar telp 55772345	Edwin sulaeman	Bank
19.	Bank Hana	Rulo Pinangsia Blok A No 3 Panbar telp 55770357	Aller laurentius Marpaung	Bank
20.	Bank BRI	Kp.Jati Indigrosir Kel.Jatiuwung	=	ATM
21.	Bank Danamon	Kp.jati Indogrosir Kel.jatiuwung	=	ATM
22.	Bank Ragam Dana kencana (BPR)	Kp.jati Indogrosir kel.jatiuwung	=	ATM
23.	Bank BRI	Kp.jati Indogrosir kel.Jatiuwung	=	ATM
24.	Bankl BCA	Kp.jati Sabar Subur kel.jatiuwung	=	ATM
25.	Bank NISP	Jl.Cendrawasih 1-2 Cibodasari Tlp. 5517849-51	Yos	Bank & ATM
26.	Bank BRI	Jl.Cemara Raya 63	Dedy	Bank

		Cibodasari Tlp. 5588536		
27.	Bank Danamon	Jl. Karet Raya 30 Cibodasari Tlp. 557652218	Sherly	Bank & ATM
28.	Bank Ragam Dana kencana (BPR)	Jl.Cemara Raya 34 Cibodasari Tlp. 5525893	Yusni	Bank
29.	Bank BRI	Jl.Gatot Subroto Km 7 Kel. Jatake Tlp	Edy	Bank
30.	Bankl BCA	Jl. Gatot Subroto Km 7,5 Aneka Subur Kel.Jatake.Tlp.5930786-87	RIA.S.	Bank & ATM
31.	Bank NISP	Jl. Gajah Tunggal Pt. Hasi Kel. pasir Jaya Tlp. 5908486	Sendi	Bank & ATM
32.	Bank BNI 46	Jl.Gajah Tunggal Pt. Gajah Tunggal Kel.pasir Jaya Tlp. 5900480	Meriana	Bank & ATM
33.	Bank Lippo	Jl.Gatot Subroto Km 7,5 Aneka Subur Jatake.	=	ARM
34.	Bank mandiri	Toserba Tip Top Jl. Gatot Subroto Km 4 Kel. uwung Jaya.	=	ATM
35.	Pt. BPR Bank Artadamas Mandiri	Jl.Karet Raya 79 Kel. Cibodasari Tlp. 5565597	Yuliati	BPR
36.	Pt. BPR Ragam Dana Kencana	Jl.Cemara Raya 34 Kel.Cibodasari Tlp. 5525893	Mitarini	BPR
37.	Pt.BPR Indomitra Adil Jaya	Jl.Karet Raya Blok 21/2 Kel Cibodasari Tlp. 55653719	Yulianti	BPR
38.	Pt. BPR Bank Niaga mandiri	Malabar Permai C 14-16 Jl.Karet Raya Kel.Cibodasari Tlp. 55656894 s/d 96	Drs.Maju Lumban Toruan	BPR
39.	Pt. BPR Universal	Jl. Borobudur Raya Blok C 2	Posma	BPR

	Karya Mandiri	Kel. Cibodas Baru Tlp. 5914033	Rohana Panjaitan	
40.	Bank BNI 46	Toserba Tip Top Jl. Gatot Subroto Km 3,5 Uwung Jaya	=	ATM
41.	Bank Muamalat	Ruko Pinangsia Centrum no. 5 Panunggangan Barat. Tlp. 5585243	Siti Aisyah Siregar	Bank
42.	Bank Danamont	Kp. jati Indogrosir Jl. Gatot Subroto	=	ATM
44.	Bank BRI	Jl. Siliwangi Km 2 Kp. Doyong Kel. Alam Jaya, Kec. Jaya	Pambudi	Bank
45.	Bank BCA	Jl. Gatot Subroto Kp. 3,5 Tip Top	=	ATM
46.	Bank BCA	Jl. Gatot Subroto Km 5,5 Sabar Subur	=	ATM
47.	Bank NISP	Toserba Tiptop Jl. Gatot Subroto Km 4 Kel. Uwung Jaya.	=	ATM
48.	Bank BCA	Pt. Indah Jaya Jl. Pajajaran Kp. Dumpit, Kel. Gandasari.	=	ATM
49.	Bank Danamont	Jl. Gatot Subroto Km 5 Indogrosir Kp. Jati Kel. Jatiuwung	=	ATM
50.	Bank Lippo	Tip Top Jl. Gatot Subroto Km 3,5 Jatiuwung.	=	ATM
51.	Bank BCA	Ruko Pinangsia Blok I Pan- Barat	=	ATM
52.	Bank Panin	Ruko Pinangsia Blok I no. Pan Barat	Amir	Bank

Sumber: Intel Dasar Polsekta Jatiuwung 2010

Sedangkan bagi daerah perdagangan, terutama untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari warganya terdapat pasar tradisional. Pasar tradisional itu terdiri dari:

1. Pasar Kroncong di Perum Kroncong.
2. Pasar Manis Jaya di Perum Pasific Manis Jaya.
3. Pasar Jati Baru di Jl. Kiansantang Sangiang Jaya.
4. Pasar Gebang di Jl. Kiansantang Kel Sangiang Jaya.
5. Pasar Taman Cibodas di Perum Taman Cibodas Sangiang Jaya.
6. Pasar Cibodas di Jl. Empu Gandring Kel. Cibodas.
7. Pasar Prambanan Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas baru.
8. Pasar Malabar Jl. Karet Raya Kel. Cibodasari.
9. Pasar Bayem Jl. Bayem kel. Cibodasari.
10. Pasar Regency Jl. Regency Raya Kel. Gebang Raya.

Selain pasar tradisional itu, terdapat 46 pasar modern, diantaranya: Alfamart, Indomart, dan mini market lainnya.

Kemudian, di wilayah ini terdapat beberapa objek vital yang mendukung perekonomian maupun menimbulkan kerawanan sosial yang memerlukan kehadiran polisi. Yaitu : STO Telkom Jalan Pajajaran Kel. Gandasari, Gardu PLN Kp. Dumpit Rt 02/07 Kel. Gandasa, Gardu PLN Maximangando Jalan Palem Manis Raya Gandasari, Gudang Air PDAM Jalan Perak Kel. Cibodas Baru, Gudang Farmasi Jalan Bangor Raya no.8 Kel. Cibodasari, Gardu PLN Swasta Jalan Arya kemuning periuk Jaya, Gudang PDAM Jalan Betet Raya no. 1 Kel. Pan-Barat, Plaza Telkom, Ruko sastra Plaza Kel. Kroncong, kec. Jatiuwung, dan Kantor dan Pelayanan PDAM, Jl. Prambanan Raya Rt 08/09 no. 4 Kel. Cibodas Baru.

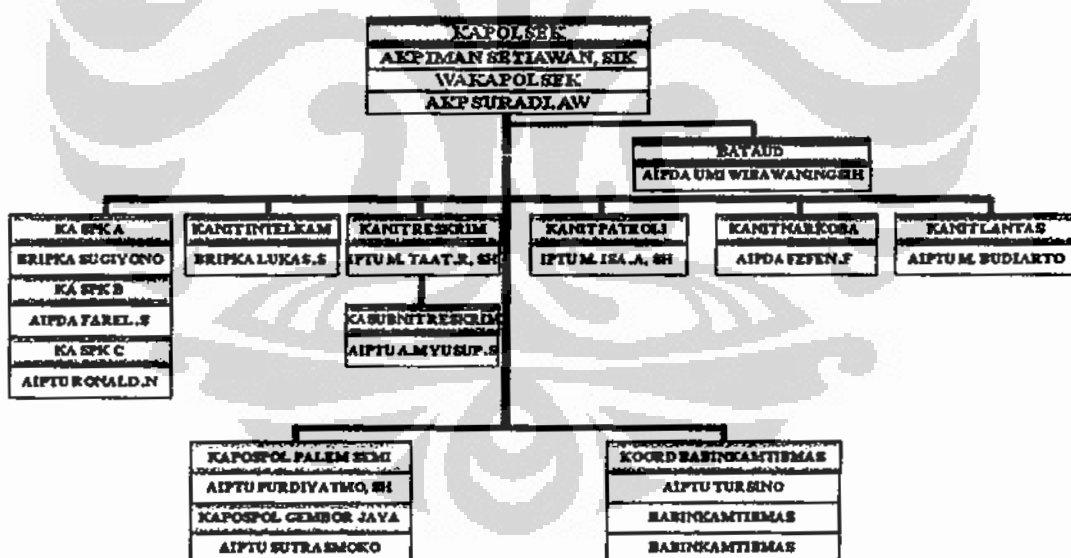
Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya mobilitas warga masyarakat serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor (Roda2 dan 4). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor itu, sejalan dengan kebutuhan sarana jalan yang memadai. Jalan Gatot Subroto merupakan jalan protokol yang menjadi urat nadi perekonomian yang sangat penting bagi ketiga kecamatan itu, sehingga banyak kendaraan yang melintasi jalan ini, akibatnya sering terjadi: 1) kemacetan lalu lintas yang mengundang terjadinya tindak kejahatan seperti : penodongan, pencurian kendaraan bermotor, perampasan dan pencopetan; dan 2) kecelakaan lalu lintas (yang mengakibatkan korban jiwa dan

harta benda). Kedua hal itu menjadi sumber kerawanan sosial di masyarakat Polsekta Jatiuwung. Selain itu yang berpotensi mengundang timbulnya tindak kriminalitas adalah banyaknya pusat perdagangan atau pusat perbelanjaan seperti pertokoan sepanjang Jl. Gatot Subroto dan Jl. Imam Bonjol.

2.3 Organisasi Polsekta Jatiuwung

Polsek Kota Jatiuwung, kemudian disingkat Polsekta Jatiuwung bertugas dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta) dibantu oleh seorang Wakapolsekta dan para staf yang terdiri dari Para Kepala Unit (Kanit), Bintara Tata Usaha Dalam (Ba Taud), Para Ka SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), Babinkamtibmas, dan para Kepala Pos Polisi (Kapospol) yang berjumlah 2. Pospol yaitu : Pos Polisi Gembor dan Pos Polisi Palembang.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Polsek Kota Jatiuwung



Sumber : Data Polsekta Jatiuwung 2010.

Kapolsek Kota Jatiuwung bertugas: 1) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres Kota Kota Tangerang khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 2) menyusun rencana dan program kegiatan Polsek Kota Jatiuwung serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna; memimpin Polsek Kota Jatiuwung, sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian yang

berada di wilayahnya; 3) membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polsek Kota Jatiuwung; melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek Kota Jatiuwung; 4) mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian serta penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam wilayahnya sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawabnya; dan 5) atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya maka Kapolsek Kota Jatiuwung bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Kota Tangerang.

Wakapolsek Kota Jatiuwung bertugas: 1) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolsek Kota Jatiuwung khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 2) mengkoordinasikan dan mengendalikan semua pekerjaan atau kegiatan staf dan organisasi di lingkungan Polsek Kota Jatiuwung termasuk penyusunan rencana dan program kegiatan Polsek Kota Jatiuwung; 3) memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum di lingkungan Polsek Kota Jatiuwung; 4) mengkoordinasikan, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional; dan 5) melaksanakan tugas khusus yang dibebankan Kapolsek Kota jatiuwung; dan 6) mewakili Kapolsek Kota Jatiuwung apabila Kapolsek berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya Wakapolsek bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolsek Kota Jatiuwung.

Unit Reserse Kriminal Polsek Kota Jatiuwung bertugas: 1) menyelenggarakan upaya represif kepolisian yang meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara dalam rangka proses peradilan pidana; 2) melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan; 3) melaksanakan fungsi identifikasi khususnya pengambilan sidik jari dan pemotretan pemohon surat keterangan, dan orang-orang yang tersangkut tindak pidana serta pengambilan sidik jari dan pemotretan di tempat kejadian; 4) membantu pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas PPNS; melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan.

Unit Lantas Polsek Kota Jatiuwung bertugas: 1) menyelenggarakan upaya preventif kepolisian yang meliputi penjagaan, pengawalan dan pengaturan serta

tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP); 2) membantu pelaksanaan fungsi lalu lintas; 3) melaksanakan kegiatan administrasi operasional.

Unit Bimbingan Masyarakat Polsek Kota Jatiuwung bertugas melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat dalam rangka pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Polsekta Jatiuwung. Pelaksanaan tugas Unit Bimmas Polsek ditetapkan sebagai berikut: 1) melakukan kegiatan sambang Kelurahan; 2) memberikan ceramah, penerangan dan penyuluhan; 3) mengadakan tatap muka dan kerjasama dengan tokoh tokoh masyarakat; 4) melaksanakan segala upaya untuk mengintensifkan pelaksanaan pengamanan lingkungan oleh masyarakat itu sendiri; 5) membina dan membimbing remaja, pemuda dan pelajar serta wanita, terutama dalam rangka mencegah dan menaggulangi kenakalan remaja serta mengarahkannya bagi kegiatan positif khususnya dalam membantu tugas Polri; 6) membantu pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap alat kepolisian khusus (Polsus).

Unit Patroli sebagai salah satu fungsi operasioanal Polsek Kota Jatiuwung bertugas : (a) mencegah bertemunya faktor Niat dan Kesempatan, (b) memelihara dan meningkatkan ketertiban masyarakat dan menjamin ketertiban umum masyarakat, (c) memelihara keselamatan orang, harta benda masyarakat serta memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, (d) memberi pelayanan kepada masyarakat, (e) melakukan TPTKP dengan memberi perlindungan, (f) bertugas mencatat, mengumpulkan data data/kejadian/ informasi yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta melaporkan kepada atasan

Unit Intelkam sebagai salah satu fungsi operasional Polsek Kota Jatiuwung bertugas melaksanakan kegiatan penyidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran-sasaran kegiatan yang ada. Fungsi penyidikan dan hasilnya dituangkan dalam laporan informasi yang dibutuhkan oleh satuan fungsi yang lainnya. Seedangkan kegiatan penggalangan yaitu penciptaan situasi yang tertentu kepada situasi yang diinginkan dengan pola pembinaan masyarakat.

Unit Narkoba menyelenggarakan dan melaksanakan unit obat dan Baya yang meliputi: 1) melakukan penyelidikan untuk menemukan tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan-bahan kimia yang menyimpang dari peraturan; 2) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan scientific crime

investigation (kejahatan meracik dan menyimpan) dibidang obat-obatan kimia, minuman obat tradisional, kosmetika yang menggunakan bahan-bahan kimia, yang menyimpang dari peraturan-peraturan dan mengajukan berkas perkara kepada penuntut umum; 3) melakukan analisa kriminalitas terutama modus operandi guna mengungkap jaringan peredaran bahan-bahan berbahaya yang menyimpang dari peraturan/ ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pihak swasta lainnya seperti : Departemen Perdagangan dan perindustrian, Bapedal, Depkes, Badan POM, Imigrasi, Farmasi, Puslabfor Polri, Lab Sukopindo.

Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Kota Jatiuwung bertugas melaksanakan fungsi: 1) penyuluhan hukum kepada masyarakat; 2) penerangan masyarakat pembinaan; 3) upaya peningkatan Siskamling; kegiatan SPK dimaksud dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi ditandai oleh; 4) masyarakat mampu mengamankan barang-barang berharga masing-masing dan tidak menyimpan barang berharga sembarangan ; dan 5) tumbuh partisipasi masyarakat untuk membantu memberikan keterangan kepada masyarakat.

Pos Kepolisian (Pospol) Polsek Kota Jatiuwung bertugas: memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menerima laporan atau pengaduan serta tindakan pertama di tempat kejadian. Pospol dipimpin oleh Kepala Kepolisian, yang disingkat Kapospol, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolsek Kota Jatiuwung. Pospol di wilayah Polsek Kota Jatiuwung berjumlah 2 buah, yang keberadaannya adalah : (1) Pos Pol Gembor berada di Kelurahan Gembor, (2) Pos Pol Palem Semi berada di Kelurahan Palem Semi.

Melalui pertelaahan tugas itu, diharapkan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat mengambil langkah langkah penanggulangan secara dini dan mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan di wilayahnya. Sedangkan tugas pokok Polsekta Jatiuwung sebagai ujung tombak pelaksana tugas kepolisian dijabarkan sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan fungsi Reserse Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi.
2. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.
3. Melaksanakan fungsi identifikasi.
4. Membantu pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Menyelenggarakan fungsi Kesamaptaan Kepolisian dengan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan penyimpangan norma sosial lainnya melalui upaya pemeliharaan keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.
6. Menyelenggarakan fungsi Bimbingan Masyarakat dengan melaksanakan Bimbingan Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat dan terwujudnya kondisi Astagatra yang memperkecil terjadinya faktor kriminogen, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
7. Melaksanakan fungsi Intelkam melalui upaya deteksi, pengumpulan bahan-bahan keterangan terutama untuk kepentingan intelejen dasar, pemberian surat ijin/keterangan/ rekomendasi serta pengamanan kedalam tubuh Polsek Kota.
8. Melaksanakan Operasi Khusus Kepolisian yang diperintahkan kepadanya.
9. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun operasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok itu, Polsekta Jatiuwung didukung oleh 98 orang personil. Adapun perincian jumlah personil Polsek Kota Jatiuwung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Data Jumlah Personil Polsek Kota Jatiuwung

1	Kapolsek	1
2	Waka Polsek	1
3	Unit Reskrim	16
4	Unit Patroli	31
5	Unit Intelkam	7
6	Unit Lantas	9
7	Unit Narkoba	3
8	Binamas	9
9	Pospol	6
10	Taud	4
11	SPK	4

Sumber : Data Polsekta Jatiuwung

Sementara itu hubungan tata cara kerja dalam struktur organisasi Polsek Kota Jatiuwung mencerminkan hubungan kerja Polsek Kota Jatiuwung yang meliputi : (a) Hubungan kerja antar atasan dengan bawahan, (b) Hubungan kerja antar sesama anggota dalam menjalankan tugas, (c) Hubungan kerja antar Polsek dengan instansi terkait. Hubungan tata cara kerja di Polsekta Jatiuwung diterapkan sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja antar atasan dengan bawahan dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari tindakan anggota meminta saran kepada atasan untuk melakukan suatu pekerjaan dan tindakan atasan yang memberi petunjuk, perintah dan instruksi kepada bawahan dalam menjalankan suatu tugas

- b. Hubungan kerja antar sesama anggota dalam menjalankan tugas dilakukan baik dengan sesama anggota di dalam unit kerja fungsi teknis kepolisian maupun dengan anggota fungsi teknis kepolisian yang lain.
- c. Hubungan kerja Polsek dengan instansi terkait dilakukan Polsek Kota Jatiuwung dengan melakukan kerjasama pengamanan kawasan tempat-tempat umum seperti pasar dan terminal bersama pihak Kecamatan dan Kelurahan yang ada di wilayah hukum Polsek kota Jatiuwung.

2.4 Karakteristik Kerawanan Daerah

Karakteristik kerawanan daerah wilayah hukum Polsekta Jatiuwung, dibagi berdasarkan faktor korelatif kriminogen (FKK), police hazard (PH), dan ancaman faktual (AF). Untuk memudahkan Polsekta Jatiuwung menyusun FKK, PH, dan AF berdasarkan kelurahan. Adapun uraiannya sebagai berikut.

1. Kelurahan Cibodas :
 - a). Faktor Korelatif Kriminogen :
 - 1). Komplek perumahan
 - 2). Perkampungan
 - 3). Kawasan industri
 - 4). Jalan raya
 - 5). Jalan alternatif
 - b). Police Hazard:
 - 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
 - 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu2 lalulintas, kuli kasar.

c). Ancaman Faktual:

- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan ranmor dan gaji karyawan, perkelaian, pemerasan, aliran sesat.
- 2). Unjuk rasa, pemerasan.
- 3). Kemacetan lalulintas.
- 4). Premanisme.

2. Kelurahan Cibodas Baru

a). Faktor Korelatif Kriminogen :

- 1). Komplek perumahan
- 2). Terminal
- 3). Jl. Borobudur
- 4). Pertokoan

b). Police Hazard :

- 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai.
- 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran
- 3). Perkumpulan masa
- 4). Pelajar
- 5). Supir angkut
- 6). Premanisme

c). Ancaman Faktual :

- 1). Pemerasan , curat, curas, curanmor
- 2). Perkelahian , pemerasan , aliran sesat, banjir
- 3). Keributan antar kelompok
- 4). Perampasan ranmor
- 5). Trek- trekkan sepeda motor/ balap liar
- 6). Perkelahian pelajar
- 7). Premanisme

3. Kelurahan Cibodas Sari:

- a). Faktor Korelatif Kriminogen :
 - 1). Komplek perumahan
 - 2). Jalan raya
 - 3). Pasar
 - b). Police Hazard :
 - 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran
 - 3). Padat kendaraan, tidak ada rambu – rambu
 - 4). Pedagang kaki lima
 - c). Ancaman Faktual :
 - 1). Pemerasan, curas, curat, curat, curanmor, narkoba, perkelahian.
 - 2). Pemerasan, aliran sesat, banjir.
 - 3). Kemacetan lalu lintas, perampasan ranmor
 - 4). Keributan antar kelompok
 - 5). Premanisme
4. Kelurahan Jatiuwung :
- a). Faktor Korelatif Kriminogen :
 - 1). Perkampungan
 - 2). Kawasan industri
 - 3). Jalan raya
 - 4). Tempat hiburan
 - 5). Hotel Istana Nelayan
 - b). Police Hazard :
 - 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air kurang.
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
 - 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu – rambu
 - 5). Kuli kasar.
 - c). Ancaman Faktual :

- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, perjudian, pelanggaran, sosial lainnya.
- 2). Perkelahian , pemerasan, aliran sesat.
- 3). Unjuk raya, pemersan
- 4). Kemacetan lalu lintas, perampasan ranmor
- 5). Trek – trekan / balap liar
- 6). Premanisme

5. Kelurahan Panunggangan Barat:

a). Faktor Korelatif Kriminogen :

- 1). Kompek perumahan
- 2). Perkampungan
- 3). Perumahan Palembang Semi
- 4). Tempat hiburan dan restoran asing

b). Police Hazard :

- 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
- 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran
- 3). Gaji tidak standar, tidak dasar hukum
- 4). Warga negara asing
- 5). Kuli kasar

c). Ancaman Faktual :

- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba
- 2). Perkelahian, pemerasan, aliran sesat
- 3). Unjuk rasa, pemerasan, banjir
- 4). Kemacetan lalu lintas, perampasan ranmor
- 5). Pelanggaran asusila, dan keimigrasian
- 6). Premanisme
- 7). Trek-trekan sepeda motor

6. Kelurahan Uwung Jaya :

a). Faktor Korelatif Kriminogen :

- 1). Komplek perumahan

- 2). Perkampungan
 - 3). Kawasan industri
 - 4). Jalan raya
 - 5). Jalan alternatif
- b). Police Hazard :
- 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatny, saluran air tidak memadai.
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran
 - 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum
 - 4). Padat kendaraan , tidak ada rambu – rambu
 - 5). Kuli kasar
- c). Ancaman Faktual :
- 1). Pemerasan curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan, ranmor dan gaji karyawan, perkalaian , pemasaran, aliran sesat
 - 2). Unjuk rasa , pemerasan
 - 3). Kemacetan lalu lintas
 - 4). Premanisme
7. Kelurahan Alam Jaya
- a). Faktor Korelatif Kriminogen :
- 1). Komplek perumahan
 - 2). Perkampungan
 - 3). Kawasan industri
- b). Police Hazard :
- 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatny, saluran air tidak memadai.
 - 2). Pemuda putus sekolah pengangguran
 - 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum
 - 4). Komplek perumahan
 - 5). Perkampungan
 - 6). Kawasan industri

- 7). Jalan raya
- 8). Jalan alternatif
- c). Ancaman Faktual :
 - 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba
 - 2). Perkelahian, pemerasan, aliran sesat
 - 3). Unjuk rasa, pemerasan, banjir
 - 4). Kemacetan lalu lintas, perampasan ranmor
 - 5). Pelanggaran asusila, dan keimigrasian
 - 6). Premanisme
8. Kelurahan Gandasari :
 - a). Faktor Korelatif Kriminogen :
 - 1). Komplek TNI 203
 - 2). Perkampungan
 - 3). Kawasan industri
 - 4). Jalan raya padjajaran
 - 5). Jalan alternatif
 - b). Police Hazard :
 - 1). Kumpulan anak-anak anggota TNI, kurang pengawasan Kedalam.
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
 - 3). Gaji tidak sesuai standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan , tidak ada rambu – rambu.
 - 5). Kuli kasar.
 - c). Ancaman Faktual :
 - 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, perjudian, pelanggaran, sosial lainnya.
 - 2). Perkelahian, pemerasan, aliran sesat.
 - 3). Unjuk raya, pemersan.
 - 4). Kemacetan lalu lintas, perampasan Ranmor
 - 5). Trek–trekan / balap liar.
 - 6). Premanisme.
9. Kelurahan Keroncong :

a). Faktor Korelatif Kriminogen :

- 1). Komplek perumahan.
- 2). Perkampungan.
- 3). Kawasan industri.
- 4). Jalan raya Gatot Subroto, dan Jl. Siliwangi
- 5). Jalan alternatif

b). Police Hazard :

- 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
- 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
- 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
- 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu2 lalu lintas, kuli kasar.

c). Ancaman Faktual :

- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan ranmor dan gaji karyawan, perkelaian, pemerasan, aliran sesat.
- 2). Unjuk rasa, pemerasan.
- 3). Kemacetan lalu lintas.
- 4). Premanisme.

10. Kelurahan Jatake :

a). Faktor Korelatif Kriminogen :

- 1). Komplek perumahan
- 2). Perkampungan
- 3). Kawasan industri
- 4). Jalan raya
- 5). Jalan alternatif

b). Police Hazard :

- 1). Tempat nongkrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
- 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.

- 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu-rambu lalulintas, kuli kasar.
- c). Ancaman Faktual :
- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan ranmor dan gaji karyawan, perkelaian, pemerasan.
 - 2). Unjuk rasa, pemerasan, perampasan uang gaji
 - 3). Kemacetan lalulintas, laka lantas
 - 4). Premanisme.

11. Kelurahan Manis Jaya :

- a). Faktor Korelatif Kriminogen :
- 1). Komplek perumahan
 - 2). Perkampungan
 - 3). Kawasan industri
- b). Police Hazard :
- 1). Tempat nokrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
 - 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu-rambu lalulintas, kuli kasar.
- c). Ancaman Faktual :
- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan ranmor dan gaji karyawan, perkelaian, pemerasan.
 - 2). Unjuk rasa, pemerasan, perampasan uang gaji
 - 3). Kemacetan lalulintas, laka lantas
 - 4). Premanisme.

12. Kelurahan Pasir Jaya :

- a). Faktor Korelatif Kriminogen :
- 1). Komplek perumahan
 - 2). Perkampungan

- 3). Kawasan industri
 - 4). Jalan raya siliwangi
- b). Police Hazard :
- 1). Tempat nokrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
 - 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu2 lalulintas, kuli kasar.
- c). Ancaman Faktual :
- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan ranmor dan gaji karyawan, perkelaian, pemerasan.
 - 2). Unjuk rasa, pemerasan, perampasan uang gaji
 - 3). Kemacetan lalulintas, laka lantas
 - 4). Premanisme.

13. Kelurahan Gebang Raya :

- a). Faktor Korelatif Kriminogen :
- 1). Komplek perumahan
 - 2). Perkampungan
 - 3). Jalan raya
- b). Police Hazard :
- 1). Tempat nokrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran
 - 3). Padat kendaraan, tidak ada rambu-rambu lalulintas, kuli kasar.
- c). Ancaman Faktual :
- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan Ranmor dan, perkelahian, pemerasan, perjudian.
 - 2). Perkelahian, pemerasan, aliran sesat , banjir.
 - 3). Kemacetan lalu lintas, laka lantas,
 - 4). Perampasan gaji karyawan

14. Kelurahan Gembor :**a). Faktor Korelatif Kriminogen :**

- 1). Komplek perumahan
- 2). Perkampungan
- 3). Kawasan industri
- 4). Jalan raya

b). Police Hazard :

- 1). Tempat nokrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai
- 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
- 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
- 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu-rambu lalulintas, kuli kasar.

c). Ancaman Faktual :

- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, perampasan gaji karyawan, perkelaian, pemerasan.
- 2). Perkelahian, pemerasan, aliran sesat.
- 3). Unjuk rasa, pemerasan.
- 4). Kemacetan lalu lintas, dan perampasan ranmor

15. Kelurahan Periuk**a). Faktor Korelatif Kriminogen :**

- 1). Komplek perumahan dan cekungan daratan
- 2). Perkampungan
- 3). Kawasan industri
- 4). Jalan raya
- 5). Jalan alternatif
- 6). Parkiran angkot

b). Police Hazard :

- 1). Tempat nokrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai, tempat berkumpulnya air.
- 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.

- 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu-rambu lalulintas, kuli kasar.
- c). Ancaman Faktual :
- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, aliran sesat, perkelaian, pemerasan.
 - 2). Unjuk rasa,
 - 3). Perampasan ranmor
 - 4). Perjudian
 - 5). Premanisme

16. Kelurahan Periuk Jaya

- a). Faktor Korelatif Kriminogen :
- 1). Komplek perumahan dan cekungan daratan
 - 2). Perkampungan
 - 3). Kawasan industri
 - 4). Jalan raya
 - 5). Jalan alternatif
- b). Police Hazard :
- 1). Tempat nokrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai, tempat berkumpulnya air.
 - 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
 - 3). Gaji tidak standar, tidak sadar hukum.
 - 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu-rambu lalulintas, kuli kasar.
- c). Ancaman Faktual :
- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, aliran sesat, perkelaian, pemerasan.
 - 2). Unjuk rasa.
 - 3). Perampasan ranmor
 - 4). Perjudian
 - 5). Premanisme
 - 6). Trek-trekan sepeda motor.

17. Kelurahan Sangiang Jaya

a). Faktor Korelatif Kriminogen :

- 1). Komplek perumahan
- 2). Perkampungan
- 3). Pertokoan
- 4). Jl. Raya Gatot Subroto, dan jalan alternatif.

b). Police Hazard :

- 1). Tempat nokrong, rumah kosong, parkir tidak pada tempatnya, saluran air tidak memadai.
- 2). Pemuda putus sekolah, pengangguran.
- 3). Tidak sadar hukum.
- 4). Padat kendaraan, tidak ada rambu-rambu lalulintas, kuli kasar.
- 5). Perkumpulan massa

c). Ancaman Faktual :

- 1). Pemerasan, curat, curas, curanmor, narkoba, banjir, aliran sesat, perkelaian, pemerasan.
- 2). Perkelahian antar kelompok
- 3). Kemacetan lalulintas, laka lantas
- 4). Premanisme
- 5). Trek – trek sepeda motor.

Beberapa kawasan berpotensi rawan konflik yang dapat terwujud sebagai pertentangan verbal dan pertentangan fisik . Daerah rawan konflik di wilayah hukum Polsekta Jatiuwung adalah sebagai berikut :

a. Konflik ekonomi

1. Kawasan pemukiman warga suku Madura, Kelurahan Cibodasari
2. Jl. Cibodas Baru, Kelurahan Cibodas baru
3. Mutiara Pluit ,Kelurahan Periuk
4. Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Panunggangan Barat.

- b. **Konflik politik**
1. Kelurahan Cibodasari
 2. Kelurahan Panunggan barat
 3. Kelurahan Manis Jaya
 4. Kelurahan Keroncong
- c. **Konflik agama**
1. Jl. Prambanan, Kelurahan Cibodas baru
 2. Ruko Gajah Mada, Kelurahan Panunggan Barat
 3. Perum Taman Elang, Kelurahan Periuk
 4. Kp. Pabuaran, Kelurahan Manis Jaya
- d. **Konflik warga antar kampung**
1. Pasifik, Kel Jatake
Kp. Manis dengan Kp Jatake
 2. Duta Mas Plaza, Kelurahan Sangiang Jaya
Kp. Uwung Jaya dengan Kp.Ssangiang
 3. Kelurahan sangiang Jaya
Kp. Sangiang Jaya dengan Kp Gebang
 4. Kelurahan Manis Jaya
Kp. Pabuaran dengan Kp Kadu
- a. **Konflik Antar Suku**
1. Kp. Cikoneng Kelurahan Jatake
Warga pendatang dari Bima dengan warga pribumi
 2. Kp. Periuk , Kel periuk
Warga pendatang dari Lampung dengan warga pribumi
 3. Kp. Jati, Kel Jatiuwung
Warga pendatang dari Bima dengan Warga pribumi
 4. Pasar Malabar, Kelurahan Cibodasri
Warga pendatang dari Madura dengan Warga pribumi.

BAB 3

PELAKSANAAN PATROLI POLSEKTA JATIUWUNG DAN PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEJAHATAN

Pelaksanaan patroli dan pemolisian masyarakat untuk menciptakan melalui patroli oleh Polsekta Jatiuwung merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan patroli dalam hal ini adalah sistem pengelolaan atau manajemen patroli untuk mengatur tindakan para petugas kepolisian dalam mencegah terjadi kejahatan. Manajemen patroli Polsekta ini dibagi menjadi dua bagian: 1) manajemen sumberdaya manusia; dan 2) manajemen pelaksanaan patroli sendiri. Manajemen sumber daya manusia terkait pengetahuan dan kemampuan anggota melaksanakan tugas patroli, dan manajemen pelaksanaan patroli terkait pencegahan kejahatan serta pemolisian masyarakat, dan admistasi patroli Polsekta Jatiuwung. Manajemen itu disesuaikan atau memperhatikan situasi dan kondisi serta karakteristik wilayah hukum Polsekta Jatiuwung.

3.1 Unit Patroli Posekta Jatiuwung

Polsekta Jatiuwung memiliki satuan sendiri Unit Patroli. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/49/IV/2004 Unit ini harus didukung oleh kekuatan yang memiliki kualifikasi pengetahuan (*knowlwgde*) dan kemampuan (*skill*) yaitu: 1) tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPKP), 2) Pengaturan-pengaturan lalu lintas dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat, 3) Komunikasi verbal, 4) pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), 5) memproses tindak pidana ringan, (6) melakukan tindak represif tahap awal, dan (7) melakukan patroli di daerah-daerah konflik, serta dilengkapi dengan peralatan dan persenjataan yang disesuaikan dengan cara kegiatan patroli.

Kendati demikian, anggota patroli 1 dan 2 (17 Februari, 2010) mengemukakan “saya berdinasi di Unit Patroli sudah 6 tahun, dan selama ini

hanya bertugas mengandalkan pengalaman, untuk pendidikan kejuruan mengenai Patroli belum pernah dan hampir seluruh petugas patroli belum pernah mendapat pendidikan patroli.” Selain itu mereka juga tidak mempunyai buku panduan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) patroli yang dikeluarkan oleh Polri. Dan yang paling memprihatinkan mereka tidak tau apa sebenarnya konsep dari patroli itu sendiri, mereka tidak pernah diberikan pengetahuan baik oleh lembaga Polri maupun pimpinan (dalam hal ini Kapolsek Jatiuwung dan kanit Patroli), mereka hanya mengetahui patroli merupakan merupakan satu tugas untuk meniadakan kejahatan, dan setelah pelaksanaan patroli harus melaporkan kepada pimpinannya. Sedangkan tata cara melakukan patroli, penanganan TPTKP, pengaturan patroli, pengawalan, nampaknya masih belum sesuai baik dengan Juklak maupun Juknis.

Kemudian kegiatan Patroli, berdasarkan Skep itu dilakukan dengan berbagai cara yaitu : (1) Patroli Jalan kaki, adalah patroli yang dilaksanakan dengan berjalan kaki (2) Patroli Bersepeda, adalah Patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan sepeda (3) Patroli Bermotor, adalah Patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Empat. (4) Patroli Berkuda, adalah Patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan Satwa Kuda (5) Patroli Satwa Anjing, adalah Patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan Satwa Anjing (6) Patroli Perairan adalah Patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan Transportasi Air (7) Patroli Multi Fungsi adalah Patroli yang dilaksanakan oleh Samapta Polri yang mengemban Fungsi Intelejen, Bina Mitra, Reserse dan Lalulintas.

Sedangkan Tujuan kegiatan Unit Patroli, menurut Kapolsek Jatiuwung (15 Februari, 2010): 1) penampakan kesiapan dan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat; 2) pencegahan bertemunya niat dan kesempatan (N+K) yang memungkinkan timbulnya kriminalitas; 3) pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas; 4) pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat; 5) diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas; 6) pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Daerah sasaran kegiatan Unit Patroli adalah daerah dalam kota, luar kota, antar kota, daerah perairan dan daerah konflik. Bentuk sasaran Unit Patroli adalah

Police Hazard yang dapat bersifat permanen seperti : lingkungan pemukiman, pertokoan, perkantoran, pergudangan, daerah industri, tempat hiburan dan proyek-proyek vital, dan Police Hazard yang bersifat sementara seperti : lingkungan tempat pedagang kaki lima, jalan, kegiatan masyarakat yang temporer, lokasi wisata, lokasi olahraga dan lain-lain. Bentuk sasaran kegiatan Unit Patroli berikutnya adalah gangguan kamtibmas yang berupa: 1) tindakan Pertama di tempat kejadian perkara; 2) Penindakan tindak pidana ringan. Bentuk sasaran Unit Patroli yang lainnya adalah lokasi-lokasi pengamanan yaitu, Pos-pos Kamling, Pos-pos Satpam dan Pos-pos Polsus.

Pelaksanaan kegiatan patroli terdiri dari 3 tahapan yaitu : tahap persiapan; tahap pelaksanaan; dan tahap pengakhiran. Dalam tahap persiapan kegiatan yang dilakukan adalah mengecek kerapihan seragam kepolisian dan sikap tampang petugas yang akan melaksanakan patroli, mengecek perlengkapan seperti : senjata api, borgol, tongkat, lampu senter, TKP kit, dan kendaraan patroli, mengecek administrasi seperti (Kartu Tanda Anggota, buku catatan, surat perintah, SIM, STNK, blanko Rengiat patroli, dan blanko Laporan Patroli), serta pemberian arahan oleh pimpinan yang berisi pengarahan tentang route patroli, sasaran patroli, cara bertindak, serta hal-hal khusus yang perlu diatensi. Setelah dilakukan tahap persiapan, tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Secara umum setiap Unit Patroli yang telah berada di lapangan harus melaksanakan tindakan sebagai berikut:

1. Menjelajahi daerah dan route yang telah ditentukan dan melihat kemungkinan adanya kerawanan.
2. Mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan Keamanan Swakarsa (seperti: pos kamling, pos satpam, dan pos keamanan lainnya) untuk koordinasi dan saling tukar menukar informasi.
3. Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat yang bersifat situasional seperti keramaian, pertunjukan, dan kegiatan masyarakat lainnya.
4. Berkomunikasi dengan masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas kepolisian.

5. Memberikan perlindungan dan pengayoman yang diperlukan masyarakat.
6. Mewaspadaai kemungkinan berubahnya *police hazard* menjadi ancaman faktual.
7. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya, seperti, lupa menutup pintu; jemuran masih berada di luar; parkir kendaraan tidak dikunci, dan lain sebagainya.
8. Memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran.
9. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
10. Mengambil tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana ringan.
11. Melakukan tindakan represif tahap awal.
12. Mencatat informasi yang didapat di kawasan patroli dalam buku catatan patroli, baik yang diperoleh dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri oleh petugas.
13. Melaporkan situasi daerah patroli.

Polsekta Jatiuwung melaksanakan Patroli bertujuan menyelenggarakan upaya preventif kepolisian, membantu pelaksanaan fungsi lainnya dan melaksanakan kegiatan administrasi operasional. Menurut Kanit Patroli Polsekta Jatiuwung (16 Februari, 2010) “ pelaksanaan patroli di Polsekta Jatiuwung dengan cara patroli roda 4 dan roda 2.” Namun berdasarkan pengamatan penulis, patroli yang dilaksanakan hanya menggunakan kendaraan roda 4, hal itu berbeda dengan pernyataan Kanit Patroli. Lebih lanjut dijelaskan Kanit Patroli Dalam pelaksanaan tugas ini, Unit Patroli Polsek Kota Jatiuwung didukung oleh 31 orang personil, dibagi atas.

Tabel 3.1
Data Jumlah Personil Unit Patroli

1	Ka Unit	1
2	Staf Patroli	1
3	Anggota Regu 6401	6
4	Anggota Regu 6402	6
5	Anggota Regu 6403	6
6	Anggota Regu 6404	6
7	Anggota Regu 6407	5
	Jumlah	31

Sumber : Unit Patroli Polsekta Jatiwung 2010

Setiap regu dibagi 3 sub regu, setiap unit berjumlah 2 orang. masing masing unit berdinasi selama 1 x 12 jam dari mulai pukul 08.00 sampai dengan 20.00, kemudian dilanjutkan oleh sub regu 2 melaksanakan tugas dari pukul 20.00 sampai dengan 08.00, selanjutnya sub regu 3 melaksanakan patroli mulai pukul 08.00 sampai dengan 20.00. Sedangkan sub regu 1 akan bertindak sebagai cadangan perkuataan Polsekta Jatiwung bersamaan dengan sub regu 3 melakukan patroli roda 2 untuk berdinasi mulai 07.00 sampai dengan 12.00 karena sub regu ini akan mempersiapkan dinas pada malam harinya, dan seterusnya silih berganti.

Sedangkan dukungan sarana patroli, yang dipersiapkan untuk melakukan upaya preventif, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Jumlah dan Kondisi Kendaraan Bermotor

1	Sedan Ford	Baik	1 Unit
2	Sedan Ford	Baik	1 Unit
3	Sedan Ford	Baik	1 Unit
4	Sedan Ford	Baik	1 Unit
5	Sedan Ford	Baik	1 Unit
6	Toyota Kijang	Baik	1 Unit
7	Yamaha RX King	Baik	6 Unit

Sumber: Unit Partoli Polsekta Jatiwung 2010.

Catatan: setiap mobil patroli dilengkapi dengan radio komunikasi, alarm, TOA (speaker), kantung mayat, lampu lalu-lintas (apil), senter, tongkat, handy talkie (HT), dan semua dalam keadaan baik dan terawat. Sedangkan sepeda motor hanya dilengkapi alarm dan dalam keadaan baik dan bisa digunakan.

Akan tetapi walaupun Kanit Patroli mengatakan Unit patroli Polsekta Jatiuwung melaksanakan patroli roda 2, penulis melihat keenam motor Yamaha RX-king yang telah disebutkan di atas sedang diparkir dalam keadaan kotor, karat, berdebu, dan tidak terawat. Nampaknya motor itu tidak pernah digunakan sama sekali, ketika penulis mewancarai salah satu anggota patroli 2 (18 Februari, 2010) menyatakan “motor itu sudah 2 minggu tidak digunakan karena personil patroli dilibatkan untuk penganan mogok kerja perusahaan PT. X yang berada di wilayah hukum Polsekta Jatiuwung.” Hal itu dikuatkan oleh Kanit Patroli (18 Februari, 2010) “memang patroli kendaraan roda 2 untuk saat ini tidak digunakan karena semua personil patroli yang cadangan saya libatkan untk pengamanan mogok kerja di PT.X.”

Sementara itu dalam menjalankan tugas operasionalnya, Unit Patroli menerima uang anggaran. Namun menurut Kanit Patroli (18 Februari 2010) jumlahnya kurang memadai, hal ini mengharuskan pimpinan unit untuk mampu menggalang dukungan masyarakat untuk dapat membantu tugas-tugasnya. Dukungan anggaran patroli dalam waktu 1 bulan sejumlah Rp. 7.920.000 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan dukungan bahan bakar minyak hanya diberikan 2.180 liter selama satu bulan. Maka jumlah kendaraan Roda Empat 6 Unit dan kendaraan Roda Dua 6 Unit, dibandingkan dengan ketersediaan bahan bakar. Satu kendaraan dalam sehari hanya didukung bahan bakar minyak sebanyak 6 liter selama 1 x 24 jam dinas patroli. Kekurangan anggaran ini nampaknya akan mempengaruhi kinerja Unit Patroli dan secara berjenjang dapat mempengaruhi kinerja Polsek Kota Jatiuwung secara keseluruhan.

3.2 Manajemen Pelaksanaan Patroli Polsekta Jatiuwung

Menurut Kapolsekta Jatiuwung (15 Februari, 2010) manajemen yang diterapkan Polsekta Jatiuwung dalam pelaksanaan patroli telah mempedomani dan

sesuai surat keputusan Kapolri No.Pol: Skep/49/IV/2004, sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis patroli.

3.2.1 Perencanaan Patroli

Program kegiatan tahunan patroli merupakan pedoman pelaksanaan patroli bagi Unit Patroli Polsekta Jatiuwung. Namun penulis tidak menemukan program tahunan 2010. Menurut Kapolsekta Jatiuwung ” penyusunan program kegiatan tahunan memang kurang diperhatikan, alasannya program kegiatan tahunan hanya dibuat untuk memenuhi permintaan Polres dalam penyusunan Program Kerja Tahunan.” Sedangkan menurut bintangara tata usaha dan urusan dalam (Bataud) yang bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi korespondensi, dokumentasi termasuk pemeliharaannya dan ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan Polsek Kota Jatiuwung. Menyampaikan (20 Februari, 2010)

.... memang program kegiatan tahunan 2010 tidak disusun. Karena pengalaman tahun tahun sebelumnya dalam pelaksanaan tugas Polsek berjalan dengan apa adanya. Untuk memenuhi permintaan pengiriman program tahunan dari Polres Kota Kota Tangerang kami hanya mencontoh program kegiatan tahun sebelumnya, dengan hanya merubah tahun, sasaran, tugas sementara untuk anggaran pendukung pelaksanaan tugas pihak Polres yang menyusunya.

Kendati demikian program kegiatan tahunan (Progiat) 2010 mempedomani tahun sebelumnya. Dan berkaitan dengan anggaran kegiatannya diperoleh dari anggaran triwulan I tahun 2010 yang diberikan oleh Kapolsek kepada masing-masing fungsi teknis kepolisian setelah menerima dana anggaran dari Polres . sebagaimana dikemukakan oleh Bataud (20 Februari, 2010), berikut ini.

Program kegiatan tahunan merupakan urusan Taud dengan mempedomani arahan-arahan dari kapolsek, lalu tinggal mencontoh program kegiatan tahun sebelumnya, yang jelas setiap pimpinan punya kebijakan sendiri , pedoman kegiatan hanya pedoman diatas kertas dalam program menjalankan Kamtibmas.

Selanjutnya dikemukakan program kegiatan itu harus dijabarkan dengan rencana bulanan, mingguan, dan harian.

Rencana Kegiatan Bulanan Unit Patroli adalah penjabaran dari Rencana Kegiatan Tahunan Polsekta. Dasar penyusunannya adalah karakteristik kerawanan kawasan patroli, kalender Kamtibmas bulanan, daftar kegiatan pemerintah dan daerah serta analisa dan evaluasi prioritas gangguan kamtibmas selama satu bulan, yang disusun oleh Kanit Patroli.

Hal itu dilakukan sebagai penyelenggaraan pelayanan Kamtibmas dengan tujuan mencegah kejahatan di wilayah hukumnya. Menurut Kanit Patroli (17 Februari, 2010) wujud pelaksanaannya dengan mengadakan patroli dengan sistem beat, sistem beat adalah sasaran wilayah yang harus diawasi oleh petugas patroli. Pada beat itu ditentukan titik-titik yang dianggap mempunyai kerawanan gangguan keamanan yang menjadi tujuan petugas patroli, kemudian dikenal dengan istilah *check point*. Seperti kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, kawasan industri, lembaga instansi negara, obyek obyek vital serta titik-titik rawan gangguan Kamtibmas.

Rencana kegiatan bulanan (Rengiat Bulanan) Unit Patroli Polsekta Jatiuwung dari segi pengisian kolom terlihat terprogram cukup baik dan terperinci. Hal tersebut nampak pada terisinya kolom - kolom dalam panel data yang memuat sasaran, kegiatan, lokasi, pelaksana, penanggung jawab dan hasil yang dicapai, kecuali kolom keterangan yang tidak diisi. Kanit Patroli menjelaskan (17 Februari, 2010) tidak diisinya kolom keterangan dalam panel data Rengiat Bulanan Unit Patroli, karena kolom keterangan itu, diisi jika pada kondisi istimewa atau ada atensi dari pimpinan, dan tidak mempengaruhi pada laporan pertanggung jawaban Kanit terhadap kegiatan patroli.

Sedangkan rencana kegiatan mingguan (Rengiat Mingguan) Unit Patroli merupakan penjabaran dari Rengiat Bulanan Polsekta Jatiuwung. Sama halnya dengan Rengiat Bulanan, dasar penyusunan Rengiat Mingguan tersebut adalah karakteristik kerawanan kawasan, kalender Kamtibmas mingguan, daftar kegiatan masyarakat serta analisa dan evaluasi prioritas gangguan Kamtibmas selama satu minggu. Dari bahan dan data itu diputuskan kawasan yang harus menjadi prioritas tugas bagi Unit Patroli untuk melakukan kegiatannya.

Unit Patroli Polsekta Jatiuwung dalam menyusun rencana kegiatan patroli disesuaikan dengan penyelenggaraan upaya mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsekta Jatiuwung yang meliputi patroli di kawasan-kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, kawasan pusat pendidikan, kawasan industri dan kawasan obyek-obyek vital. Penyusunan Rencana Kegiatan Mingguan Unit Patroli didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang nyata dilakukan dan menjadi tugas Unit Patroli seperti penjagaan, pengawalan dan pengaturan keamanan.

Selanjutnya rencana kegiatan harian (Rengiat Harian) Unit Patroli merupakan penjabaran dari Rengiat Mingguan. Rengiat Harian ini sebagai acuan pelaksanaan patroli meliputi karakteristik kerawanan kawasan, kalender Kamtibmas, daftar kegiatan masyarakat dan pemerintah serta analisa dan evaluasi prioritas gangguan Kamtibmas yang harus disusun satu hari sebelum pelaksanaan patroli, setelah laporan gangguan kabtibmas masuk ke SPK. Namun pada kenyataannya rengiat dibuat buakn satu hari sebelumnya, melainkan pada hari itu, ketika petugas patroli sudah turun kewayah masing-masing untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu perencanaan yang dibuat dimulai Rengiat Bulanan sampai Rengiat Harian, hanya perulangan Rengiat sebelumnya, atau dikenal dengan istilah "*copy paste*", kecuali agenda kambtibmas yang sudah terjadwal seperti aksi mogok kerja, unjukrasa dan pengamanan. Nampaknya patroli yang dilakukan selama ini, tidak memiliki perencanaan yang matang untuk mencegah kejahatan dengan melihat dari peta kerawanan daerah dari jumlah loporan atau pengaduan yang masuk di SPK Polsekta jatiuwung.

3.2.2 Surat perintah Patroli

Unit Patroli Polsekta Jatiuwung melaksanakan kegiatan patroli berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kapolsekta Jatiuwung. Surat Perintah Patroli ini di konsep oleh Kanit Patroli dan dibuat oleh staf unit Patroli. Surat itu dibuat dengan pertimbangan pelaksanaan tugas satuan samapta di bidang pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan dan pencegahan terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan peruntukannya untuk melaksanakan tugas patroli baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 sekaligus mencatumkan jalur atau rute patroli yang harus dilaksanakan oleh

petugas patroli yang namanya tercantum di dalam surat perintah itu (catatan lapangan).

Setelah surat itu di konsep dan dibuat, maka kanit patroli akan meminta paraf waka Polsek, selanjutnya surat akan di tanda tangani oleh Kapolsek. Setelah ditandatangani surat akan diberi nomor surat dan diarsipkan oleh taud, serta diserahkan kepada Kanit Patroli untuk didistribusikan kepada petugas sesuai dengan namanya yang tercantum dalam surat perintah patroli. Dan Surat perintah berlaku 1x 12 Jam, artinya apabila surat perintah itu habis masa berlakunya, maka setiap anggota Patroli yang akan melaksanakan tugas patroli baru diharuskan membuat surat perintah patroli lagi. Sebagaimana dikemukakan Kapolsek Jatiuwung (6 Februari, 2010) "setiap pelaksanaan patroli anggota dilengkapi surat perintah patroli, dalam sprin itu sudah jelas menyebutkan tentang pembagian wilayah patroli masing-masing anggota, route, sasaran, dan perintah untuk membuat laporan pelaksanaan patroli."

Namun, pada saat peneliti melakukan wawancara menanyakan kepada salah satu petugas patroli pada 16 Februari 2010, bagaimana bentuk surat perintah patroli? kemudian petugas itu memperlihatkan surat perintah patroli 14 Februari 2010. Hal ini berarti pelaksanaan tugas patroli pada 16 Februari 2010 tidak dilengkapi surat perintah. Hal ini dikuatkan oleh petugas patroli 1 (16 Februari, 2010) "semalam saya lepas piket pak jadi tidak sempat mengajukan surat perintah." Selain itu di dalam surat Patroli nampak diperuntukan bagi patroli roda 2, namun petugas patroli itu melaksanakan patroli roda 4.

3.2.3 Laporan Pelaksanaan Patroli

Menurut Kanit Patroli Polsek Jatiuwung (16 Februari, 2010) setiap petugas patroli diwajibkan mengisi mencatat kegiatannya sebagai laporan patroli 1x12 jam. Laporan patroli ini dibuat dan ditanda tangai oleh petugas patroli sebelum petugas patroli berakhir tugasnya atau lepas dinas, kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Kanit Patroli. Dengan demikian laporan patroli ini berguna sebagai catatan petugas patroli tentang temuannya selama patroli sekaligus sebagai sarana kontrol pelaksanaan kegiatan patroli bagi Kanit Patroli.

Selain itu, menurut Kanit Patroli, setiap petugas patroli mempunyai buku laporan pelaksanaan kegiatan patroli. Buku patroli ini merupakan salinan dari laporan hasil patroli yang ditanda tangani petugas dan di ketehui Kanit Patroli, yang setiap minggu pada hari senin di laporkan kepada Kapolsekta Jatiuwung. Buku itu terdiri berisi tiga bagian: 1) kolom titik-titik *check point* yang sudah ditentukan untuk dipatroli; 2) kolom tanda tangan dan stempel dari orang yang dituju atau tempat yang dituju oleh petugas patroli; dan 3) kolom keterangan temuan-temuan pada saat si petugas melaksanakan patroli.

Pada saat melaksanakan patroli petugas patroli seharusnya mendatangi satu persatu titik-titik *check point* yang sudah ditentukan dalam beat nya. Pada saat petugas bertemu dengan orang yang ada dalam titik *check point* tersebut maka ia meminta tanda tangan dan cap stempel dari orang/ instansi/perusahaan yang didatanginya. Seperti yang disampaikan oleh anggota patroli 3 Polsekta Jatiuwung

Kita dilengkapi buku patroli sebagai bahan laporan. Di dalam buku itu sudah dicetak cek point kita dan wajib ditandatangani dan di cap stempel. Tiap patroli buku itu dibawa. Kalau tidak dicap stempel bisa dapat teguran dari pimpinan.

Kendati demikian, ketika penulis menanyakan bentuk laporan patroli maupun buku itu pada 18 Februari 2010, nampak petugas tidak mengisi laporan kegiatan patroli, alasannya tidak sempat mengisi karena semalam lepas dinas. Padahal ketika diperlihatkan laporan dan buku itu tertera pada 15 Februari 2010. Artinya kontrol yang dilakukan Oleh kanit patroli nampak lemah. Selain itu selama penelitian tidak pernah terlihat Kanit maupun Kapolsek melakukan pengawasan atau kontrol kepada petugas patroli di beatnya masing-masing melainkan sesekali melakukan pengecekan lewat sarana telekomunikasi HT, dengan menanyakan posisi petugas patroli, bagaimana keadaan atau situasi wilayah, dan jika ada perkembangan laporkan situasi.

Sementara itu menurut Wakapolseta Jatiuwung (20 Ferbruari, 2010) petugas patroli bisa manupulasi tanda tangan dan cap stempel orang yang dituju sebagai chek point patroli. Lebih lanjut dijelaskan

Kadang susah mengendalikan anggota. Kita sudah capek-capek memerintahkan supaya patroli dengan mengisi tanda tangan dan cap stempel titik *check point* yang sudah kita tentukan, tetapi ada juga kita temukan anggota yang berbohong dengan mencap dan menandatangani sendiri buku laporan patroli. Beberapa kali kita temukan kejadian seperti itu dan sudah kita tegur. namanya anggota tetap saja ada yang ditemukan mengulangi kembali perbuatannya. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari anggota tersebut.

3.3 Sistem Pelaksanaan Patroli Polsekta Jatiuwung

Kapolsekta Jatiuwung telah membuat perencanaan bagi Unit Patrolinya dengan sistem beat. Artinya patroli menyesuaikan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab anggota patroli serta karakteristik kerawanan daerah wilayah hukum Polsekta Jatiuwung. Menurut Kapolsekta Jatiuwung:

Wilayah hukum Polsekta Jatiuwung terdiri dari 3 Kecamatan yang terbagi ke dalam 17 Kelurahan. Untuk mengcover 17 Kelurahan tersebut maka kita bagi ke dalam 5 beat wilayah patroli. Beat 1 mengcover wilayah Kelurahan Jatake, Manis Jaya, dan Gandasari. Beat 2 mengcover wilayah Kelurahan Pasir Jaya, Alam Jaya, dan Keroncong. Beat 3 mengcover wilayah Kelurahan Jatiuwung, Uwung Jaya, dan Cibodas. Beat 4 mengcover wilayah Kelurahan Cibodas Baru, Cibodas Sari, dan Panunggangan Barat. Beat 5 mengcover wilayah Kelurahan Gembor, Sangiang Jaya, dan Gebang Raya. Beat 6 mengcover wilayah Kelurahan Priuk dan Priuk Jaya.

Pelaksanaan patroli dilakukan dengan cara mengawasi wilayah masing-masing Beat patroli berdasarkan rute patroli yang sudah ditentukan yang selalu berubah secara periodik. Dengan memperhatikan aspek aspek: 1) pada waktu kembali tidak melewati rute berangkat patroli. 2) selama patroli selalu dalam keadaan siap siaga, serta 3) setiap melintas di daerah tertentu (rawan) menentukan tempat-tempat penyelamatan. Dalam setiap Beat patroli ditentukan sebanyak 24 titik yang menjadi *check point* pemberhentian petugas patroli. Di setiap titik *check point* yang sudah ditentukan petugas patroli berhenti dan berkomunikasi sejenak

dengan masyarakat yang dijumpainya. Dalam setiap Beat patroli dibuatkan daftar objek dan proyek vital serta tempat-tempat yang pernah terjadi gangguan kamtibmas. Data gangguan Kamtibmas didapat dari data laporan polisi yang diterima oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian). Hal ini senada dengan pernyataan Kanit Patroli Polsekta Jatiuwung :

Masing-masing Beat patroli sudah dilengkapi buku petunjuk patroli yang berisikan route patroli, *check point* patroli, data objek dan proyek vital yang ada di wilayah tugas patrolinya. Route dan *check point* patroli berubah setiap bulannya. Penentuannya berdasarkan perkembangan situasi gangguan Kamtibmas yang terjadi. Kalau dinilai titik *check point* patroli tersebut sudah aman, maka titik *check point* akan dirubah ke tempat yang lain.”

Adapun pembagian beat patroli dibagi sesuai dengan jumlah petugas patroli, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Beat Patroli

1.	Agung w, sh Sumarno	Bripka Briptu	Ford 6401/ I	Beat I Kel. Gandasari Kel. Manis jaya Kel. Jatake
	Purniawan Eerwin S	Brigadir Briptu	Ford 6401/ II	
	G o w i Apip K	Brigadir Briptu	Ford 6401/ III	
2.	Eko yuli S Bambang Seno	Brigadir Briptu	Ford 6402/ I	Beat II Kel. Cibodasari Kel. Cibodas baru Kel. Pan – bar
	Ferry Efendi Doni P	Bripka Briptu	Ford 6402/ II	
	Sujarwadi	Brigadir	Ford 6402/ III	

	Endang Setiawan	Briptu		
3.	Purwanto Handi Suwardi Galih Dwi Awan Junaedi A. Saihu	Aiptu Briptu Aipda Briptu Aiptu Briptu	Ford 6403/ IV Ford 6403/ II Ford 6403/ I	Beat III Kel. Jatiuwung Kel. Uwuŋ jaya Kel. Cibodas
4.	Sumardi Suroso Aditya Wicaksono Mujiono Deni M	Aipda Aiptu Briptu Bripka Briptu	Ford 6404/ I Ford 6404/ II Ford 6404/ III	Beat IV Kel. Pasir jaya Kel. Keroncong Kel. Alam jaya
5.	Jaja nugraha Suryadi Gustri W Johan Bayu Catur Hadi s	Aiptu Brigadir Briptu Briptu Brigadir	Kijang 6407/ I Kijang 6407/ II Kijang 6407/ III	Beat v Kel. Sangiang jaya Kel. Gebang raya Kel. Gembor Kel. Periuk jaya Kel. Periuk

Sumber: Polsekta Jatiuwung 2010

Sedangkan sistem beat itu, meliputi peta (wilayah) patroli, route, dan *check point* patroli. Beat 1 menggunakan kendaraan sedan ford 6401 dengan wilayah patroli Kelurahan Jatake, Kelurahan Manis Jaya, dan Kelurahan Gandasari. Hal itu dapat terlihat dalam peta patroli sebagai berikut.

Gambar 3.1
Peta Beat 1 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung



Sumber: Polsekta Jatiuwung 2010.

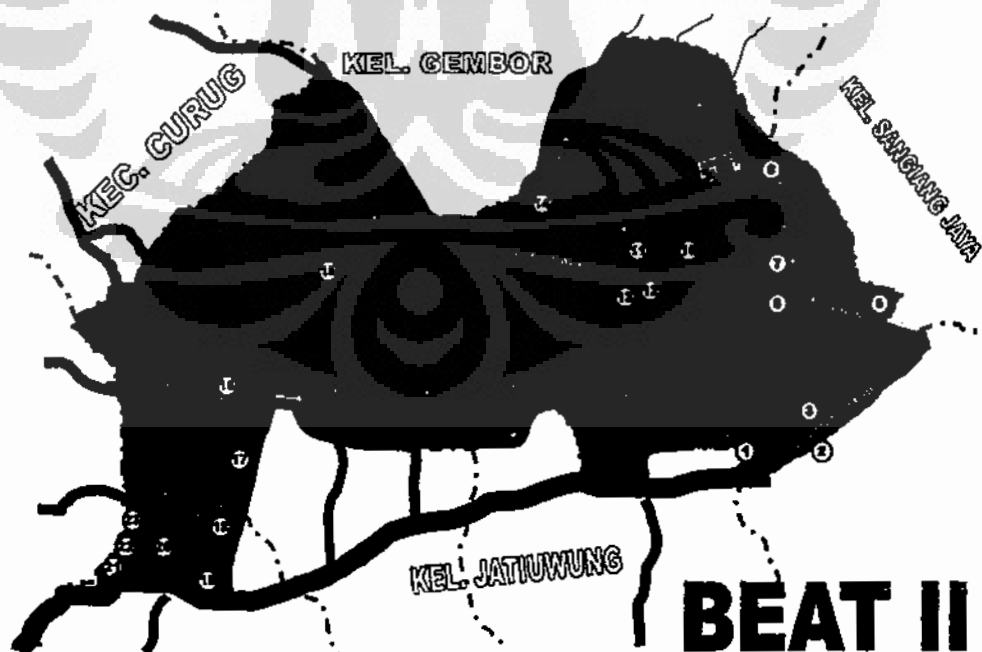
Berdasarkan wilayah patroli itu, route patroli yang harus dilaksanakan regu ini meliputi: Jalan Gatot Subroto–Jalan Pajajaran–Jalem Palem Manis–Jalan Manis Raya–Jalan Industri Jatake – Jalan Gatot Subroto. Sementara itu *Check point* Patroli beat 1 berikut ini.

1. Jemblo Kabel Jalan Pajajaran Kel. Gandasari.
2. Telkom Gandasar Jalan Pajajaran Kel. Gandasari.
3. Essenza Keramik Jalan Palem manis Kel. Gandasari.
4. PLN Gandasari Jalan Pajajaran Kel. Gandasari.
5. PT. Interwood Jalan Palem manis Kel. Gandasari.
6. Bapak Yongki Jalan Palem manis Kel. Gandasari.
7. PT Indah Jaya Jalan Pajajaran Kel. Gandasari.
8. Kantor Kelurahan Gandasari.
9. PT Indo Nanpao Jl. Pajajaran Kel. Gandasari
10. BRI Jatake Kel. Jatake
11. Alfamart Jatake Kel. Jatake.
12. Perum Pacific Kel. Jatake.

13. PT. Arga Fura TC Jl. Manis iii/17 Kel. Manis jaya.
14. PT. Pacific food Jl. Manis iii/6 Kel. Manis jaya.
15. PT. Warna Agung Jl. Manis III/19 Kel. Manis jaya.
16. PT. Tomson Mulia (pabrik TV) Jl. Manis vi Kel. Manis jaya.
17. Kantor Lurah Manis Jaya Kel. Manis Jaya.
18. PT. Sinar Rapi Asri Kel. Manis jaya.
19. PT. Gajah Putih Elastic Jl. Manis II/11 Kel. Manis Jaya.
20. Restoran Sinar Budi Jl. Gatot subroto Kel. Manis Jaya.
21. H. Tablawi Kel. Jatake.
22. H. Marno Kel. Jatake
23. ACA (Asuransi Central Asia)

Beat 2 menggunakan sedan Ford 6402 dengan wilayah patroli Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Alam Jaya, dan Kelurahan Keroncong. Hal itu dapat dilihat dalam peta patroli sebagai berikut.

Gambar 3.2
Peta Beat 2 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung



Sumber : Polsekta Jatiuwung 2010

Dengan route patroli: Jalan Gatot Subroto – Jalan Gajah Tunggal – Jalan Industri VII – Jalan Kasir I – Jalan Prabu Siliwangi – Jalan Kian Santang – Jalan Industri

Keroncong – Jalan Prabu Siliwangi. Sementara itu *chek point* beat ini sebagai berikut.

1. Pom Bensin 203 Jalan Gatot Subroto Kel. Keroncong
2. Bank Maspion Jalan Gatot Subroto
3. Ruko Sastra Plaza Jalan Gatot Subroto Kel. Keroncong
4. Kantor Kel. Keroncong Kel. Keroncong
5. PT. Mitsubha Indonesia Jalan P. Siliwangi Kel. Keroncong
6. PT. Sandrafine Jalan P. Siliwangi Kel. Keroncong
7. PT. Osram Jalan P. Siliwangi Kel. Keroncong
8. PT. Todachi Jalan Industri Keroncong Kel. Keroncong
9. Kantor Kel. Alam Jaya Kel. Alam Jaya
10. PT. Cap Lang Jalan P. Siliwangi Kel. Alam Jaya
11. BRI Doyong Jalan P. Siliwangi Kel. Alam Jaya
12. PT. PAN Brothers Jalan P. Siliwangi Kel. Alam Jaya
13. Indomart Doyong Jalan P. Siliwangi Kel. Alam Jaya
14. Toko Emas Benua (JINSEN) Jalan P. Siliwangi Kel. Alam Jaya
15. BP. Avon Jalan Industri Kel. Pasir Jaya
16. Haji Adang Jalan Industri Kel. Pasir Jaya
17. PT. Porta Jalan Industri Kel. Pasir Jaya
18. PT. Hasi Jalan Gajah Tunggal Kel. Pasir Jaya
19. PT. Gajah Tunggal Jalan Gajah Tunggal Kel. Pasir Jaya
20. PT. Wonel Midas Jalan Kasir I Kel. Pasir Jaya
21. PT. Mayora Jalan Telesonic Kel. Pasir Jaya
22. PT. Mitsuboshi Jalan Industri Raya Kel. Pasir Jaya
23. PT. Sumindo Kabel Jalan Telesonic Kel. Pasir Jaya
24. Kantor Kel. Pasir Jaya Kel. Pasir Jaya.

Beat 3 menggunakan sedan Ford 6403 dengan wilayah patroli Kelurahan Jatiuwung, Kelurahan Uwung Jaya, dan Kelurahan Cibodas. Sebagaimana digambarkan dalam peta patroli di bawah ini.

Gambar 3.3
Peta Beat 3 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung

BEAT III



Sumber : Polsekta Jatiuwung 2010.

Dengan route patroli: Jalan Gatot Subroto – Jalan Dipati Unus – Jalan Prambanan – Jalan Darmawangsa – Jalan Dipati Ukur – Jalan Kali Sabi - Jalan Gatot Subroto. Sementara itu yang menjadi cek pin dalam beat ini sebagai berikut.

1. Sabar – Subur Jl. Gatot Subroto Kel. Jatiuwung
2. Hotel Istana Nelayan Jl. Gatot Subroto Kel. Jatiuwung
3. Pom Bensin Jati Jl. Gatot Subroto Kel. Jatiuwung
4. Kantor Kelurahan Jatiuwung
5. Lucky Keramik
6. Indo Grosir Jl. Gatot Subroto Kel. Jatiuwung
7. Beky Motor Jl. Gatot Subroto Kel. Jatiuwung
8. PT. Damai Abadi Alumunium Jl. Kalisabi Kel. Uwung Jaya
9. PT. Caligo Jaya Abadi Jl. Kalisabi Kel. Uwung Jaya
10. PT. Form Case Ind Mebel Jl. Kalisabi Kel. Uwung Jaya
11. Kantor Kel. Uwung Jaya
12. Tip – Top

13. Pom Bensin Taman
14. PT. Bintang Mesindo (Per Mobil)
15. Ikad Keramik
16. Rumah Sakit Anisa
17. Lautan Ban.
18. PT. Pardic.
19. Indo Taichen.
20. H. Agus.
21. PT. Wihadil
22. Kantor Kel. Cibodas

Beat 4 menggunakan sedan ford 6404 dengan wilayah patroli: Kelurahan Cibodas Baru, Kelurahan Cibodas Sari, dan Kelurahan Panunggangan Barat. Sebagaimana terlihat dapat peta patroli dibawah ini.

Gambar 3.4
Peta Beat 4 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung



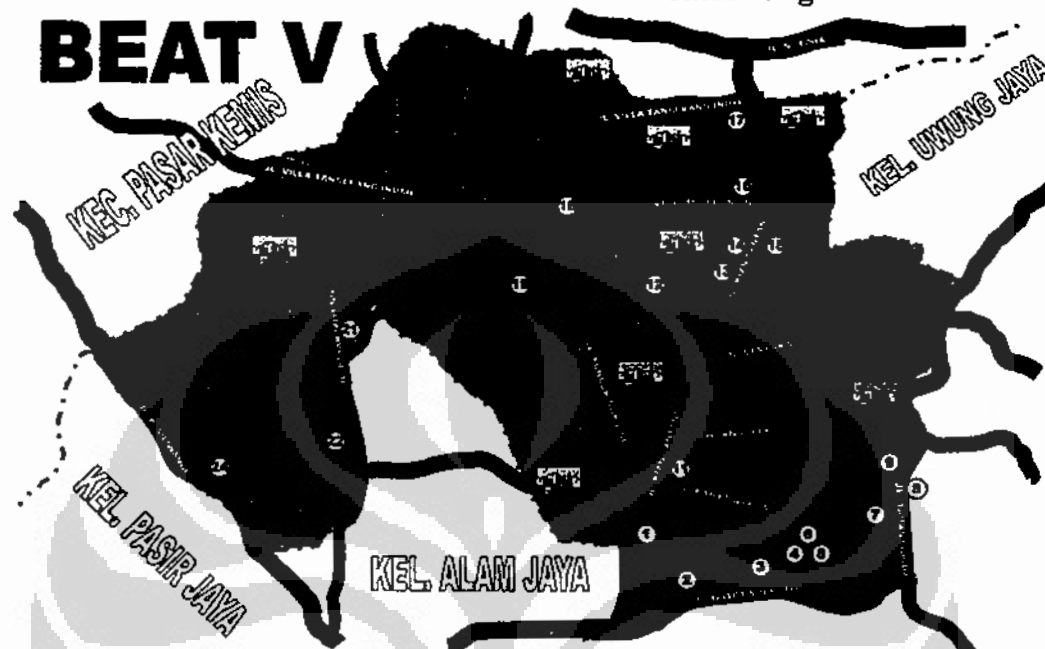
Sumber: Polsekta Jatiuwung 2010.

Dengan route patroli: Jalan Gatot Subroto–Jalan Dpatiunus–Jalan Prambanan – Pasar Malabar –Jalan Cemara–Jalan Beringin –Jalan Betet–Kavling Pemda–Jalan Palem Semi–Jalan Imam Bonjol– Jalan Bouleverd Gajah Mada–Jalan Imam Bonjol. Sementara itu yang menjadi *check point* sebagai berikut.

1. Kantor lurah Cibodas Baru
2. Alfamart Jl. Prambanan Kel. Cibodasari
3. Warnet Jl. Prambanan Kel. Cibodas baru
4. Indomart Jl. Empu Gandring Kel. Cibodas Baru
5. Chandra Borobudur Motor 2
6. Gereja Santo Agustinus
7. Bank BRI Kel. Cibodasari
8. PDAM Kel. Cibodasari
9. Pasar Malabar
10. Alfamart Jl. Karet Raya Kel. Cibodasari
11. Kantor Kelurahan Cibodasari
12. Kavling Pemda
13. Coca Cola Jl. Imam bonjol Kel. Pan-Bar
14. Pom Bensin Imam Bonjol Jl. Imam bonjol Kel. Pan-Bar
15. Pemotongan Hewan Kel. Pan-Bar
16. Kantor Kelurahan Pan-Bar
17. Ruko Gajah Mada
18. Perumahan Lippo
19. Ruko Pinangsia
20. Perumahan Palem Semi
21. Serba Otto
22. PT. Mentari Metal Pratama Jl. Imam Bonjol Kel. Pan-Bar

Beat 5 menggunakan mobil Carens 6406 dengan wilayah patroli: Kelurahan Gembor, Kelurahan Sangiang Jaya, dan Kelurahan Gebang Raya. Sebagai manan nampak dalam peta patroli di bawah ini.

Gambar 3.5
Peta Beat 5 Unit Patroli Polsekta Jatiuwung



Sumber: Polsekta Jatiuwung 2010

Dengan route patroli: Jalan Gatot Subroto – Jalan Taman Cibodas – Jalan Kian Santang – Jalan Vila Tangerang Indah – Jalan Regency I – Jalan Purati – Pasar Doyong – Jalan Prabu Siliwangi – Jalan Kian Santang. Sementara itu yang menjadi *check point* dalam beat ini sebagai berikut.

1. Pasar Jati Jl. Kian Santang Kel. Sangiang Jaya
2. RM Remaja Kuring Jl. Gatot Subroto Kel. Sangiang Jaya
3. Bank BRI Jl. Gatot Subroto Kel. Sangiang Jaya
4. Bank BCA Ruko Duta Plaza Kel. Sangiang Jaya
5. Bank Danamon Ruko Duta Plaza Kel. Sangiang Jaya
6. Bank LIPPO Ruko Duta Plaza Kel. Sangiang Jaya
7. Warnet Taman Cibodas Jl. Taman Cibodas Kel. Sangiang Jaya
8. Indomart Jl. Taman Cibodas Kel. Sangiang Jaya
9. Alfamart Jl. Taman Cibodas Kel. Sangiang Jaya
10. Kantor Kel. Sangiang Jaya
11. Aneka Subur Jl. Kian Santang Kel. Sangiang Jaya
12. Indomart Jl. Kian Santang Kel. Gebang Raya
13. Perumahan Vila Duta Jl. Kian Santang Kel. Sangiang

14. Otopart Jl. Kian Santang Kel. Gebang Raya
15. Apple Green Jl. Kian Santang Kel. Sangiang Jaya
16. Perumahan Gebang
17. SMPN 12 Tangerang Jl. Regency Kel. Gebang Raya
18. PT. Garuda Food Jl. Baru Kel. Gebang Raya
19. PT. Dekor Mas Jl. Baru Kel. Gebang Raya
20. Kantor Kelurahan Gebang Raya
21. PT. Arwana Jl. Pasar Doyong Kel. Gembor
22. Haji Sabar Jl. P. Siliwangi Kel. Gembor
23. Pom Bensin Sangiang Jl. Kian Santang Kel. Sangiang Jaya
24. PT. Jabatex Jl. P. Siliwangi Kel. Gembor.

Beat 6 menggunakan kendaraan Kijang 6407 dengan wilayah patroli Kelurahan Priuk dan Kelurahan Priuk Jaya. Sebagaimana tampak dalam peta patroli sebagai berikut.



Sumber: Polsekta Jatiuwung 2010.

Dengan route patroli: Jalan Prabu Siliwangi – Jalan M. Toha – Jalan Km – Jalan Arya Kamuning – Jalan Baru Cadas – Jl. Bayur – Jalan Baru Cadas – Jalan M. Toha. Sementara itu *check pointnya* adalah

1. Alfamart Regency Jalan Regency Kel. Periuk.
2. Pasar Regency Jalan Regency Kel. Periuk.
3. Indomart Jalan Regency Kel. Periuk.
4. Perum Regency I Jalan Regency Kel. Periuk.
5. Perum Garnd Tomang Jalan Regency Kel. Periuk
6. Perum Mutiara Pluit Jalan Regency Kel. Periuk
7. Indomart Periuk Jaya Jalan Km Kel. Periuk Jaya.
8. Alfamart M. Toha Jalan M. Toha Kel. Periuk Jaya.
9. Kantor Kelurahan Periuk Jalan M. Toha Kel. Periuk.
10. Perum Prima Tangerang Jalan M. Toha Kel. Periuk Jaya
11. PT. Gaya Indah Kharisma Jalan M. Toha Kel.
 1. PT. Sari Murni Jalan Arya Kamuning Kel. Periuk Jaya
 2. PT. Puti Mas / Spon Jalan Arya Kamuning Kel. Periuk Jaya
 3. PT. Makmur Aman Sentosa Jalan Arya Kamuning Kel. Periuk Jaya
 4. PT. Kendalindo Intan Jalan Arya Kamuning Kel. Periuk Jaya
 5. PLN Periuk Jalan. Arya Kamuning Kel. Periuk Jaya
 6. PT. Cipta Rasa Sempurna Jalan Arya Kamuning Kel. Periuk Jaya
 7. Pabrik Karton Jalan Pengasinan Kel. Periuk Jaya
 8. Kantor Kelurahan Periuk Jaya Kel. Periuk Jaya
 9. PT. Everindo Jalan Km Kel. Periuk Jaya.

3.4 Upaya Pencegahan Kejahatan Polsek Jatiuwung Melalui Kegiatan Patroli

Unit Patroli Polsekta jatiuwung melaksanakan patroli untuk memelihara kamtibmas dan mencegah terjadinya kejahatan. Selain memperhatikan karakteristik kerawanan daerah, patroli difokuskan berdasarkan kareteristik kejahatan, yaitu tindak kriminalitas yang terjadi, sesuai dengan laporan dan pengaduan oleh SPK yang dilanjutkan ke fungsi reserse dan ditembuskan kepada unit patroli.

Dengan hubungan tata kerja ini lah, unit patroli melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan berdasar kepada tindak kriminalitas yang terjadi. Hasil temuan penelitain tindak kriminalitas yang terjadi selama Januari sampai dengan Maret 2010, sebagai berikut.

Tabel 3.4
Data Crime Total Januari-Maret 2010.

1.	Pembunuhan	-	-	-	-
2.	Anirat	5	7	4	16
3.	Curas	2	1	-	3
4.	Curat	4	9	9	22
5.	Curanmor	18	24	12	54
6.	Kebakaran	1	-	-	1
7.	Perjudian	-	-	-	-
8.	Pemerasan	-	-	-	-
9.	Perkosaan	-	-	-	-
10	Narkotika	1	1	3	5
	Jumlah	31	42	28	101

Sumber : Polsekta Jatiuwung 2010.

Berdasarkan data kriminalitas itu, menurut Kanit Patroli (17 Februari, 2010) patroli Polsekta Jatiuwung difokuskan untuk melakukan patroli. Pada saat apel pagi (breifing) setiap harinya disampaikan kepada seluruh petugas patroli untuk meningkatkan patroli pada titik-titik rawan berdasarkan data kriminalitas tersebut. Apabila merujuk data di atas pada Januari telah terjadi 31 tindak kejahatan, ada peningkatan pada Februari 11 tindak kejahatan menjadi 42 tindak kejahatan, dan pada Maret ada penurunan angka kejahatan 14 tindak kejahatan menjadi 28 tindak kejahatan. Sepintas pada bulan Februari patroli tidak dapat mencegah kejahatan dan pada Maret dapat mencegah kejahatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah penurunan dan peningkatan kejahatan ada korelasinya dengan kegiatan patroli Polsek Jatiuwung?.

Berdasarkan hasil pengamatan dan mempelajari data kriminalitas itu, dari 101 kejadian, 61 kasus tercatat dari pukul 06-00 sampai 20.00 sejumlah 61 kasus dan pada 20.00 sampai dengan 06.00 tercatat 50 Kasus. Artinya tindak kriminalitas jumlah kriminalitas pada siang hari lebih banyak dibandingkan pada

malam hari. Sedangkan berdasarkan wilayah: Kecamatan Cibodas 37 Kasus, Kecamatan Periuk 37 30 Kasus, dan Kecamatan Jaituwung 34 kasus. Apabila dikaitkan dengan kegiatan patroli, pada siang hari setiap regu tidak memungkinkan menempuh route patroli yang sudah disusun melalui sistem beat, dan pada malam hari pukul 21.00 ke atas petugas patroli memungkinkan dapat menempuh route patroli dan check point yang telah ditentukan.

Menurut Kanit Patroli (16 Februari, 2010) pada siang hari, yang menjadi kendala pelaksanaan patroli adalah kemacetan arus lalu lintas, sehingga petugas patroli baik yang sedang melaksanakan tugas maupun cadangan diperbantukan untuk mengatur lalu lintas pada saat jam berangkat kerja dan sekolah dari pukul 06.00-08.00, kemudian seluruh petugas kembali ke kantor Polsek Jaituwung untuk melaksanakan apel pagi dan briefing dari Kapolsek maupun perwira yang ditunjuk yang memakan waktu sekitar 2 jam, terhitung pergerakan dari titik rawan macet lalu lintas ke kantor Polsekta Jaituwung dan pelaksanaan apel dan briefing itu. Sedangkan pada sore hari petugas patroli juga diwajibkan membantu mengatur arus lalu lintas dari pukul 16.00 sampai 18.00 pada saat warga pulang kerja dan sekolah. Berdasarkan keterangan Kanit itu, maka kegiatan patroli pada siang hari tersisa 6 Jam, belum lagi mereka disibukkan dengan aktivitas perusahaan seperti mogok kerja dan unjuk rasa. Hal itu dikuatkan dengan hasil wawancara petugas patroli 3 dan 4 (2 Maret, 2010) yang menyatakan.

Kita start dari rumah untuk pengaturan arus lalu lintas pagi hari mulai 06.00 sampai dengan jam 08.00. kemudian kembali ke kantor untuk pelaporan dan APP, setelah pelaksanaan APP kita melaksanakan patroli beat yang sudah diatur, seperti melaksanakan patroli di gajah tunggal untuk penyentuhan tokoh masyarakat atau di tempat-tempat yang rawan misalkan dipusat-pusat perbelanjaan dan di perparkiran, terus penyentuhan kepada tokoh masyarakat seperti Haji Adang, Haji Ali, Haji Sabar, setelah selesai jam 4 sore kita sudah melaksanakan gatur lalin lagi di pertigaan gajah tunggal dan industri, sampai nanti jam 6, kemudian melaksanakan patrol kembali dengan sasaran pusat-pusat perbelanjaan atau perparkiran itu kita sentuh.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan, beberapa petugas patroli melaksanakan tugas patroli roda 4 hanya sekedar mengelilingi dan mencapai sasaran check point yang sudah ditentukan. Nampaknya patroli yang dilakukan hanya sekedar memutar atau mengelilingi wilayah patrolinya, bukan melakukan pengawasan terhadap FKK, PH, maupun AF. Selain itu mereka juga difokuskan untuk mencari bensin tambahan untuk patroli dan uang saku tambahan untuk dibawa pulang kerumah kepada orang-rang yang disebutkan di atas. Hal itu dikuatkan hasil wawancara petugas patroli 6 “ untuk mencukupi kebutuhan bensin dan uang untuk di rumah patroli difokuskan kepada orang-orang yang sering memberikan atensi atau yang biasa memberikan uang bensin, kalau sudah dapat baru patroli bisa jalan.”

Sementara itu kegiatan patroli pada malam hari, yang dilaksanakan hanya menggunakan kendaraan roda 4. Sehingga mereka hanya berpatroli pada ruas-ruas jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4, artinya patroli hanya dilaksanakan pada jalan-jalan besar atau jalan arteri. Sedangkan berdasarkan berdasar data kriminalitas di atas, tindak kriminalitas 50 kasus terjadi dipemukiman dan sisanya terjadi tempat-tempat seperti alfa mart, indomaret, warnet, dan tempat hiburan, yang berada pada ruas jalan. Dengan demikian nampaknya tidak ada korelasi antara penurunan dan peningkatan kejahatan dengan kegiatan patroli, apabila cara patroli yang dilakukan oleh petugas patroli seperti di atas.

3.5 Kegiatan Pemolisian Masyarakat Melalui Patroli

Berdasarkan uraian di atas, untuk menekan tindak kejahatan memerlukan strategi pencegahan kejahatan guna memecahkan permasalahan yang ada. Salah satu upayanya adalah pemolisian masyarakat melalui kegiatan patroli, dengan tujuan melibatkan peran serta masyarakat untuk mengurangi dan menekan angka kejahatan itu.

3.5.1 Patroli Dialogis

Menurut Kapolsek Jatiuwung (25 Februari, 2010) “ strategi yang diterapkan adalah patroli dialogis”. Artinya pelaksanaan kegiatan patroli di wilayah Polsekta Jatiuwung, selain melaksanakan tugas rutin patroli, melakukan

kegiatan sambang dan pembinaan kepada masyarakat, dengan melakukan komunikasi singkat dengan menanyakan situasi Kamtibmas dan juga meminta saran pendapat tokoh tersebut berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang terjadi di daerah tokoh yang disambangi. Hal ini senada dengan pernyataan anggota patroli 2 Polsekta Jatiuwung (5 Februari, 2010):

...Kapolsek memerintahkan para anggota patroli untuk singgah di titik-titik *check point* yang sudah ditentukan untuk berkomunikasi dengan masyarakat minimal 5 (lima) menit di setiap titik *check point*. Kadang di tempat tokoh yang kita sambangi kita diberi minum kopi bahkan kadang dibeliin rokok. Yahhh.. senang juga sih..

Hal itu juga dibenarkan oleh Kanit Patroli (20 Februari 2010) "kegiatan patroli saya fokuskan kepada titik-titik rawan, dimana anggota diwajibkan untuk menyambangi masyarakat dengan menyampaikan pesan kamtibmas, seperti menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan kunci ganda pada kendaraan roda 2 maupu roda 4, karena tindak kriminalitas yang paling tinggi adalah pencurian kendaraan bermotor.

Selain itu menurut Kapolsekta Jatiuwung (25 Februari, 2010) untuk langkah pembinaan kepada masyarakat Polsek jatiuwung melakukan terobosan dengan teguras simpatik kepada masyarakat, misalnya apabila ada kendaraan diparkir sembarangan, maka petugas partoli akan membuat surat teguran agar dipindahkan ditempat lebih aman, yang disebut dengan blanko teguran simpatik

Yang dimaksud Blanko Teguran Simpatik adalah kartu teguran tilang tetapi *nonprojustitia*. Blanko itu memuat nama petugas, jam, tanggal, sasaran dan jenis kelalaian atau pelanggarannya. Blanko tersebut dibawa oleh petugas patroli selama tugasnya berlangsung. Blanko teguran simpatik ini diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran atau akan membulkan kejahatan, tidak memakai helm di jalan kampung, masyarakat yang meninggalkan sepeda motornya tanpa dikunci stang, pagar rumah tidak dikunci malam hari, dan sebagainya.

Blanko tersebut bukan sekedar teguran karena bisa juga dipergunakan untuk mengambil tanda pengenal pelanggar. Blanko Teguran Simpatik bisa berisi

temuan petugas patroli ketika sedang melaksanakan patroli serta saran rekomendasi yang harus dilakukan si pelanggar. Hal tersebut dilakukan lebih kepada tujuan menyadarkan dan membina masyarakat tentang Kamtibmas dan keamanan dirinya oleh para petugas patroli polisi setempat. Dalam pelaksanaannya di lapangan para petugas Unit Patroli Polsekta Jatiuwung jarang menggunakan blanko Teguran Simpatik ini, padahal konsep dan perintah dari pimpinan jelas bahwa para petugas patroli dalam setiap pelaksanaan tugas harus dan wajib membawa blanko teguran simpatik ini.

Akan tetapi pada pelaksanaannya, hal itu tidak dilaksanakan oleh anggota. Sebagaimana dikemukakan oleh petugas Unit Patroli 5 Polsekta Jatiuwung “ blanko teguran simpatik memang digunakan pada masa Kapolsek sebelumnya. Tapi sekarang kita jarang menggunakan itu dan tak ada teguran dari pimpinan lagipula dengan teguran lisan dari kami kepada warga sepertinya sudah cukup”. Sedangkan bentuk blanko teguran simpatik itu dibawah ini.

Gambar 3.7
Blanko Teguran Simpatik

The image shows two identical forms side-by-side, one on the left and one on the right. Both forms are for 'POLSEKTA DAERAH METRO JAYA' and 'SEKSIOR METROPOLITAN TANGERANG'. The title is 'TEGURAN SIMPATIK PATROLI POLISI'. The text on the forms reads: 'Setelah kami edikan patroli di wilayah... pada tanggal... kami temukan... Demi tercapainya situasi / kondisi aman, tertib dan lancar sesuai yang kita harapkan, maka perlu tindakan / sebut antara lain: 1. 2. 3. 4. Demikian himbauan / teguran kami dan terima kasih atas kerjasamanya yang harmonis.' The forms also include a signature line for 'Petugas Patroli' and contact information: 'Telp. 021 - 990 9138' and 'Fax. 021 1943 8191'.

Sumber : Data Unit Patroli Polsekta Jatiuwung 2010

Blanko Teguran Simpatik terdiri dari dua lembar dengan warna berbeda yaitu (a).Warna putih untuk masyarakat yang dikenai teguran, (b) Warna merah jambu untuk kontrol satuan dan tindak lanjut yang harus dipersiapkan oleh Polsek serta

manjadi alat kontrol komandan terhadap kinerja anggotanya sekaligus sebagai keterangan tempat dan waktu bagi pelanggar yang diundang untuk mendapat pembinaan.

3.5.2 Pemolisian di Pemukiman Warga

Pemukiman di wilayah hukum Polsekta Jatiuwung terdiri dari dua bagian meliputi pemukiman biasa (perkampungan) dan pemukiman kompleks. Pemukiman perkampungan adalah pemukiman warga yang tidak tertata dan tidak mempunyai fasilitas atau sarana yang teratur akan tetapi kehidupan sosialnya berjalan harmonis artinya hubungan satu orang dengan yang lainnya menunjukkan keakraban saling mengenal kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan pemukiman Komplek adalah pemukiman warga yang biasanya tertata dan memiliki sarana dan prasarana seperti sarana olahraga, taman dan luas jalan yang cukup lebar. Sedangkan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya biasanya tidak terjalin keakraban, kekeluargaan dan gotong royong, serta cenderung bersifat individu dikarenakan kesibukannya.

Berkaitan dengan keamanan lingkungan Sistem pengamanan yang dilakukan oleh warga pada pemukiman biasa dan pemukiman kompleks berbeda. Pada pemukiman biasa mereka mengadakan pengamanan lingkungan yang dikenal dengan pengamanan siskamling menurut hal itu dibenarkan oleh salah satu ketua RW dikelurahan Jatake (22 Februari, 2010) “di daerah kami masyarakat masih mau diajak kerja sama untuk mengadakan siskamling, setiap warga diwajibkan mengikuti kegiatan itu secara bergiliran setiap harinya.” Kemudian pada pemukiman Komplek sistem penyelenggaraan lingkungan menggunakan tenaga Satpam mereka dibayar oleh warga penghuninya untuk mengamankan lingkungan. Menurut Satpam diperumahan Jatake (23 Februari, 2010) “kami disini bertugas untuk menjaga lingkungan supaya keamanan dan ketertiban warga terjamin, dan saya mengamankan ini digaji setiap bulannya.”

untuk menjaga lingkungan kami memperketat penjagaan lingkungan dengan patroli disetiap harinya selain itu kami juga menghimbau kepada warga masyarakat apabila rumah dalam keadaan kosong agar melapor ke petugas Satpam sehingga penjagaan akan memperketat penjagaan dirumah kosong itu.

Kendati demikian masih terjadi tindak kriminalitas seperti pencurian pada dua pemukiman itu. Hal itu dikarenakan kelalaian baik petugas siskamling maupun petugas Satpam terutama pada saat dini hari antara pukul 00.00 Wib sampai dengan 05.00 Wib (data kriminalitas Polsekta Jatiuwung 2010) maka dari itu perlu peran patroli Polsek Jatiuwung untuk meningkatkan patroli pada jam itu. Namun petugas patroli tidak pernah menjangkau pemukiman biasa mereka memprioritaskan pemukiman kompleks yang dijaga oleh satpam hal ini dikuatkan oleh pernyataan ketua RW disalah satu kelurahan Jatiuwung (2 Maret, 2010):

saya sering melihat lalu lalang Patroli Polsek Jatiuwung pada malam hari pada jalan – jalan utama tapi disayangkan mereka tidak pernah mampir apa lagi memberi pembinaan kepada petugas siskamling sehingga saya pernah menemukan petugas siskamling pada pukul 02.00 dini hari sedang tertidur di poskamling akibatnya wajar kalau masih terjadi tindak kriminalitas pencurian.

Sedangkan pada pemukiman kompleks menurut satpam salah satu perumahan Jatiuwung (3 Maret, 2010) “ petugas patroli sering datang kesini pak kadang kadang masuk kedalam bersama-sama melakukan patroli di kompleks ini ”.

3.5.3 Pemolisian Dikawasan Pabrik

Kawasan pabrik, merupakan salah satu polize hazard yang berasal di kawasan Polsekta Jaituwung. Walaupun sudah ada satuan pengamanan (satpam) yang menjaga kawasan itu, unit patroli tetap melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas untuk memelihara kamtibmas dan mendukung kelancaran aktivitas perusahaan. menurut Kanit Patroli (16 Ferbruari, 2010) pada perusahaan tertentu seperti PT. Sandrafine Garmen yang mempunyai ribuan karyawan ditempatkan satu orang anggota yang melakukan penjagaan tetap (*stasioner*) untuk membantu pengamanan perusahaan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini atas kerawanan mogok kerja dan aksi unjuk rasa. Selain itu petugas patroli yang berjaga, dapat melakukan pendekatan kepada karyawan sekaligus pembinaan dengan cara menyampaikan pesan kamtibmas dan menjaga lingkungan bersama. Alhasil dari studi dokumen Polsekta Jatiuwung, tidak pernah terjadi unjuk rasa atau mogok kerja yang bersifat

anarkhis yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu pengamanan terhadap perusahaan dan pabrik yang berada di wilayah Jatiuwung dibantu oleh satuan samapta dari Polres Kota Tangerang.

Sedangkan pengaturan lalu lintas, secara rutin setiap hari pukul 06.00 samapi dengan 08.30 Wib menempatkan petugas patroli dititik-titik tertentu yang rawan macet. Karena pada pagi hari kawasan ini merpupakan askes keluar masuk kedaraan pabrik, angkutan karyawan, dan angkutan umum. Menurut Kapolsekta Jatiuwung (22 Februari, 2010)

melibatkan unit patroli dalam pengamanan, terutama pengaturan lalulintas merupakan upaya pemolisian yang dilakukan Polsekta Jatiuwung, agar masyarakat merasa terayomi dan terlindungi dan sebgai wujud pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan, selain mengatur lalulints, anggota patroli itu melakukan penindakan terhadap pengemudi yang dianggap melakukan pelanggaran seperti pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm. Akan tetapi nampaknya penindakan yang diberikan kepada merkea hanya bersifat lisan, pelanggar tidak diberikan satu helai kertas apapun atau kertas tilang, namun di memutarakan kembali kendaraan dengan arah berlawanan. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan petugas patroli 7 (24 Februari, 2010) ” pengemudi tersebut tidak saya lakukan penindakan secara simpatik, yaitu dengan teguran lisan dan saya arahkan untuk kembali kerumahnya untuk mengambil helm.” Sama halnya dengan petugas patroli 8 (24 Februari, 2010) menyatakan “ penindakan simpatik itu dilakukan supaya ada kedekatan kepada masyrakat, dan yang paling penting dia tahu kesalahannya serta sadar dan mau memeperbaikinya.”

3.5.4 Pemolisian di Kawasan Perbelanjaan dan Tempat Umum

Kawasan perbelanjaan yang berada di wilayah hukum Poslekta Jatiuwung merupakan daerah rawan tindak kriminalitas seperti pencopetan dan terutama pencurian kendaraan bermotor (data Kriminalitas Polsekta Jatiuwung 2010). Area pengamanan yang harus menjadi perhatian meliputi kawasan pertokoan dan lahan perpikiran. Maka dari itu, menurut Kapolsekta Jatiuwung (25 Februari, 2010)

menempatkan kawasan perbelanjaan seperti indomaret, alfa mart, pasar konvensional maupun modern (lihat bab 2) dijadikan sebagai check point dalam pelaksanaan tugas patroli.

Sedangkan pemolisian yang dilakukan terhadap kawasan tersebut. Menurut Kapolsekta Jatiuwung (25 Februari 2010) "saya telah memberikan arahan kepada kanit maupun anggota agar pusat-pusat perbelanjaan dilakukan patroli, tapi bukan sekedar "patroli", setaip petugas harus komunikasi dengan petugas parkir dan satpam untuk menyampaikan pesan kamtibmas". Hal itu juga dikuatkan oleh petugas patroli 3 (18 Februari 2010) " memang benar pak, saya diperintahkan oleh Kapolsek, setiap patroli harus berhenti dan berkomunikasi dengan masyarakat pada titik rawan kriminalitas, seperti pada lahan perpikiran." Namun berbeda dengan keterangan dari petugas parkir alfa mart (18 Februari, 2010):

saya sering melihat mobil patroli pak, tapi saya sendiri belum pernah berkomunikasi dengan petugas patroli, dan harapan saya, kalau memang ada waktu yang saya kepingin didatangi petugas polisi, untuk mengkonsultasikan masalah pencurian kendaraan bermotor yang marak akhir-akhir ini.

Nampaknya petugas patroli tidak berkata yang sebenarnya atau penulis bertanya kepada orang yang salah. Namun ketika penulis mengamati petugas patroli yang menggunakan kendaar sedan ford mengarah alfa mart, mereka memang berhenti, tetapi untuk mampir membeli sebungkus rokok dan terlihat tidak ada kativitas komunikasi dengan warga masyarakat(catatan lapangan).

BAB 4

ANALISIS PELAKSANAAN PATROLI DAN PEMOLISIAN POLSEKTA JATI UWUNG DALAM MENCEGAH KEJAHATAN

Pada bab ini, penulis akan menganalisis patroli dan pemolisian masyarakat melalui kegiatan patroli oleh Polsekta Jatiuwung dalam mencegah kejahatan guna menciptakan kamtibmas dan keteraturan sosial. Meliputi manajemen patroli, pelaksanaan patroli dalam mencegah kejahatan dan kendalanya, serta upaya pemolisian masyarakat melalui kegiatan patroli oleh Polsekta Jatiuwung.

4.1 Analisis Manajemen Patroli Polsekta Jatiuwung

Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya memerlukan manajemen, termasuk dalam penyelenggaraan patroli oleh Polsekta Jatiuwung. Manajemen patroli yang dimaksud adalah penyelenggaraan proses manajemen patroli Polsekta Jatiuwung dalam rangka pencegahan kejahatan. Menurut Hadiman (2008) hal itu dapat dicapai apabila dikerjakan benar dan efektif serta mengerjakannya benar atau sangkil, dikenal dengan istilah "*doing the right thing and to do the thing right.*" Oleh karena itu penulis akan menguraikan dan menganalisis proses manajemen sumber daya manusia dan manajemen pelaksanaan patroli sendiri. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

4.1.1 Manajemen Sumber daya Manusia

Untuk melaksanakan kegiatan patroli diperlukan seseorang atau personil yang profesional di bidang tugasnya. Menurut Reksodiputro (2005) seorang profesional dalam menjalankan profesinya memerlukan pengetahuan (*knowledge*) dan kemahiran (*skill*) yang didukung oleh syarat akademik dan pengetahuan dibidangnya. Sedangkan apabila dikaitkan dengan petugas patroli Polsek Jatiuwung, maka ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan tentang patroli.

Petugas yang ditempatkan di unit patroli saat ini, nampaknya tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang patroli. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian, hampir seluruh petugas patroli tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang patroli atau pendidikan kejuruan patroli atau mendapat pengetahuan dan pelatihan tentang patroli baik dari kapolsek maupun kanit patrolinya. Selain itu tidak ada kemauan atau motivasi dari petugas patroli sendiri untuk mempelajari tentang konsep patroli. Sementara itu buku yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan patroli yang dikeluarkan oleh Polri, baik Skep Kapolri No.Pol: Skep/49/IV/2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli maupun Peraturan Kababinkam Polri No. 11 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Patroli, hanya dipunyai pada tataran level pimpinan, yaitu Kanit Patroli, Wakapolsek, dan Kapolsek, sedangkan pada level anggota jangankan mempunyai melihat bukunya pun hampir tidak pernah.

Penempatan petugas patroli, hanya berdasarkan pada pengalaman berdinasi di kepolisian. Seseorang yang berpangkat brigadir kepala (Bripka) sampai ajun inspektur satu (Aiptu) dianggap sudah pengalaman di bidang tugas patroli, walaupun latar belakang pengetahuan atau kejuruan mereka dibidang reserse, lantas, intel, dan bimmas dianggap mempunyai kemampuan dalam melaksanakan patroli. Namun pada kenyataannya, hasil wawancara menunjukkan mereka tidak mengetahui tentang konsep patroli, jenis patroli, cara melakukan patroli, melainkan mereka hanya mengetahui kapan mereka berdinasi, kapan mereka lepas dinas, dan patroli sendiri yang dipahami adalah kegiatan polisi untuk mencegah kejahatan dan menciptakan kamtibmas.

Apabila merujuk pendapat Djamin (1995) beberapa pertimbangan dalam menempatkan personil diantaranya faktor prestasi akademis dan pengalaman. Akan tetapi pengalaman bukan jawaban seseorang dianggap profesional di bidang tugasnya, apabila tidak didukung dengan pengetahuan, namun seseorang yang berpengalaman akan lebih mudah dibina dan didayagunakan jika mereka dibimbing oleh pimpinannya atau disekolahkan di lembaga pendidikan agar mereka mengetahui konsepsi tentang patroli itu sendiri.

4.1.2 Manajemen Pelaksanaan Patroli

Manajemen pelaksanaan merupakan salah satu aspek penting bagi mendukung keberhasilan patroli dalam mencegah kejahatan. Menurut Dwight Waldo dalam Williams (2001) proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sama halnya dengan manajemen patroli Polsekta Jatiuwung untuk mengelola kegiatan patroli guna mencegah kejahatan di wilayah hukumnya, yaitu rencana kegiatan patroli, pembagian regu patroli, pelaksanaan patroli dengan sistem beat dengan dilengkapi surat perintah patroli, dan laporan hasil patroli sebagai pengawasan pimpinan atas pelaksanaan patroli.

4.1.2.1 Perencanaan Patroli Polsekta Jatiuwung.

Menurut Terry (186, hlm. 163) perencanaan meliputi tindakan: memilih dan menghubungkan fakta fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisulakan serta merumuskan aktivitas aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untum mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Oleh karena itu dalam perencanaan patroli untuk mencegah kejahatan harus menghubungkan dengan fakta-fakta yang menjadi sumber ancaman dengan melihat kalender kamtibmas (tindak kriminalitas yang sering terjadi di Polsekta Jatiuwung). Untuk mengetahui itu sentral pelaporan dan pengaduan tindak pidana yang terjadi berada di sentra pelayanan Kepolisian (SPK), yang berfungsi melayani setiap pengaduan dan pelaporan yang datang dari masyarakat baik yang datang secara langsung maupun melalui telepon.

Maka berdasarkan inilah seharusnya perencanaan unit patroli dibuat, yang dijabarkan dari rencana kegiatan tahunan, kemudian bulanan, mingguan, dan harian. Namun berdasarkan temuan penelitian rencana kegiatan patroli tidak dibuat berdasarkan sumber fakta-fakta ancaman yang terjadi, melainkan pengulangan dari rencana kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahun sebelumnya. Hal ini dikuatkan hasil pengamatan terhadap administrasi yang berada di ruang Kanit patroli dan stafnya memuat panel data: peta beat patroli;

peta rawan kecelakaan; dan peta rawan kemacetan, sedangkan peta rawan kamtibmas, dalam hal ini penjabaran dari tindak kriminalitas yang terjadi tidak ada.

Menurut teori CPTED Oscar Newman dalam Hadiman (2008) salah satu strategi pencegahan kejahatan adalah dengan pembagian area, untuk memudahkan pengawasan terhadap daerah yang menjasi rawan kriminalitas. Sementara itu perencanaan Polsekta Jatiuwung kurang optimal, artinya perencanaan patroli untuk mencegah kejahatan yang ada saat ini bersifat statis, artinya petugas patroli melaksanakan patroli hanya berdasarkan beat patroli, kerawanan laka, dan kemacetan. Dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan, walaupun beat patroli memuat karakteristik kerawanan yang dapat menimbulkan FKK, PH, dan AF di wilayah tugas Polsekta Jatiuwung, akan tetapi tidak berarti tindak kejahatan terjadi pada chek point yang telah ditentukan, kejahatan selalu berpindah-pindah baik modus, locus delicti, dan metodenya.

Dalam pada itu beat patroli merupakan pedoman bagi pelaksanaan patroli Polsekta Jatiuwung tidak bersifat mutlak. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Kapolsekta maupun Kanit Patroli Polsekta Jatiuwung, route patroli akan berubah disesuaikan dengan tren atau kejadian kriminalitas yang terjadi. Namun pada realitanya perencanaan patroli yang dibuat tidak mengikuti tren kriminalitas setiap harinya.

Menurut Terry (1986, hlm. 201) "untuk mencapai perencanaan yang baik harus dilaksanakan sebelum tindakan dilakukan." Sementara itu menurut Kunarto (1997) seorang pemimpin (kapolsekta dan Kanit Patroli jatiuwung) yang baik, seharusnya mempelajari dan menyimpulkan dari kerwananan karakteristik daerah (sistem beat) dan kalender kamtibmas (data kriminalitas Polsekta Jatiuwung). Merujuk kedua pendapat itu, perlu dibuat peta kerawanan kamtibmas berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat, yang ditulis dalam tabulasi kejadian administasi unit patroli, kemudian dijabarkan pada peta rawan kriminalitas untuk menjadi pedoman pelaksanaan patroli dan mengetahui titik-titik rawan kriminalitas.

4.1.2.2 Pengorganisasian Patroli Polsekta Jatiuwung

Menurut Terry (1986, hlm. 233) pengorganisasian “merupakan sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang sedemikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan yang ditetapkan.” Sama halnya dengan patroli jatiuwung telah melakukan pengorganisasian dalam manajemen operasional Kepolisiannya terhadap anggota Unit Patroli Polsekta Jati Ujung berjumlah 31 orang. Pembagian itu, terdiri dari: satu orang Kanit Patroli, satu orang staf Patroli, dan 5 regu patroli yang masing-masing regu berjumlah 6 orang kecuali regu 5 berjumlah 5 orang.

Kelima regu itu, telah mempunyai pertelaahan tugas masing-masing. Sebagaimana dikemukakan Terry (1986, 234) sebuah organisasi formal harus mempunyai empat komponen dasar: “ 1) pekerjaan yang dibagi-bagi; 2) orang yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan yang dibagi-bagi tersebut; 3) lingkungan dimana pekerjaan dilaksanakan; dan 4) hubungan antara orang-orang di dalam kelompok kerja. Hal itu juga senada dengan yang dikemukakan oleh Kunarto (1997) dalam suatu organisasi harus mempunyai pembagian tugas yang jelas. Regu 1 melaksanakan patroli pada beat 1 dengan menggunakan kendaraan sedan ford 6041, Regu 2 melaksanakan patroli pada beat 2 dengan menggunakan kendaraan sedan ford 6402, Regu 3 melaksanakan patroli pada beat 3 menggunakan kendaraan sedan Ford 6403, Regu 4 melaksanakan patroli beat 4 dan beat 6 dengan menggunakan sedan ford 6404, dan Regu 5 melaksanakan patroli pada beat 5 dengan menggunakan mobil carens 6406.

Kelima regu itu melaksanakan patroli dengan pembagian wilayah, route, check point yang jelas sesuai dengan beatnya. Selain itu setiap unit patroli yang dilengkapi perlengkapan HT, selalu melakukan koordinasi baik antara regu patroli dan fungsi lain. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana atau *police hazard* kecepatan atau respon untuk mendatangi TKP cepat. Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara Ketua RW Regency dan Ketua FKPM (24 Februari, 2010) “ Alhamdulillah pak, sekarang polisi apabila ditelepon ada kejadian cepet datang, walaupun ada keterlambatan wajar karena daerah kami agak susah dilalui kendaraan.”

Sedangkan tujuan dari pembagian tugas dalam beat dan regu ini adalah sebagai berikut.

1. Pengorganisasian Unit Patroli yang dibagi dalam Regu merupakan kebutuhan organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi yang didasarkan pada luasnya wilayah dan saran yang dituju dalam wilayah hukum Polsek Kota Jatiuwung.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada seluruh komunitas yang ada di wilayah hukum Polsek Kota Jatiuwung.
3. Secara organisasi untuk memperjelas tanggung jawab penugasan dalam kegiatan patroli Unit Patroli Polsek Kota Jatiuwung.

Kendati demikian, pembagian tugas patroli terhadap roda 2 belum ada, tidak ditemukan dokumen dan arsip tentang pembagian tugas patroli roda 2 (catatan lapangan). Keenam sepeda motor yang terparkir di halaman parkir Poslekta Jatiuwung nampak kotor dan berkarat menandakan tidak pernah digunakan sama sekali, selain itu patroli jalan kaki juga tidak dilakukan oleh Polsekta Jatiuwung dengan alasan kekurangan personil patroli. Walaupun Kanit patroli Polsekta Jatiuwung menyangkalnya bahwa patroli roda 2 dilaksanakan oleh anggota yang berstatus cadangan pada pukul 06.00 sampai dengan 12.00 Wib, dan patroli roda 4 sekaligus menjalankan patroli jalan kaki. Namun berbeda dengan pernyataan anggota patroli 2 (17 Februari, 2010) “ di dalam surat perintah saya melaksanakan patroli roda 2 dan jalan kaki, tapi jarang dilakukan pak dalam prakteknya saya hanya melaksanakan patroli roda 4.”

Selain pembagian tugas, di dalam manajemen operasional kepolisian, sebelum pelaksanaan tugas harus diberikan atensi –atensi khusus yang harus dicermati dan diwaspadai oleh petugas unit Patroli (Kunarto 1997). Kapolsekta atau Wakapolsekta serta perwira yang ditunjuk setiap paginya melaksanakan apel pagi, yang bertujuan untuk memberikan *breifing* atau atensi-atensi terhadap pelaksanaan tugas seluruh fungsi yang berada di Polsekta Jatiuwung, termasuk unit patroli yang akan bertugas dan cadangan yang akan bertugas malam hari.

Namun arahan secara khusus oleh kanit Patroli terhadap konsignes atau penugasan patroli (kunarto 1997), meliputi: sasaran patroli, cara bertindak, pesan

kamtibmas terhadap masyarakat, hampir tidak pernah diberikan, termasuk mengecek perlengkapan petugas patroli baik kendaraan, maupun kelengkapan lain seperti birgol, HT, sirene, alarm, kecuali ada kejadian yang istimewa atau sasaran selektif, seperti aksi unjuk rasa dan mogok kerja di salah satu perusahaan (catatan lapangan). Hal ini menunjukkan tidak tertatanya secara baik arahan dan penugasan yang dilakukan oleh pimpinan Polsekta Jatiuwung, sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan patroli.

Dengan demikian briefing dan penugasan merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan kegiatan patroli. Menurut Kunarto (1997) pemberian petunjuk ini biasanya akan berkembang kearah diskusi dua arah. Sehingga akan berguna bagi Kapolsekta maupun Kanit Patoli untuk mengetahui hambatan dan kendala anggota, serta mendapat masukan dari anggota yang kemudian disepakati untuk dilaksanakan.

4.1.2.3 Pelaksanaan Patroli Polsek Jatiuwung

Setelah beberapa langkah di atas dilaksanakan, petugas patroli diberangkatkan ke daerah sasarannya masing masing sesuai dengan beat yang telah disusun. Setiap anggota terlebih dahulu dilengkapi dengan surat perintah, kendaraan patroli, alat komunikasi dan buku laporan hasil patroli, hal ini telah sesuai dengan Skep Kapolri No.Pol: Skep/49/TV/2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli dan Peraturan Kababinkam Polri No.11 tahun 2009 tentang patroli sebagai tahap persiapan patroli.

Idealnya dalam pelaksanaan patroli, setiap regu menjelajahi route pada beat Patroli masing masing dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Hal itu dilakukan agar memudahkan pengawasan terhadap daerah yang dilaluinya. Dan anggota patroli dilarang keluar dari route yang telah ditentukan. Sedangkan *check point* mereka adalah tempat-tempat yang menimbulkan sumber ancaman dan memerlukan kehadiran polisi, seperti kawasan pemukiman, pasar, pusat perbelanjaan, pabrik, dan tempat keramaian umum, sering terjadi kejahatan selain itu mereka juga melakukan kegiatan sambang kepada tokoh masyarakat, pos satpam, dan pangkalan ojek. Selanjutnya berhenti dan menegur seorang yang

mencurigikan dan berkumpul secara tidak wajar, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memelihara kamtibmas.

Namun, masih ditemukan beberapa petugas patroli yang melaksanakan di luar route patroli, mereka berkumpul dalam satu titik dan melakukan aktivitas sendiri. Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolseta Jatiuwung (16 Februari, 2010) “saya pernah menemukan petugas seperti itu, saya memberikan teguran secara lisan, dan teguran itu akan meningkat apabila mereka lakukan kembali.” Selain itu kegiatan samping yang mereka lakukan, akan tetapi mereka hanya mendatangi orang-orang yang bisa memberikan uang bensin atau makan, sedangkan masyarakat lain luput dari perhatian mereka. Sehingga masih ada deskriminasi pelayanan antara yang memberi sesuatu dan tidak. Dengan demikian pelaksanaan patroli masih belum sesuai dengan konsep patroli yang dikeluarkan Polri.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan patroli bukan sekedar menjelajahi sasaran dan route patroli, namun diperlukan kemampuan atau skill dibidangnya. Menurut Hadiman (2009) ada tiga kemampuan dasar yang harus dimiliki petugas Polri: 1) kemampuan dasar kepolisian, yaitu kemampuan melihat, mendengar, dan menjelaskan; 2) kemampuan teknis dasar kepolisian pada penanganan TKP pada tingkat 2; dan 3) kemampuan managerial. Kaitannya dengan patroli maka setiap petugas dalam melaksanakan patroli harus melakukan pengawasan terhadap objek dan sasaran patroli sebagai kemampuan melihat, menanyakan kepada sasaran patroli apakah ada gangguan yang memerlukan bantuan polisi sebagai kemampuan mendengar, melihat sesuatu yang mencurigikan disertai dengan tindakan kepolisian merupakan kemampuan menjelaskan.

4.1.2.4 Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Patroli Polsekta Jatiuwung

Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan patroli dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Terry (1986) pengawasan merupakan pekerjaan untuk meneliti apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mencapai sasaran. Maka dari itu laporan patroli diberikan kepada setiap petugas patroli difungsikan

sebagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap petugas patroli. Setiap anggota patroli diwajibkan mengisinya berdasarkan temuannya selama patroli, hal ini berguna sebagai masukan kepada pimpinan, untuk bisa menentukan langkah selanjutnya.

Pengawasan dan pengendalian lainnya, yaitu melalui alat komunikasi HT, hal ini untuk memudahkan pengawasan terhadap petugas patroli untuk mengetahui dimana posisi dan jika ada kejadian yang insidental, dengan cepat dan mudah digerakan. Kendati demikian berdasarkan temuan penelitian, nampak kurangnya kesadaran dari anggota patroli, buku laporan patroli mereka masih kosong, dengan alasan lepas dinas, dan belum sempat mengisi. Padahal seharusnya pada saat pelaksanaan patroli itu mereka mengisi setiap temuan dan kegiatannya. Melihat alasan petugas ini, dimungkinkan pengisian laporan patroli dikerjakan pada saat sebelum penyerahan laporan kepada Kanit patroli maupun kepada Kapolsek, padahal laporan tersebut dibuat menggunakan tulisan tangan.

Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian apapun tidak akan berhasil tanpa ada kerja sama dari anggota. Maka saya sependapat dengan Hadiman (2009) setiap anggota Polri harus mempunyai kemampuan managerial, artinya kemampuan managerial bukan diperuntukan pada tataran Kapolsek maupun Kanit, petugas sendiri harus mempunyai kemampuan itu untuk mengelola dirinya sendiri agar pelaksanaan tugas dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Selain itu pengawasan dan pengendalian yang perlu dikembangkan menciptakan suatu cara yang dapat memberdayakan dan membuat Kepala Unit dan regu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tugas Patoli. Sebagaimana dalam teori fixing broken Windows dengan cara mengadakan rapat-rapat dan strategi penanggulangan kejahatan, hal itu berguna sebagai laporan dan meningkatkan perhatian para petugas untuk bertanggung jawab terhadap tugas mereka serta sebagai sarana analisa dan evaluasi kinerja patroli dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kunarto 1997).

4.2 Analisis Pelaksanaan Patroli dalam Mencegah kejahatan dan Kendala yang Dihadapi

Pola-pola penyelenggaraan Patroli yang diterapkan oleh Polsekta Jatiuwung dengan sistem beat diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan. Konsep Patroli dengan sistem beat sebenarnya telah meliputi seluruh titik kerawanan di wilayah Polsekta Jatiuwung, dimulai dari pemukiman, pasar, lembaga negara, pusat perbelanjaan, perusahaan dan pabrik, dan objek vital serta tempat-tempat keramaian umum. selain itu Kapolsekta sebagai pimpinan Polsekta Jatiuwung telah mengarahkan Kanit Patroli sekaligus anggotanya, untuk melaksanakan patroli berdasarkan kelender kamtibmas yang terjadi. Artinya setiap route dan sasaran patroli dalam masing-masing beat yang rawan kriminalitas agar lebih intensif dilakukan patroli, dengan menggunakan patroli dialogis yaitu komunikasi dan sambang kemasyarakat dengna menyampaikan pesan kamtibmas.

Sebagaimana dalam teori CPTED Oscar Newman dalam Hadiman (2009) pengawasan lingkungan terhadap pemukimanm pabrik dan tempat lain yang menimbulkan *police hazard*, sehingga membatasi ruang gerak para pelaku tindak pidana. akan tetapi pengawasan terhadap lingkungan itu apabila dilaksanakan dengan baik akan mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian secara berturut-turut trend tindak kejahatan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2010 terajadi kenaikan dan penurunan tindak kriminalistas di Polsekta Jatiuwung. Yaitu : pencurian kendaraan bermotor pada Januari 18 kasus, meningkat pada Februari 24 kasus, dan menurun pada Maret menjadi 12 Kasus; pencurian pemberatan Januari 4 Kasus, meningkat pada Februari 9 kasus, dan pada maret tetap 9 Kasus; penganiyaan pada Januari 5 kasus, meningkat pada Februari 7 kasus, dan menurun pada Maret 4 Kasus; Narkobapada Januar 1 Kasus, tetap pada Februari 1 kasuss, dan meningkat pada Maret 3 kasus; pencurian dengan kekerasan pada Januari 2 kasus, menurun pada Februari 1 kasus, dan nihil pada Maret, dan kebakaran hanya terjadi pada bulan Januari.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan patroli yang saat ini dilaksanakan oleh Unit Patroli Polsek Jaitiuwung, apakah patroli dengan pengawasan terhadap lingkungan itu telah mencegah kejahatan?. Sepintas, secara kuantitas pada Januari unit patroli tidak dapat mencegah kejahatan pencurian kendaraan

bermotor, karena berdasarkan data kriminalitas pada Februari ada kenaikan tindak kriminalitas itu, namun pada Maret patroli dapat dikatakan mencegah kejahatan dengan menurunnya kejadian pencurian kendaraan bermotor, dan begitu seterusnya.

Sementara itu, secara kualitas penurunan dan kenaikan tindak kejahatan itu, apakah disebabkan oleh kegiatan patroli?. Merujuk teori CPTED Oscar Newman dalam Hadiman (2008) untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan anacangan situasional degan disain lingkungan yang mempunyai empat prinsip: pembagaian area, pengawasan lingkungan, citra, dan lingkungan. Pelaksanaan tugas patroli telah mempunyai pembagaian area dengan sistem beat, akan tetapi pengawasan terhadap lingkungan yang dilakukan petugas patroli kurang optimal. Berdasarkan hasil penelitian pola patroli yang dilaksanakan oleh petugas patroli tidak berubah dari waktu kewaktu setiap harinya, peralatan yang digunakan untuk mencegah kejahatan, seperti blanko teguran simpatik tidak pernah digunakan lagi sejak pergantian Kapolsek. Padahal blanko simpatik ini bisa mengingatkan seseorang agar tidak lalai dalam mengamankan harta dan benda milik dirinya sendiri. maka dari itu turun dan naiknya tindak kriminalitas. Selain itu kegiatan sambang dan komunikasi untuk menyampaikan pesan kamtibmas terhadap masyarakat tidak dilakukan. Nampaknya saat ini pelaksanaan patroli tidak ada korelasi dengan pencegahan kejahatan.

Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan peran patroli untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat sesuai dengan trend kriminalitas yang terjadi. Seperti pada kasus pencurian kendaraan bermotor, pesan kamtibmas untuk menghimbau dan mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk memasang kunci ganda, alarm, dan pada lingkungan perumahan komplek menghimbau sistem keamanan menggunakan CCTV pada titik-titik tertentu untuk menciptakan kesan yang teratur dan tertata baik. Walaupun pernyataan Kanit Patroli menyatakan hal itu pernah dilakukan, namun berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis tidak menemukan.

Namun jika hal itu dijalankan dan dioptimalisasikan dalam pelaksanaan patroli, lama-kelamaan akan menciptakan keteraturan. Masyarakat akan bosan dengan teguran dan himbauan dari polisi setiap harinya, yang pada akhirnya

menimbulkan kesadaran masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap mengurungkan niat pelaku untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana dalam teori *fixing broken windows* ketidaktertiban berhubungan dengan kejahatan, maka hal-hal sekecil apapun harus menjadi perhatian guna mencapai tujuan dan sasaran patroli untuk mencegah kejahatan. Karena suatu lingkungan yang tertata baik akan menimbulkan kesan atau citra menakutkan bagi pelaku kejahatan. Selain itu memfungsikan ruang kosong dan bangunan yang tidak digunakan, dengan melakukan pemeriksaan terhadap berkumpulnya orang yang dicurigai akan melakukan kejahatan, dengan cara menynergikan program patroli terpadu agar dapat memaksimalkan peran patroli untuk mengisi ruang-ruang yang kosong, dalam hal ini tempat yang tidak terjangkau oleh patroli Polsekta Jatiuwung.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan patroli untuk mencegah kejahatan, terletak pada faktor manusia dan sarana prasarana pendukungnya. Faktor manusia diantaranya.

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kapolsekta maupun kanit patroli kurang optimal, yang dikuatkan dengan temuan penelitian, anggota patroli tidak mengisi buku atau laporan patroli pada waktunya. Hal itu menunjukkan lemahnya kontrol yang diberikan pimpinan terhadap petugas patroli.
2. Kurangnya pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) tentang patroli. Hal ini dikuatkan hasil wawancara dimana mereka tidak tau tentang konsep patroli dan tata cara melakukan patroli. Selain itu mereka tidak memiliki pedoman tentang patroli yang dikeluarkan Polri, yang memiliki hanya pada tataran kapolsek dan kanit.
3. Motivasi dan moral anggota yang kurang baik, pelaksanaan patroli diaologis dimanfaatkan oleh anggota untuk mencari uang bensin dan uang tambahan untuk dibawa pulang kerumah. Yang mana berdasarkan temuan penelitian sambang dan komunikasi hanya dilaksanakan ketempat atau tokoh-toakoh yang dapat memberi imbalan.

Sedangkan faktor sarana dan prasarana.

1. Tidak ada pendistribusian tentang buku patroli terhadap anggota, sehingga berpengaruh terhadap pengetahuan dan kemampuan anggota dalam penyelenggaraan tugas patroli.
2. Dana anggaran patroli yang dikeluarkan oleh Polri, belum cukup memadai, walaupun Kapolsek telah membantu dengan mensubsidi bensin dinas Kapolsek untuk kegiatan patroli. Hal itu dikarenakan: 1) jumlah wilayah yang meliputi 3 kecamatan, 2) jumlah kendaraan tidak dimbangi dengan peningkatan dana bahan bakar.
3. Tidak ada dana tersedia untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan patroli, sehingga hal ini memacu anggota untuk mencari dukungan dana diluar dinas, yang mempengaruhi pelaksanaan patroli.

4.3 Analisis Pemolisian Masyarakat Melalui Kegiatan Patroli

Pemolisian masyarakat adalah sebuah istilah model pemolisian yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial dan keamanan masyarakat dalam komunitasnya. Model pemolisian ini adalah penyeimbang antara model reaktif dan proaktif dan model pemolisian dengan pendekatan *problem solving* yang dilakukan melalui kemitraan dengan penentu kebijakan lainnya dalam upaya mencari akar permasalahan (Reksodiputro 2004). Caranya: 1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial terutama yang menyangkut masalah keamanan; 2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan gangguan kriminalitas; 3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*), 4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan menurut Suparlan (2004c, hlm. 133) ukuran penilaian bagi keberhasilan pemolisian komuniti adalah “tidak adanya tindak kejahatan atau kerusuhan sosial di dalam komuniti dan kelurahan tempatnya bertugas.”

Model pemolisian masyarakat ini telah diterapkan di institusi-institusi kepolisian di berbagai Negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). model pemolisian ini mengadopsi sistem koban yang diterapkan di Kepolisian negara Jepang, yang mempunyai sejarah dan bentuk khas model partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungannya atau

disebut dengan istilah Koban (Dwilaksana 2009). Menurut Chrysnanda (2009, hlm. 194-210) Koban dalam bahasa Jepang berarti “kotak terbuka” berasal dari 2 suku kata, Ko berarti “Bergiliran” dan “Ban” berarti penjagaan. Secara harfiah Koban berarti penjagaan atau pengawasan secara bergantian. Jepang memulai *community policing* dengan sistem Koban pada masa Meiji, Sekitar 110 tahun yang lalu, koban pada dasarnya adalah sebuah kantor pos polisi di bawah kantor polisi (Polres) pada sistem Kepolisian Jepang. Koban menjadi bagian terdepan dalam melaksanakan tugas Kepolisian selama 24 jam. Koban ditempatkan di pusat keramaian dan diperumahan warga serta di depan fasilitas umum, seperti di depan stasiun kereta api, taman umum, dan gedung pemerintahan atau pusat usaha (toko, hotel , dan lain-lain).

Istilah Koban telah digunakan sejak masa pemerintahan Shogun, yang mana pada masa itu pemerintah menempatkan Koban pada setiap pintu gerbang kediaman para Shogun. Koban pada masa itu berupa bangunan kecil yang digunakan sebagai kantor oleh para pengawal/ksatria atau samurai untuk melakukan penjagaan. Para ksatria atau Samurai berjaga bergantian untuk menjaga keamanan tempat itu. Pada tahun 1874 atas saran beberapa tenaga ahli Rusia Koban digunakan kembali untuk memata-matai kegiatan rakyat atau kelompok oposisi pemerintah. Demi kepentingan itulah pada masa itu dibangun sekitar 15.000 Koban diseluruh wilayah Jepang (Dwilaksana 2009, hlm. 190)

Setelah mengalami kekalahan dalam perang dunia ke II pada tahun 1945, Jepang mulai membangun prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Pemerintah menghapuskan keberadaan kekuatan militer dan menggantinya dengan Pasukan Bela Diri serta mengganti sistem Hukum Eropa Kontinental dengan sistem Hukum Anglo Saxon. Hal ini berimplikasi pula pada bidang kepolisian. Pemerintah Jepang melakukan reformasi struktur dan misi Kepolisian dengan membangun suatu Kepolisian yang berdiri di atas prinsip prinsip demokrasi, yang meliputi tiga substansi pokok yaitu (1) melakukan reorganisasi dari bentuk Kepolisian terpusat menjadi Kepolisian pemerintahan (2) Mendirikan Komisi Keamanan Umum (3) Mengurangi kekuasaan administratif Kepolisian yang terlalu besar. Chrysnanda, (2009;191)

Lebih lanjut menurut Dwilaksana (2009) penerapan *community policing* di Jepang dengan mengedepankan Koban sebagai ujung tombak Kepolisian berangkat dari pengalaman negara tersebut yang memiliki sistem militeristik pada penyelenggaraannya di masa lalu. Budaya Samurai yang sangat militeristik pada Kepolisian Jepang pada masa lampau disadari tidak efektif untuk memerangi kejahatan. Sistem perpolisian yang muncul dari konteks budaya Samurai ini tidak mengakomodir peran serta masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan sistem baru yang lebih cocok dan efektif.

Koban dan Chuzaisho (Pos polisi seperti Koban yang berada di wilayah perkampungan atau pedesaan) menjadi basis yang efektif bagi kegiatan polisi dalam kerjasama dengan masyarakat karena dengan kehadiran mereka ditengah-tengah masyarakat dan sifatnya yang bertanggung jawab terhadap kehidupan warganya sehari-hari dengan waktu beroperasi 24 jam, membuat mereka mampu memahami kebutuhan-kebutuhan penegakkan hukum, menyelesaikan masalah dan menyebarkan informasi pencegahan kejahatan kepada warga di lingkungannya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Chuzaisan (petugas Chuzaisho) dibantu oleh istrinya, yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat seperti menerima dan mencatat laporan serta identitas pelapor, menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat baik yang datang langsung maupun melalui telepon serta memberikan saran-saran kepada anggota masyarakat yang datang untuk berkonsultasi. Akan tetapi bila masalah yang dikonsultasikan adalah masalah kejahatan, hal itu tetap menjadi tugas suaminya.

Fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan oleh Koban diantaranya adalah : (a) penangkapan dan pencegahan; (b) investigasi tindak kejahatan ringan tertentu dan investigasi kecelakaan; (c) menjaga hubungan baik dengan warga; (d) Kunjungan ke rumah. Hal itu bertujuan untuk: 1) berkenalan; 2) mendapatkan informasi (keluarga); 3) mendapatkan opini masyarakat; 4) mendapatkan informasi mengenai kebutuhan/ masalah berkaitan dengan penegakan hukum; 5) mendapatkan informasi mengenai kegiatan penjahat; 6) pertemuan dengan masyarakat; 7) kelompok-kelompok penyelesain masalah; (8) menyebarkan informasi mengenai pencegahan kejahatan; dan 9) Mencari dukungan/partisipasi masyarakat dalam kontrol masyarakat.

4.3.1 Implementasi Pemolisian Masyarakat Melalui Patroli

Pemolisian masyarakat melalui kegiatan patroli melekat pada kegiatan yang dilakukan oleh patroli Polsekta Jatiuwung. Sebagaimana telah dirumuskan Polri, tujuan patroli (Dwilaksana 2009): a) penampakan kesiap-siagaan dan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat; b) Pencegahan bertemunya niat dan kesempatan (N+K) yang memungkinkan timbulnya kriminalitas; c) pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas; d) pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat; e) diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas; dan f) Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Maka dari itu Patroli sebagai ujung tombak (*backbone*) pelayanan keamanan terhadap masyarakat dalam struktur organisasi Polri ada di tingkat Polsek yang mempunyai batas wilayah administrasi tingkat kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan. Dalam menjalankan fungsinya polisi ditingkat Polsek akan lebih berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurut Dwilaksana (2009, hlm. 281), pemolisian ditingkat Polsek merupakan wadah dalam memelihara dan menjaga Kamtibmas yang banyak berhubungan dengan masyarakat lapisan bawah, dan gangguan-gangguan Kamtibmas yang terjadi biasanya berupa kejahatan jalanan (*street crime*) yang meresahkan dan membuat ketakutan. Dan pemolisian pada tingkat Polsek menjadi penting peranannya dalam membangun citra polisi yang baik melalui pemolisian komunitas.

Patroli Polsekta Jatiuwung telah melaksanakan pemolisian komunitas. Diantaranya: menempatkan patroli polisi dengan sistem beat yang mencakup tempat umum dan rawan kamtibmas, mempunyai perlengkapan patroli seperti HT, tongkat, sirine, borgol, apil, kantung mayat, dan *police line*. Selain itu unit patroli telah menunjukkan kecepatan reaksi dalam mendatangi TKP, dan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengatasi kemacetan dan melayani masyarakat. Namun dalam konteks pendekatan kepada masyarakat agar menjadi sahabat polisi kurang optimal, sebagaimana telah disebutkan di atas, hanya orang dan tempat tertentu yang mereka kunjungi dan sambangi.

Padaahal, menurut Dwilaksana (2009) penerapan pemolisian di tingkat Polsek sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat

diantaranya adalah melalui pemberdayaan patroli polisi. Dengan menciptakan kedekatan polisi dengan masyarakat yang bisa menjadi simbol persahabatan (antara polisi dengan masyarakat). Hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan perondaan di daerah pemukiman atau tempat umum, melakukan kunjungan atau sambang kepada warga komunitas secara bergiliran atau yang menjadi prioritas, dan melakukan komunikasi, serta membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat (memberi petunjuk jalan atau tindakan lain).

Karena strategi kepolisian untuk memerangi kejahatan dirasa tidak efektif, maka muncul model pemolisian komunitas. Pemolisian komunitas dilakukan dengan strategi dimana polisi bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat, selalu mencari cara-cara yang lebih efektif dalam rangka mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas (Friedman 1992). Hal itu diabsahkan oleh Trojanowitz dan Bucqueroux (1998) tujuan pemolisian komunitas adalah terwujudnya kerjasama yang baik antara polisi dan komunitas komunitas di masyarakat yang bersifat sejajar, guna menanggulangi ketidaktertiban dan mencegah kejahatan. Sehingga model pemolisian ini dapat memecahkan masalah dan mencegah gangguan terhadap keamanan dari komunitas itu sendiri.

4.3.2 Pemolisian Masyarakat dan Patroli untuk Mencegah Kejahatan

Ada dua model pemolisian di dunia yaitu konvensional dan modern, model pemolisian konvensional dalam praktiknya lebih bersifat menunggu dan reaktif serta lebih menekankan penegakan hukum dalam aplikasinya di lapangan. Sedangkan dalam model pemolisian komunitas, polisi dituntut untuk lebih aktif berupaya menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi (*problem solving*). Aspek pendekatan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan sumber daya manusia lebih diprioritaskan terhadap semua komponen masyarakat yang menjadi tanggung jawab tugasnya.

Kunci dari model pemolisian masyarakat keterbukaan dan aspek pencegahan kejahatan lebih diutamakan. Menurut Bayley (1994) untuk mencegah kejahatan ada empat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu konsultasi, adaptasi, mobilisasi, dan pemecahan (*problem solving*). Konsultasi adalah pertemuan teratur antara polisi dengan warga masyarakat untuk melakukan pertukaran

informasi mengenai masalah kamtibmas. Maka dari itu pelaksanaan patroli oleh Polsekta Jatiuwung, bukan berdasar pada pencapaian sasaran pada setiap check point yang ditentukan, melainkan difokuskan kepada berapa jumlah orang pada setiap check pointnya yang dapat diajak berkomunikasi. Karena semakin jauh polisi dan masyarakat, maka semakin tertutup mereka membeikan informasi yang diperlukan polisi, jika sebaliknya maka informasi dengan dendirinya akan mengalir kepada polisi yang memungkinkan bisa membantu dalam menegah kejahatan. sebagaimana dikemukakan Hadiman (2009) ada sebuah dalil siapa yang menguasai informasi maka akan handal di tempat tugas.

Adaptasi, Bayley (1994) mengemukakan mendelegasikan keputusan kepada satuan terdepan kepolisian yang berhubungan dengan masyarakat. hal ini diberikan maupaun tidak diberikan setiap anggota telah diberi kewenangan diskresi kepolisian. Menurut Walker dalam Barker (1994) diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri". Sedangkan Kenneth Davis dalam Bayley (1994, hlm. 54) mendefinisikan diskresi "*the capacity of police officer to select from among a number of illegal courses of action or inaction while performing their duties.*"

Hal ini dapat diartikan bahwa diskresi kepolisian sebagai kapasitas petugas polisi untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaian sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan itu, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas patroli, maka setiap petugas patroli dapat menggunakan kreatifitas dan inovasinya untuk beradaptasi dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, asalkan tidak bertentangan

dengan kode etik profesi Kepolisian dan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Mobilisasi, Bayley (1994) mengemukakan upaya polisi agar masyarakat dapat berpartisipasi membantu polisi menangani masalah kamtibmas. Untuk meningkatkan hal itu memerlukan waktu yang lama, tetapi dimulai dari sekarang dengan bersikap santun; memperkenalkan diri kepada masyarakat, menukar alamat rumah dan telepon serta mencatatnya dalam catatan maupun buku telepon; respon terhadap setiap keluhan masyarakat, dan menjalin komunikasi yang baik akan tercipta situasi keakraban dan keharmonisan, serta akan terjadi komunikasi dua arah. Setelah itu, polisi dapat menyampaikan pesan kamtibmas tentang keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan akan tercipta apabila ada sinergi dan integrasi antara polisi dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsepsi dari harapan dan tujuan dari pemolisian masyarakat dalam mencegah kejahatan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemecahan masalah, menurut Bayley (1994) analisa terhadap berbagai kejahatan dan masalah terjadi. Hal ini juga berkaitan dengan diskresi kepolisian, apabila terjadi permasalahan di masyarakat yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka petugas patroli mengupayakan menyelesaikan masalah itu dengan tidak menggunakan projustitia, melainkan bertindak sebagai mediator untuk menjembatani dan menyelesaikan masalah itu bersama-sama masyarakat. Sehingga esensi dari pemolisian masyarakat yang mendopsi model koban akan terwujud. Masyarakat akan percaya, polisi lah yang dapat menyelesaikan permasalahan warganya, dan bukan sebaliknya memperkeruh dan mempersulit proses penyelesaiannya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan kegiatan patroli dan pemolisian melalui Polsekta Jatiuwung untuk mencegah kejahatan memerlukan manajemen patroli yang baik. Sebagaimana dikemukakan Hadiman (2009) untuk menciptakan keamanan memerlukan manajemen yang baik, hal ini dapat dicapai apabila dikerjakan benar dan mengerjakannya benar. Selain itu dalam mencegah kejahatan, Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat, sehingga kerja sama antara polisi dan masyarakat menjadi faktor yang penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu berdasarkan analisis tesis ini akan diuraikan kesimpulan dan rekomendasi tentang pelaksanaan Kegiatan Patroli dan pemolisian melalui Patroli Polsekta Jatiuwung untuk mencegah kejahatan, berikut ini,

5.1 Kesimpulan

Pertama, penyelenggaraan manajemen patroli Polsekta Jatiuwung kurang baik. Hal itu ditunjukkan oleh perencanaan yang dilakukan hanya berdasarkan kepada beat patroli yang telah dibuat, tanpa memperhatikan trend dan dinamika kriminalitas yang terjadi. Kemudian pengorganisasian petugas patroli hanya membagi tugas patroli dengan menggunakan Roda 4 (mobil) yang sedikit sekali memberikan ruang bagi pengawasan wilayah patroli dan interaksi antara petugas dengan masyarakat di wilayah tugasnya, sedangkan patroli roda 2 dan patroli jalan kaki tidak dilakukan pengorganisasian.

Selanjutnya pelaksanaan patroli oleh petugas hanya mengejar pencapaian sasaran dan *check point* beat patroli, tanpa memperhatikan kualitas patroli. Artinya petugas patroli tidak melakukan pengawasan terhadap daerah patrolinya, melihat dan mendengar keluhan masyarakat, melainkan hanya sekedar mengelilingi wilayah patrolinya. Selain itu patroli dialogis dimanfaatkan mengunjungi orang-orang atau tempat yang dapat memberikan keuntungan materiil seperti uang bensin dan uang makan. Sehingga pelaksanaan patroli tidak sesuai dengan konsepsi patroli Polri, yaitu Skep Kapolri No.Pol:

Skep/49/IV/2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli maupun Peraturan Kababinkam Polri No. 11 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Patroli.

Sementara itu pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pimpinan Polsekta Jatiwang menunjukkan kurang optimal. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian, buku laporan patroli sebagai sarana kontrol tidak setiap hari tidak dilakukan pengecekan, sehingga anggota mengisi laporan itu ketika ditanyakan atau diminta oleh pimpinannya.

Kedua, patroli yang dilakukan oleh Polsekta jatiwang tidak dapat mencegah kejahatan. Hal ini dikuatkan hasil penelitian kenaikan dan penurunan tindak kriminalitas tidak ada korelasinya dengan penyelenggaraan patroli, karena pola dan cara patroli yang dilakukan pada bulan itu sama, sedangkan sarana untuk pencegahan kejatan meliputi blanko teguran simpatik, sambang, dan komunikasi, serta penyampaian pesan kamtibmas tidak pernah dilakukan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam patroli terdiri dari dua faktor yaitu faktor manusia serta sarana dan prasana. Faktor manusia anggota tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang patroli, mereka hanya ditempatkan dan bertugas hanya berdasarkan pengalaman. Sedangkan sarana prasarana anggota tidak memiliki buku panduan patroli, tidak ada kesesuaian antara jumlah bahan bakar, jumlah kendaraan, dan luas wilayah.

Ketiga, pelaksanaan pemolisian masyarakat melalui kegiatan patroli kurang optimal, dalam hal ini proses komunikasi antara petugas patroli dengan masyarakat. Sehingga petugas patroli sulit untuk mendapatkan informasi mengenai gangguan kamtibmas untuk mencegah kejahatan, karena tidak adanya komunikasi dua arah antar masyarakat dan polisi atau sebaliknya. Hal ini membuktikan polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Dan sebaliknya apabila polisi dan masyarakat sinergi dan integratif dalam menjaga kamtibmas, maka pencegahan kejahatan dapat di optimalisasi.

5.2 Rekomendasi

Atas kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat direkomendasikan dalam pencapaian tujuan patroli untuk mencegah kejahatan yaitu :

1. Mengaktifkan jenis Patroli Jalan Kaki dan Patroli Bersepeda. Kedua jenis patroli diyakini tidak hanya mampu menghilangkan kesempatan bagi para pelaku kejahatan, kedua jenis patroli ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kejahatan di lingkungannya masing-masing.
2. Mengadakan pelatihan bagi para petugas patroli untuk internalisasi filosofi dan peningkatan kemampuan para petugas termasuk kemampuan berkomunikasi dalam pelaksanaan tugas patroli.
3. Mengubah pendekatan tugas dari patroli yang bersikap reaktif menjadi aktif dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam mencegah kejahatan sesuai kebutuhannya, Untuk itu Unit Patroli harus mempunyai program kegiatan pencegahan kejahatan yang dirancang sesuai kebutuhan keamanan masyarakat dan disusun secara matang dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat setempat.
4. Pemberlakuan kewajiban pelaporan bagi para petugas patroli pasca pelaksanaan tugas sebagai salah satu teknik pengendalian.

DAFTAR REFERENSI

- Bailey, William G. (1995). *The encyclopedia of police science*. Newyork: Garland Publishing.
- Bayley, David H (1998). *Police for the future*. (Saduran oleh Kunarto dan NKM Arief Dimiyati Polisi Masa Depan, Jakarta; Citpa Manunggal,
- Baker, Thomas and Carter, David L.(1999). *Police deviance*, Terjemahan Kunarto, Jakarta.:Cipta Manunggal,
- Dermawan, M. K. (1994). *Strategi pencegahan kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djamin, A. dkk (1992). *Manajamen sumber daya manusia, kontribusi teoritis dalam meingkatkan kerja organisasi*. Bandung: Syanyata Sumansa Wira Sespim Polri
- Dwilaksana, Chryshnanda. (2009). *Menjadi polisi yang berhati murani*. Jakarta: YPKIP
- _____. (2009). *Polisi penjaga kehidupan*. Jakarta :YPKIK
- Finlay, Mark and Zvekic, Ugljesa. (1993). *Alternative policing styles, cross-cultural Perspective*. (Kunarto, Penerjemah). Jakarta: PT.Cipta Manunggal.
- Friedman, Robert (1992). *Community policing*. (Kunarto, Penrjemah). Jakarta PT.Cipta Manunggal.
- Hadiman.(2008). *Manajemen sekuriti*. Diklat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____. (2009). *Manajamen Operaional Polri*. Diktas, PTIK, Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kelana, Momo. (1994). *Hukum kepolisian*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia..
- Kelling, George L & Catherine M. Coles. (1998). *Fixing broken Windows*. (Kunarto , Penerjemah). Jakarta: PT Cipta Manunggal.
- Kunarto (1997). *Perilaku organisasi Polri*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal,
- Moleong, Lexi J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad F dan Djaali. (2005). *Metodologi penelitian sosial (Revisi)*. Jakarta: PTIK Pres dan Restu Agung.

- Murbowo, Edy. (2003). *Manajemen Patroli Polsek Metro Mampang Prapatan dalam rangka memelihara Kamtibmas*. Tesis tidak terbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Panglaykim dan Hazil. (1960). *Manajemen suatu pengantar*. Jakarta: Pembangunan Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2001). *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas,
- Reksodiputro, Mardjono (2005). Ilmu kepolisian dan perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Kepolisian Indonesia*, 7 Juli: 24—15.
- Siagian, Sondang P. (1996). *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sitompul, DPM. (2005). *Tugas dan wewenang Polri*. Jakarta: CV. Aoudie.
- Suparlan, Parsudi (1997). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI.
- _____. (2004a). *Hubungan antar suku bangsa*. Jakarta: YPKIK.
- _____. (2004b). Ilmu kepolisian dan dinamika Masyarakat. Dalam P. Suparlan (Ed). *Bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- _____. (2004b). Polisi dan fungsinya dalam masyarakat. Dalam P. Suparlan (Ed). *Bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Terry, G.R (1986). *Asas-asas Manajemen*. (Winardi, Penerjemah). Bandung: Alumni 1986.
- Trojannowicz, R. Dan Bucqueroux, B. (1998). *Community policing how to get started*. Cincinnati: Anderson Publishing Co.
- Williams, C. (2001). *Manajemen*. Jakarta: Salemba 4.

Pedoman Wawancara

Kegiatan Patroli Untuk Mencegah kejahatan di Polsekta Jatiuwung

Dalam menggali informasi atas sejumlah pertanyaan penelitian, peneliti berpedoman pada prinsip 4 W (What, Where, Why, When) + 1 H (How)

Berbagai prinsip ditujukan untuk mengenali proses-proses yang berlangsung dalam kegiatan Patroli untuk mencegah kejahatan. Dengan menggunakan pedoman wawancara ini maka instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

I. Kualitas Pelayanan Publik

Merujuk Kep Men PAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)

Identifikasi tentang aspek :

1) Kesederhanaan, 2) Kejelasan, 3) Kepastian, 4) Keamanan, 5) Keterbukaan, 6) Efisiensi, 7) Ekonomis, 8) Keadilan yang merata.

II. Fungsi Manajemen

1. Perencanaan

Identifikasi tentang tugas perencanaan mencakup; (a Undang-undang, penciptaankebijakan, tujuan, standar kerja; (b) Aturan-aturan maupun prosedur yang dikembangkan; (perintah maupun keputusan pimpinan);

(c) pengembangan rencana; (d) prediksi-prediksi; analisis terhadap lingkungan; (e) evaluasi terhadap proses perencanaan.

2. Pengorganisasian

Identifikasi terhadap tugas perencanaan mencakup; (a) pembagian tugas setiap individu; (b) struktur organisasi baik yang mencerminkan aspek fungsional maupun sosial; (c) pendelegasian otoritas; (d) penciptaan garis otoritas dan komunikasi; (e) koordinasi ragam pekerjaan bawahan; (f) evaluasi terhadap efektifitas proses pengorganisasian.

3. Pembinaan

Identifikasi tentang tugas pembinaan yang mencakup : (a) penentuan tipe pekerja yang harus dipekerjakan; (b) seleksi; (c) training dan pengembangan staff; (d) penilaian pekerja; (e) penempatan, pemutasian maupun penyaluran personil; (f) evaluasi

4. Pengawasan

Identifikasi tentang pengawasan mencakup : (a) penetapan standar; (b) inovasi-inovasi dalam pencapaian tujuan; (c) struktur dan corak akuntabilitas; (d) evaluasi kinerja.

5. Identifikasi tentang fungsi teknis operasi mencakup (a) deteksi; (b) preemtif; (c) preventif; (d) reaktif.

III. Jaringan

Identifikasi tentang : (a) kerjasama vertikal dengan kelembagaan yang lebih tinggi; (b) kerjasama horisontal ditingkat komuniti besertakelembagaan yang ada.

IV. Kinerja Organisasi

Identifikasi tentang aspek:

- 1) Produktivitas (input yang digunakan, output yang dihasilkan)
- 2) Kualitas layanan (Kepuasan masyarakat terhadap produk layanan kegiatan)
- 3) Responsivitas (keselarasan antara program kegiatan dengan aspirasi masyarakat)
- 4) Responsibilitas (penerapan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan organisasi dalam implementasi program, mencakup keluhan masyarakat, cara menanggapi keluhan tersebut; Referensi dalam penyelenggaraan kegiatan; penempatan posisi warga dalam kegiatan)
- 5) Akuntabilitas (konsistensi antara kebijakan dan kegiatan organisasi dengan kehendak masyarakat banyak mencakup acuan dalam melakukan kegiatan, tindakan-tindakan yang dilakukan; pertimbangan tentang kepentingan pengguna jasa)
- 6) Sarana dan prasarana yang tersedia.

Pertanyaan Wawancara dengan Individu Warga Komunitas

Nama :

Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Alamat :

- 1) Apakah anda pernah melihat petugas patroli polisi berkunjung ke tempat anda?
- 2) Berapa kali anda melihat petugas patroli berkunjung dalam sebulan
- 3) Berapa kali anda melihat petugas patroli berkunjung dalam seminggu?
- 4) Apakah anda tahu jumlah petugas patroli yang berkunjung ke tempat anda?
- 5) Apakah anda selalu berkomunikasi (masalah keamanan lingkungan) dengan petugas patroli yang berkunjung?
- 6) Apakah anda mengenal nama petugas patroli yang berkunjung ?
- 7) Apakah mereka bersikap ramah?
- 8) Apakah petugas patroli selalu menanyakan tentang masalah keamanan di wilayah anda?
- 9) Apakah petugas patroli selalu memberi pengarahan keamanan kepada anda/warga yang lain di wilayah anda.?
- 10) Apakah anda pernah mengajukan permohonan pengawasan keamanan lingkungan wilayah kepada Petugas patroli polisi?
- 11) Apakah anda tahu ada warga yang lain di tempat anda yang mengajukan permohonan pengawasan keamanan lingkungan kepada polisi
- 12) Apakah anda pernah melihat tindakan keamanan dari Petugas patroli di tempat anda ?
- 13) Apakah anda pernah melihat/mengetahui Petugas patroli yang menegur warga di lingkungan tempat anda?
- 14) Apakah anda pernah melihat/mengetahui ada pelaku tindak kejahatan yang dilepaskan oleh Petugas polisi?
- 15) Apakah anda merasa aman tinggal di tempat anda?
- 16) Apakah anda merasa tempat anda membutuhkan patroli?
- 17) Apakah anda selalu memberi hadiah kepada Petugas patroli atas jasa keamanan mereka?
- 18) Apakah anda selalu tahu kejadian tindak kejahatan di lingkungan anda?
- 19) Apakah anda tahu ada tindak kejahatan yang tidak dilaporkan kepada petugas polisi?

- 20) Adakah pelaku kejahatan yang anda kenali di wilayah anda?
- 21) Adakah Pos Keamanan yang dekat dengan wilayah tinggal anda (Pos Kamling/Satpam)?
- 22) Apakah Pos Kamling itu digunakan dengan baik?
- 23) Apakah anda selalu ikut kegiatan Siskamling?
- 24) Apakah ada Petugas Hansip di wilayah anda ?
- 25) Apakah Petugas patroli pernah berkunjung ke Pos Kamling di wilayah anda?
- 26) Apakah Petugas patroli pernah berkunjung untuk/ bertemu ke ketua RW/RT anda?
- 27) Apakah Ketua RW/RT mengenal anda//sebaliknya ?
- 28) Apakah anda mengenal warga yang lain di lingkungan RW/RT anda?

Pertanyaan Wawancara dengan Petugas Patroli

Nama :

Pangkat /Golongan :

Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

- 1) Apakah tugas pokok anda ?
- 2) Apakah anda melaksanakan tugas anda ?
- 3) Apakah anda merasa melaksanakan tugas sesuai kewajiban ?
- 4) Apakah anda pernah tidak melaksanakan tugas ?
- 5) Apakah anda pernah di beri sanksi oleh atasan karena tidak melaksanakan tugas?
- 6) Apakah atasan anda selalu memberi pengarahan sebelum anda bertugas ?
- 7) Apakah anda selalu paham dengan pengarahan dari atasan anda?
- 8) Apakah anda pernah meminta penjelasan terhadap instruksi yang kurang anda pahami?
- 9) Apakah anda selalu melakukan persiapan sebelum bertugas ?
- 10) Apakah anda selalu mengecek kelengkapan /peralatan patroli anda?
- 11) Apakah atasan anda turut bersama anda dalam tugas patroli ?
- 12) Apakah anda mengenal lingkungan kawasan patroli anda?
- 13) Apakah anda selalu berada di atas kendaraan anda ketika patroli ?
- 14) Apakah anda selalu turun menemui komunitas warga ?

- 15) Apakah anda mengenal baik tempat-tempat rawan kejahatan di kawasan patroli anda?
- 16) Apakah anda hapal jalan-jalan di kawasan patroli anda ?
- 17) Apakah anda mengenal warga di kawasan patroli anda?
- 18) Apakah anda mengenal tokoh warga di tempat patroli anda ?
- 19) Apakah anda selalu berkomunikasi dengan warga di tempat patroli anda?
- 20) Apakah anda merasa selalu bersikap ramah kepada warga?
- 21) Apakah anda selalu mengunjungi tempat-tempat penyelenggaraan keamanan swakarsa di saat patroli?
- 22) Apakah anda pernah mendapat 'hadiah' dari warga atas jasa keamanan yang anda lakukan?
- 23) Apakah anda selalu memprioritaskan warga yang memberi 'hadiah' kepada anda?
- 24) Apakah anda selalu melaporkan hal/situasi yang ganjil/rawan kepada atasan anda? ?
- 25) Apakah anda selalu memberi peringatan kepada warga yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya?
- 26) Apakah anda selalu memberi peringatan kepada warga yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran?
- 27) Apakah anda selalu melakukan tindakan ketika menemukan tippiring
- 28) Apakah anda selalu memberi bantuan kepada petugas polisi yang lain ketika dibutuhkan?
- 29) Apakah anda selalu mencatat informasi yang didapat di kawasan patroli?
- 30) Apakah anda senang dengan tugas patroli anda?
- 31) Apakah ada tugas kepolisian yang lain lebih anda sukai dibanding tugas patroli ?
- 32) Apakah anda melaporkan hasil tugas anda ?
- 33) Apakah anda bangga menjadi petugas patroli ?

Pertanyaan Wawancara dengan Pimpinan Kegiatan Patroli

Nama :

Pangkat /Golongan :

Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

- 1) Apakah tugas pokok anda?
- 2) Apakah anda merasa jumlah petugas patroli di wilayah anda cukup?
- 3) Bagaimana anda mengatur kekurangan personil (jika kurang)?
- 4) Apakah anda merasa perlengkapan dan peralatan penunjang operasional patroli cukup?
- 5) Bagaimana cara anda mengatur kekurangan peralatan tersebut ?
- 6) Apakah anda selalu melaksanakan gelar operasional kegiatan ?
- 7) Apakah anda mengatur pembagian wilayah kegiatan patroli ?
- 8) Apakah anda memprioritaskan kegiatan patroli pada tempat-tempat tertentu ?
- 9) Apakah anda menargetkan sasaran komunitas tertentu pada kegiatan patroli?
- 10) Apakah jenis patroli yang sering dilakukan ?
- 11) Apakah anda selalu mengadakan pertemuan rutin dengan fungsi-fungsi teknis kepolisian?
- 12) Apakah anda membuat program khusus terkait dengan kegiatan patroli di wilayah anda?
- 13) Apakah anda selalu memberi petunjuk kepada bawahan anda?
- 14) Apakah anda selalu memberi saran khusus selain arahan umum kegiatan patroli?
- 15) Apakah anda selalu melakukan pengecekan peralatan petugas patroli anda?
- 16) Apakah anda selalu memberi kesempatan kepada bawahan anda menyampaikan gagasan/pendapat dalam tugas patrolinya ?
- 17) Apakah anda selalu menerima laporan tugas dari bawahan anda?
- 18) Apakah anda membuat dokumentasi laporan kegiatan patroli secara rutin?
- 19) Apakah anda selalu memeriksa kelengkapan dokumen/arsip ?
- 20) Apakah anda selalu mengevaluasi hasil kegiatan unit patroli anda?
- 21) Apakah anda selalu mengoreksi kesalahan bawahan anda ?
- 22) Apakah anda selalu memberikan sanksi atas kesalahan ringan anak buah anda?
- 23) Apakah anda selalu memberi *reward* atau pujian kepada anak buah anda yang melaksanakan tugasnya dengan baik

- 24) Apakah anda selalu mengawasi kegiatan patroli bawahan anda?
- 25) Apakah anda akan selalu menerima 'hadiah' yang diberikan warga atas jasa kegiatan patroli ditempatnya?
- 26) Apakah anda selalu memberi perhatian khusus kepada komunitas tertentu yang dianggap beerpotensi mengganggu keamanan ?
- 27) Apakah anda selalu berkoordinasi dengan stake holders (Muspika,tokoh masy/ormas,tokoh agama, dll) yang lain yang berkaitan dengan kegiatan patrol?
- 28) Apakah anda selalu memperhatikan saran mereka?

Pertanyaan Wawancara dengan Stakeholders lainnya

Nama :

Pekerjaan :

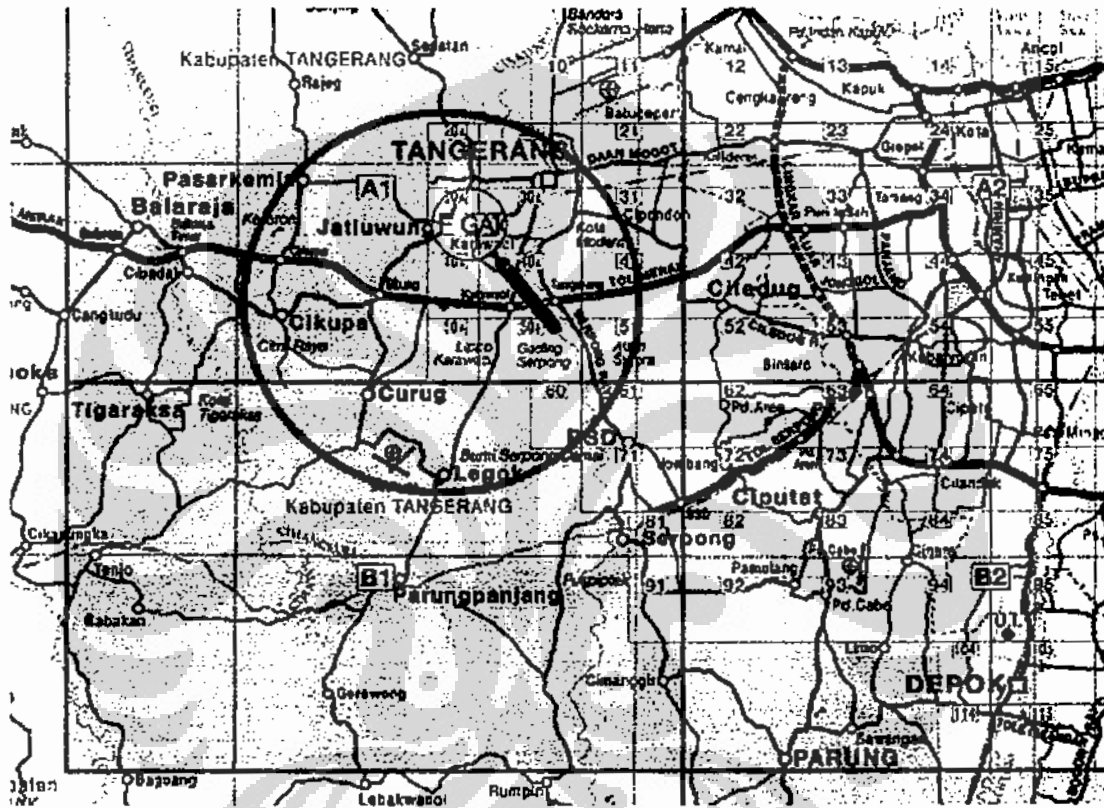
Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Alamat :

- 1) Apakah anda selalu berkordinasi dengan polisi (patroli) dalam permasalahan keamanan lingkungan anda?
- 2) Bagaimana intensitas kunjungan patroli ke tempat anda?
- 3) Apakah anda merasa senang dengan kehadiran petugas patroli di lingkungan anda?
- 4) Apakah anda selalu menyampaikan saran atas permasalahan lingkungan anda kepada petugas polisi(patroli)?
- 5) Apakah saran anda selalu diperhatikan ?
- 6) Apakah anda selalu memberi'hadiah'kepada polisi (patroli) atas jasa keamanannya ?
- 7) Jenis kegiatan patroli apa (jalan kaki, dll) apa yang anda harapkan di lingkungan anda?
- 8) Tindakan petugas patroli seperti apa yang pernah anda saksikan yang anda anggap keliru?

Peta Wilayah Hukum Polsek Jatiuwung



POLRI DAERAH METRO JAYA
RESOR METROPOLITAN TANGERANG
SEKTOR KOTA JATIUWUNG
Jl. Gatot Subroto Km 5 Jatiuwung

DATA NOMINATIF POLSEKTA JATIUWUNG

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	KEJURUAN	KESATUAN	KET
1.	IMAN SETIAWAN,SIK	AKP/ 78071142	Reserse	Kapolsek	
2.	SURADI. AW	AKP/ 55090176	Bimas	Wakapolsek	
3.	M.TAAT RESDIANTO,SH	IPTU/ 84121615	Reserse	Kanit Reskrim	
4.	M.ISA ANSORI, SH	IPTU/ 72060327		Kanit Patroli	
5.	UMI WIBAWANINGSIH	AIPDA/ 70030090		Bataud	
6.	ARIF RACHMAN	BRIPDA/ 78050973		Sda	
7.	SUGIYONO	BRIPKA/ 62060104	Bimas	SPK Pok " A "	
8.	AGUNG. K	BRIPKA/ 68020504		Sda	
9.	ADITYA WICAKSONO	BRIPKA/ 85091026		Sda	
10.	FAREL SARAGIH	AIPDA/ 57060329		SPK"B"	
11.	I. GUSTI PUTU NPN	BRIGADIR/ 78030500		Sda	
12.	SUDIYONO	BRIPKA/ 52100011		Sda	
13.	R. NAINGGOLAN	AIPTU/ 58060885	Lantas	SPK"C"	
14.	NURUL HIDAYAT	BRIPKA/ 84070890		Sda	
15.	M. JAENUDIN	BRIPKA/ 85110109	Serse	Sda	
16.	A. M. YUSUF.S.	AIPTU/ 64070137	Serse	Kateam I Reskrim	
17.	AGUS NURDIN	BRIPKA/ 69080492	Serse	Sda	
18.	I NENGHAH SUKRATA	BRIGADIR/ 80050683		Sda	
19.	ADE MOCH ALI, SH	BRIPKA/ 71050994	Serse	Team II Reskrim	
20.	MATSANI	BRIPKA/ 72100123	Bimas	Sda	

21.	RURI RIYADI	BRIPU/ 84030487		Sda	
22.	HARTONO	AIPTU/ 59110609	Bimmas	Team III Reskrim	
23.	CECEP	BRIPKA/ 72020431		Sda	
24.	ROSYID SUGIMUN,SH	BRIPKA/ 73070595		Sda	
25.	NASTAIN	AIPDA/ 70060094	Intel Lanjutan	Team IV Reskrim	
26.	M. IDRIS	BRIPKA/ 73070432		Sda	
27.	IMAM SANTOSO	BRIPKA/ 75090834		Sda	
28.	B. PANGARIBUAN	BRIGADIR/ 78070745		Team Buser	
29.	LASMIDI	BRIGADIR/ 81080502		Sda	
30.	WILLY RIO HOTUA. FS.	BRIPU/ 84090709		Sda	
31.	PEPEN FADILAH	AIPDA/ 69100197	Brimob	Team Narkoba	
32.	JAYENG UTAMA	BRIPKA / 72110452		Sda	
33.	RETNA TUTUKA . P	BRIPU/ 84030196		Sda	
34.	LUKAS SARJONO	BRIPKA/ 62010367		Unit Intelkam	
35.	AHMAD HOLILI	BRIPKA/ 69010366	Intelkam	Sda	
36.	MOCH AGUNG S	BRIPDA/ 87100646	Intelkam	Sda	
37.	ANGGA HERMAWAN	BRIPDA/ 87031006	Intelkam	Sda	
38.	YAYAN WAHYUDIN	BRIPDA/ 88030307	Intelkam	Sda	
39.	AGUS SETIAWAN	BRIDA/ 88080198	Intelkam	Sda	
40.	SUPARMI	BRIPKA/ 70060262		Staf Intelkam	
41.	M. BUDIARTO	AIPTU/ 53090370	Lantas	Kaunit Lantas	
42.	PURYANTO	BRIPKA/ 67090502	Samapta	Sda	
43.	A. SUMERI	BRIPKA/ 73120804		Sda	
44.	IDRIS	BRIPKA/ 74040517		Sda	
45.	M. DIDIN. K.	BRIGADIR 79010189	Samapta	Sda	
46.	AGUNG WIBOWO,SH	BRIPKA/ 74050183	Lantas	Team I Patko	6401
47.	HANDI RIYADI	BRIPU/ 		Sda	6402

		85070367			
48.	DENNY.M.	BRIPTU/ 85030453		Sda	sda
49.	EKO YULI.S.	BRIGADIR/ 79071287		Sda	6403
50.	BAMBANG SUSENO	BRIPTU/ 84110110		Sda	Sda
51.	JOHAN BAYU S	BRIPTU/ 85030596		Sda	6404
52.	GUSTRI. W.	BRIPTU/ 80080345	Brimob	Sda	Sda
53.	MUJIONO	BRIPKA/ 58050846		Sda	6406
54.	PURWANTO	AIPTU/ 62050385		Sda	6407
55.	RH. PURNIAWAN	BRIGADIR/ 78050850		Team Patko	II 6401
56.	ERWIN SYAHPUTRA	BRIPTU/ 84020864		Sda	Sda
57.	SUWARDI	AIPDA/ 58050846		Sda	6402
58.	GALIH DWI NURYANTO	BRIPTU/ 84100701		Sda	Sda
59.	FERRY EFENDI	BRIPKA/ 75090834		Sda	6403
60.	CATUR HADI.S.	BRIGADIR/ 80050904	Serse	Sda	6404
61.	JAJANG HERMANSYAH	BRIGADIR/ 79020308			6406
62.	M. DONNY PERMANA	BRIPTU/ 86060696		Sda	Sda
63.	SUROSO	AIPTU/ 56050199		Sda	6407
64.	ENDANG SETIAWANTO	BRIPTU/ 72120082		Sda	Sda
65.	AHMAD SAIHU	BRIPTU/ 83091067		Team Patko	III 6401
66.	APIP KOMAR.T.	BRIPTU/ 79100649	Brimob	Sda	Sda
67.	AWAN JUNAEDI	AIPTU/ 64020506		Sda	6402
68.	GOWI	BRIGADIR/ 79050152	Resmob	Sda	Sda
69.	JAJA NUGRAHA	AIPTU/ 68050065	Pariwisata	Sda	6403
70.	SUGIARTO	BRIPTU/ 84080686		Sda	Sda
71.	SURYADI	BRIGADIR/ 77070879		Sda	6404
72.	SUMARNO	BRIPTU/ 56050694		Sda	6406
73.	SUMARDI	AIPDA/ 65010418		Sda	6407

74.	MOCH. EFFENDI	AIPTU/ 56050469	Puskodal	Binamas	
75.	A. KHAERUDIN	AIPTU/ 61040606	Bimas	Sda	
76.	TURSINO	AIPTU/ 62090400	Serse	Sda	
77.	SUWARTO	AIPDA/ 67110407	Serse	Sda	
78.	SAPARDI	AIPDA/ 68050495		Sda	
79.	PARDONO	AIPDA/ 60070208		Sda	
80.	SYAHRIL HS	AIPDA/ 57060329	Bimmas	Sda	
81.	PRIYADI	BRIPKA/ 73050487		Sda	
82.	ANASRUL.A.	BRIPKA/ 59010184		Sda	
83.	ADE ENDANG WINATA	BRIPKA/ 71080207	Bimmas	Sda	
84.	TUMIN	BRIPKA/ 60060351		Sda	
85.	R. SINAGA	BRIPKA/ 61110392		Sda	
86.	NURDIN	BRIPKA/ 60020544		Sda	
87.	NUROHMAT	BRIPKA/ 73060562		Sda	
88.	L. MUDIYANA	BRIGADIR 60030586		Sda	
89.	HARIYANTO	BRIGADIR/ 79091076		Sda	
90.	BAMBANG SRI H	BRIGADIR/ 56120155		Sda	
91.	PURDIYATMO,SH	AIPTU/ 66110005	Lantas	Kapospol Palen Semi	
92.	B. NAINGGOLAN	BRIPKA/ 77030453		Sda	
93.	SUTRASMOKO	AIPTU/ 64050545		Kapospol Gembor	
94.	RUSTANTYO, SH	AIPDA/ 70010174	Intel	Sda	
95.	RACHIM. A.	PENGATUR/ 030217364		Staf Reskrim	P N S
96.	KARTAM	PENGATUR/ 0302939732		Staf Intelkam	P N S
97.	NORMA BIMA	PENGATUR/ 030226719		Staf Bataud	P N S
98.	PARTINI	PENGADUR/ 030241291		Staf Bataud	P N S

POLRI DAERAH METRO JAYA
RESOR METROPOLITAN TANGERANG
SEKTOR KOTA JATIUWUNG
Jl. Gatot Subroto Km 5 Jatiuwung

**DATA ANGGOTA POLSEKTA JATIUWUNG
YANG SUDAH MENGIKUTI KEJURUAN**

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	KEJURUAN	KESATUAN	KET
1.	IMAN SETIAWAN,SIK	AKP/ 78071142	Reserse	Kapolsek	
2.	SURADI. AW	AKP/ 55090176	Bimas	Wakapolsek	
3.	M.TAAT RESDIANTO,SH	IPTU/ 84121615	Reserse	Kanit Reskrim	
4.	SUGIYONO	BRIPKA/ 62060104	Bimas	SPK Pok "A"	
5.	R. NAINGGOLAN	AIPTU/ 58060885	Lantas	SPK"C"	
6.	M. JAENUDIN	BRIPTU/ 85110109	Serse	Sda	
7.	A. M. YUSUF.S.	AIPTU/ 64070137	Serse	Kateam I Reskrim	
8.	AGUS NURDIN	BRIPKA/ 69080492	Serse	Sda	
9.	I NENGAH SUKRATA	BRIGADIR/ 80050683	Komputer	Sda	
10	ADE MOCH ALI, SH	BRIPKA/ 71050994	Serse	Team II Reskrim	
11.	MATSANI	BRIPKA/ 72100123	Bimas	Sda	
12.	HARTONO	AIPTU/ 59110609	Bimmas	Team III Reskrim	
13.	NASTAIN	AIPDA/ 70060094	Intel Lanjutan	Team IV Reskrim	
14.	PEPEN FADILAH	AIPDA/ 69100197	Brimob	Team Narkoba	
15.	AHMAD HOLILI	BRIPKA/ 69010366	Intelkam	Sda	
16.	MOCH AGUNG S	BRIPDA/ 87100646	Intelkam	Sda	
17.	ANGGA HERMAWAN	BRIPDA/ 87031006	Intelkam	Sda	
18.	YAYAN WAHYUDIN	BRIPDA/ 88030307	Intelkam	Sda	
19.	AGUS SETIAWAN	BRIDA/ 88080198	Intelkam	Sda	
20.	M. BUDIARTO	AIPTU/ 53090370	Lantas	Kaunit Lantas	

21.	PURYANTO	BRIPKA/ 67090502	Samapta	Sda	
22.	M. DIDIN. K.	BRIGADIR 79010189	Samapta	Sda	
23.	AGUNG WIBOWO,SH	BRIPKA/ 74050183	Lantas	Team Patko	I 6401
24.	GUSTRI. W.	BRIPTU/ 80080345	Brimob	Sda	Sda
25.	CATUR HADI.S.	BRIGADIR/ 80050904	Serse	Sda	6404
26.	APIP KOMAR.T.	BRIPTU/ 79100649	Brimob	Sda	Sda
27.	GOWI	BRIGADIR/ 79050152	Resmob	Sda	Sda
28.	JAJA NUGRAHA	AIPTU/ 68050065	Pariwisata	Sda	6403
29.	MOCH. EFFENDI	AIPTU/ 56050469	Puskodal	Binamas	
30.	A. KHAERUDIN	AIPTU/ 61040606	Bimas	Sda	
31.	TURSINO	AIPTU/ 62090400	Serse	Sda	
32.	SUWARTO	AIPDA/ 67110407	Serse	Sda	
33.	SYAHRIL HS	AIPDA/ 57060329	Bimmas	Sda	
34.	ADE ENDANG WINATA	BRIPKA/ 71080207	Bimmas	Sda	
35.	PURDIYATMO,SH	AIPTU/ 66110005	Lantas	Kapospol Palen Semi	
36.	RUSTANTYO, SH	AIPDA/ 70010174	Intel	Pospol Gembor	

Jatuiwung, Januari 2010
**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA
 JATIUWUNG**

IMAN SETIAWAN, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP
78071142

POLRI DAERAH METRO JAYA
RESOR METROPOLITAN TANGERANG
SEKTOR KOTA JATIUWUNG
Jl. Gatot Subroto Km 5 Jatiuwung

**DATA ANGGOTA POLSEKTA JATIUWUNG
YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN**

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	Pelatihan	KESATUA N	KET
1.	ARIF RACHMAN	BRIPDA/ 78050973	Pelatihan Taud	Sda	
2.	SUGIYONO	BRIPKA/ 62060104	Pelatihan Bimmas	SPK Pok "A"	
3.	FAREL SARAGIH	AIPDA/ 57060329	Pelatihan Bimmas	SPK "B"	
4.	I. GUSTI PUTU NPN	BRIGADIR/ 78030500	Pelatihan Komputer	Sda	
5.	SUDIYONO	BRIPTU/ 52100011	Pelatihan Bimmas	Sda	
6.	R. NAINGGOLAN	AIPTU/ 58060885	Pelatihan Lantas	SPK "C"	
7.	M. JAENUDIN	BRIPTU/ 85110109	Pelatihan Serse	Sda	
8.	A. M. YUSUF.S.	AIPTU/ 64070137	Pelatihan Serse	Kateam I Reskrim	
9.	AGUS NURDIN	BRIPKA/ 69080492	Pelatihan Serse	Sda	
10.	I NENGAH SUKRATA	BRIGADIR/ 80050683	Pelatihan Serse	Sda	
11.	ADE MOCH ALI, SH	BRIPKA/ 71050994	Pelatihan Serse	Team II Reskrim	
12.	MATSANI	BRIPKA/ 72100123	Pelatihan Serse	Sda	
13.	HARTONO	AIPTU/ 59110609	Bimmas	Team III Reskrim	
14.	CECEP	BRIPKA/ 72020431	Pelatihan Serse	Sda	
15.	ROSYID SUGIMUN,SH	BRIPKA/ 73070595	Pelatihan Serse	Sda	
16.	NASTAIN	AIPDA/ 70060094	Pelatihan Serse	Team IV Reskrim	
17.	M. IDRIS	BRIPKA/ 73070432	Pelatihan Serse	Sda	
18.	IMAM SANTOSO	BRIPKA/ 75090834	Pelatihan Serse	Sda	
19.	B. PANGARIBUAN	BRIGADIR/ 78070745	Pelatihan Serse	Team Buser	
20.	LASMIDI	BRIGADIR/ 81080502	Pelatihan Serse	Sda	

21.	PEPEN FADILAH	AIPDA/ 69100197	Pelatihan Serse	Team Narkoba	
22.	JAYENG UTAMA	BRIPKA / .72110452	Pelatihan Serse	Sda	
23.	LUKAS SARJONO	BRIPKA/ 62010367	Pelatihan Intelkam,	Unit Intelkam	
24.	AHMAD HOLILI	BRIPKA/ 69010366	Pelatihan Intelkam,	Sda	
25.	MOCH AGUNG S	BRIPDA/ 87100646	Pelatihan Intelkam,	Sda	
26.	ANGGA HERMAWAN	BRIPDA/ 87031006	Pelatihan Intelkam,	Sda	
27.	YAYAN WAHYUDIN	BRIPDA/ 88030307	Pelatihan Intelkam,	Sda	
28.	AGUS SETIAWAN	BRIDA/ 88080198	I Pelatihan Intelkam,	Sda	
29.	M. BUDIARTO	AIPTU/ 53090370	Pelatihan Lantas	Kaunit Lantas	
30.	PURYANTO	BRIPKA/ 67090502	Pelatihan Lantas	Sda	
31.	A. SUMERI	BRIPKA/ 73120804	Pelatihan Lantas	Sda	
32.	IDRIS	BRIPKA/ 74040517	Pelatihan Lantas	Sda	
33.	M. DIDIN. K.	BRIGADIR 79010189	Pelatihan Lantas	Sda	
34.	AGUNG WIBOWO,SH	BRIPKA/ 74050183	Pelatihan Lantas	Team I Patko	6401
35.	SUWARDI	AIPDA/ 58050846	Pelatihan Bimmas	Sda	6402
36.	MOCH. EFFENDI	AIPTU/ 56050469	Puskodal	Binamas	
37.	A. KHAERUDIN	AIPTU/ 61040606	Pelatihan Bimmas	Sda	
38.	TURSINO	AIPTU/ 62090400	Pelatihan Serse	Sda	
39.	SUWARTO	AIPDA/ 67110407	Pelatihan Serse	Sda	
40.	SAPARDI	AIPDA/ 68050495	Pelatihan Bimmas	Sda	
41.	PARDONO	AIPDA/ 60070208	Pelatihan Bimmas	Sda	
42.	SYAHRIL HS	AIPDA/ 57060329	Pelatihan Bimmas	Sda	
43.	PRIYADI	BRIPKA/ 73050487	Pelatihan Bimmas	Sda	
44.	ANASRULA.	BRIPKA/ 59010184	Pelatihan Bimmas	Sda	
45.	ADE ENDANG WINATA	BRIPKA/ 71080207	Pelatihan Bimmas	Sda	
46.	TUMIN	BRIPKA/ 60060351	Pelatihan Bimmas	Sda	
47.	NURDIN	BRIPKA/	Pelatihan	Sda	